

**Modul Masa Penerimaan Anggota Baru**

**PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota Bandung**

**Penanggung Jawab**

Ketua PK. PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota  
Bandung

De Isvahan Nur Muharam

**Tim Penulis**

Nira Zakiya Nurrahman

(Wakil Sekretaris Wakil Ketua 1 PK. PMII Komisariat UIN Sunan Gunung  
Djati Cabang Kota Bandung)

Muhamad Syukur

(Wakil Ketua III PK. PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang  
Kota Bandung)

## KATA PENGANTAR

Ketua PK. PMII UIN Sunan Gunung Djati

Cabang Kota Bandung

*Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokaatuh*

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُبْدِيْعِ الْهَادِيِّ إِلَى بَيَانِ مَهَيِّعِ الرَّشَادِ  
ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَنبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ أَفْصَحِ الْخَلَائِقِ

PMII yang merupakan sebagai organisasi kaderisasi, tentu sangat mesti mengupayakan kaderisasi agar terus maksimal diantaranya dalam penguatan dan peningkatan keyakinan atau keimanan, pengembangan pengetahuan, dan pengasahan keterampilan. Konsep kaderisasi pun harus juga berangkat dari realitas nyata suatu zaman dan berorientasi pada titik akhir PMII, yakni tujuan organisasi itu sendiri. Agar kader mampu, memahami hal ihwal medan dan zaman geraknya, mengambil *natijah* atau kesimpulan dari keadaan zaman dan dijadikan pelajaran, juga mengambil peran gerak sesuai dengan arah orientasi organisasi.

Kaderisasi dalam tubuh PMII harus mampu membentuk kader yang terus mampu berdiri tegak dalam segala keadaan, pengetahuan yang cukup dan cakap dalam bergerak di zaman dan ruangnya, serta kesiapan pada keterampilan dalam *survive* di zamannya.

Ayat-ayat (penanda-penanda) alam dan zaman yang selalu hadir memiliki kekhasan pada setiap zamannya, mesti dibaca dan ditarik menjadi satu kerangka gerak agar mampu diselaraskan antara Gerakan dengan zaman.

Secara prinsipil, kompetensi dalam kaderisasi di PMII diantaranya Nilai-nilai PMII, Keterampilan dalam berorganisasi dan Kepemimpinan Gerakan. Kompetensi ini dalam setiap jenjang kaderisasi PMII mesti mampu terus dikembangkan sesuai kapasitas kewajiban dan tanggung jawab kader PMII.

PMII sebagai wahana intelektual aktif yang memiliki batas batas nilai, bertemu tahun dengan tahunnya selalu terlibat rancangan perencanaan mengenai nilai luhur entah sains, filsafat, spiritualitas dan Gerakan pembebasan. Kapasitas pada nilai luhur ialah keniscayaan manusia yang natural . Ini menjadi maksud upaya dorongan kehendak dalam keterbebasan dari ketakutan, maka dibangun suatu pola keterhubungan nilai nilai luhur agar mampu menjadi ketenangan manusia, kelompok atau individu.

Laju nilai luhur yang terus hadir pada wahana organisasi kemahasiswaan, mestinya mampu disublim menjadi kesadaran yang jujur atas pikiran dan yang dialaminya serta mewujudkan menjadi gerakan yang tetap pada kejernihan hati dan pikiran. Tetap tidak termanipulasi langitnya pikiran sehingga asingnya kenyataan dan lepas.

Kita mesti serius juga dalam merespon potensi, padahal kesadaran kita terhadap realitas yang dingin ini mengetahui dan akan beresiko pada laju kaderisasi ketika hal demikian tidak ditindaklanjuti.

Tetap pada kedisiplinan berpikir dan kejernihan hati, respon dan sikap kader PMII mesti tetap pada upaya pembebasan masalah dengan kebijakan struktur dan respon baik dari kultur yang terbangun.

Harapannya, Warga PMII khususnya lingkup Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kota Bandung Mampu terus melakukan eksplorasi pengetahuan agar nantinya mampu diintegrasikan dengan nilai-nilai PMII. Terimakasih diucapkan kepada tim penyusun dan yang seluruh yang terlibat, mohon maaf disampaikan, demikian semoga sahabat-sahabat mendapatkan manfaat dari karya ini.

أذ الفتى حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع  
والله الموفق إلى أقوم الطريق

Bandung, 10 Juni 2024  
Ketua PK. PMII UIN Sunan Gunung Djati

De Isvahan Nur Muharam

## KATA PENGANTAR

Ketua PC PMII Kota Bandung

### **PMII, lagi, dan lagi!**

Setiap tahun akan selalu ada perayaan dan peringatan dari sebuah hal yang dilahirkan. Tidak terkecuali dengan satu organisasi yang sudah berkepala enam ini yang melahirkan banyak sekali karya dan cara. Sebelum perayaan memang baiknya ada sebuah telaah diri.

Melihat apa yang usai dikembangkan, apa yang masih berjalan di tempat dan juga apa yang belum bisa digapai. Tidak mesti menunggu intruksi dari pengurus besar, hal ini bisa dimulai dari tingkat yang paling sederhana dalam kepemimpinan PMII. Dari tingkat rayon atau barangkali komisariat yang mewakili karakter dan corak kampus.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia hadir sebagai wadah organisasi mahasiswa dari kalangan pesantren dan islam tradisional. Berdiri sejak tahun 1960, PMII sudah tak lagi muda. Menginjak usia yang ke 60-an, ini membuktikan PMII konsisten dapat terus ber-istiqamah sebagai wadah generasi mahasiswa islam dari masa ke masa. Corak dan sikap PMII sudah dikenal dalam dinamika pergolakan dunia mahasiswa baik itu tingkat kampus, lokal maupun juga nasional.

Pada tahun-tahun ke belakang ada ragam dinamika yang bergejolak di tingkat mahasiswa dan nasional. Dari hal yang dekat, masih teringat dan ada sisa-sisa yang bisa dipelajari untuk berbenah diri. Dimana PMII tidak hadir memberi peranan dan dukungan ataupun penyelesaian.

Hari ini PMII sebagai wadah mahasiswa berorganisasi hanya menampilkan satu wajah yang begitu klise; politik. Sementara dalam dinamika yang begitu serius dan dibutuhkan, PMII justru absen dan hilang dari lapangan. Kita bisa melihat dari dinamika nasional yang terdekat. Dimana kita bisa menemukan PMII saat naik panggungnya islam fundamentalis? Adakah kibaran bendera perisai berbintang lima di depan istana bersama warga tergusur? Dapatkah kita melihat sikap PMII untuk turut andil ambil bagian satu tahun ke belakang?

PMII hakikatnya memiliki wajah yang beragam. Tapi belakangan justru PMII hanya puas berada di sekeliling lingkaran mahasiswa. Dari sekian cabang, dari sekian ribu kader dan anggota, PMII lebih senang bermain di tingkat kampus saja. Membuat dan meleraikan konflik antar mahasiswa dan masih saja berkuat

dalam wajah perebutan politik tingkat kampus. PMII seolah memberi ketegasan yang seharusnya ditolak sejak dalam pikiran.

Ada sebuah degradasi pergerakan dalam prinsip berorganisasi PMII. Dari lemahnya merespon dinamika dan realitas sosial dalam skala nasional pun demikian dari bagaimana PMII mengintegrasikan pergerakan dan juga keilmuan. Sebelum meluas hingga menggerus prinsip berakidah, sebelum PMII menginjak usia angka enam puluh yang lain, barangkali PMII perlu telaah dan berbenah diri untuk kembali merangkul apa yang telah ditinggal, mengingat apa yang telah dilupa dan merawat apa yang telah sirna.

### **Membangun Kualitas, Merawat Kuantitas**

Agar bisa menikmatinya, mula-mula kita harus hidup. Di situlah letak betapa berharganya hidup kolektif di organisasi karena kita masih bisa merasakannya, dengan napas tersengal maupun tidak, tepat saat lebih dari berjuta-juta manusia sulit mendapat semangat bersama.

Tentang hidup dan matinya kita berorganisasi, tidak ada yang lebih baik dari Dr. Karlina Sapelli dalam mengartikulasikannya. Ia berkata bahwa “Apa hubungannya organisasi dengan jatuh bangun hidup orang dalam sehari-hari? Jangan-jangan hanya membangkitkan emosi romantik tanpa solusi. Kita bermenung-menung, kemudian menulis refleksi, menulis puisi, tapi dunia tetap kita biarkan begitu.”

Kita mesti yakin, bahwa berorganisasi lebih yakin dari itu. Menjadi bagian PMII sangat erat dengan tindakan perubahan menuju hal yang lebih baik. Itulah transformasi. Satu catatan penting bagi PMII, apa yang kemudian kita pelajari, kita usahakan, kita kaji, kita alami, dan kita latih terus menerus pada akhirnya mengharapkan sebuah muara. Muara tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah keberpihakan. Itu berhubungan dengan apa yang menjadi agihan ilmu bagi PMII, ilmu bukan hanya untuk ilmu, namun ilmu untuk diamalkan. PMII dengan tegas menolak penguasaan ilmu hanyalah sebatas digunakan untuk memperkokoh menara gading intelektual.

Sebagai organisasi berbasis gerakan, akan selalu ada regenerasi untuk melanjutkan tongkat estafet organisasi. Menggelar lapak untuk mengundang mahasiswa baru. Dan memberi pendidikan organisasi. Adakalanya bahkan saling berlomba menghimpun anggota dengan organisasi tetangga. Alih-alih ada pemberdayaan anggota, organisasi gerakan – begitu juga PMII – hanya mengakomodasi untuk kontestasi politik tingkat kampus belaka. Yang dibangun bukan lagi kualitas melainkan kuantitas seadanya.

Di usia yang tak lagi muda, PMII seharusnya menegaskan sikap untuk melawan dominasi tersebut. Organisasi tidak semestinya melulu didahulukan bicara jumlah anggota, tapi justru lebih penting dari itu, seberapa besar peran anggota organisasi mampu terlibat dalam setiap realitas sosial dan membangun perkembangan intelektual. Dari sanalah bagaimana bisa dirasakan bahwa PMII sebagai organisasi kaderisasi masih menyimpan ketulusan dan disambut dengan balasan, bukan oleh suara yang akan didulang. Tapi jauh dari itu, dibalas oleh pengakuan dan kepercayaan.

Kita sebagai anggota dan kader muda PMII masih memiliki kesempatan untuk merawat langkah baru. Tidak selamanya harus mengekor dominasi demikian. Kita perlu mandiri untuk menampilkan wajah PMII yang lain; Membangun dari bawah dan merangkul yang di atas untuk membentuk kualitas anggota dan kader muda selanjutnya. Dengan menghidupkan kembali forum diskusi, membumikan kembali mahasiswa untuk tidak lupa pada sesama dan merawat budaya islam ramah untuk semesta.

### **Integrasi Pergerakan dan Keilmuan**

Adalah Integrasi Pergerakan dan Keilmuan yang perlu didekap oleh PMII. Keilmuan sebagai pondasi dasar membangun organisasi dan Pergerakan menjadi pola aplikatif sikap PMII membaca realitas sosial. Sudah semestinya PMII perlu membangun karakter dan corak organisasi yang benar-benar bisa menjadi wadah mahasiswa.

Tentu saja hal ini dicapai dengan bagaimana PMII mampu mengembangkan dan menentukan arah dalam berorganisasi. PMII sejatinya telah memiliki manhaj dan orientasi organisasi yang baik.

Hal yang mulai hilang adalah bagaimana PMII mengembangkan potensi keilmuan. Dimana hal ini akan memiliki peran penting menjadi landasan dasar untuk memulai basis gerakan atau kerap kali ada dikotomi pola arah yang saling berlawanan. Saat keilmuan memunggungi gerakan dan sebaliknya. Di sinilah pentingnya integrasi antara Keilmuan dan gerakan untuk berjalan selaras dan berdampingan membangun PMII yang kokoh secara intelektual dan masif dalam pergerakan.

Dari sini kita perlu membangun PMII yang lebih memiliki ragam gerakan dengan basis intelektual yang kuat. Bahwa PMII dibentuk untuk mengembangkan intelektual dan menentukan sikap berpihak kepada yang lemah.

Pada keberlanjutannya, setiap langkah dan gerak yang dihadapi bersama dalam proses di PMII merupakan agihan demi agihan perjalanan sunyi diri

seorang intelektual. Ia mesti mau menalar, ia mesti mau berpikir, dan ia mesti mau untuk terus menyangsikan tiap realitas yang dihadapi dan dijumpainya. Toh, bukankah hakikat dari diri seorang manusia adalah mengaktifkan akalbudi untuk melakukan penyangsian demi penyangsian. Pada setiap jalan yang ada pastilah kita (mungkin) menemui jalan buntu, ketakutan, dan kekhawatiran. Barangkali hal-hal itu tidak lain adalah salah satu ujian seberapa kuat kita bertahan dalam PMII. Ber-PMII membutuhkan kekuatan mental, napas panjang pergerakan, militansi, dan semangat kesadaran yang gigih.

Keberhasilan kita untuk pulih, walau masih menerka-nerka, terbukti menjadi suplemen semangat yang membuat kerja kolektif itu menjadi lebih kesetanan. Berkali-kali kita, juga dengan sahabat-sahabat yang lain, kerap mengatakan bahwa kehidupan di organisasi adalah untuk hidup-mengidupi. Mereka yang bisa menghargai kehidupan, agaknya, memang patut mendapat imbalan yang sama baiknya dari hidup itu sendiri.

Bandung, 10 Juni 2024

Ketua PC. PMII Kota Bandung

Ilham Akbar Zaini

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

*Salam Pergerakan!*

*Alhamdulillahirrabil'alamin*, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan rahmat serta Karunia-Nya, hingga kami dapat menyelesaikan modul MAPABA ini. Shalawat serta sala semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh barakah saat ini.

Modul Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati cabang Kota Bandung ini merupakan hasil diskusi panjang sahabat sahabati PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati cabang Kota Bandung dan dimaksudkan untuk menjadi Hand Out bagi peserta Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) yang diadakan khususnya di ruang lingkup Komisariat UIN Sunan Gunung Djati cabang Kota Bandung.

Harapannya, semoga dengan adanya modul ini dapat menjadi acuan bagi peserta MAPABA dalam mengikuti kegiatan serta menambah wawasan bagi setiap anggota dan kader PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati cabang Kota Bandung. Semoga dengan terselenggaranya MAPABA dapat melahirkan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang militan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Selanjutnya tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan untuk membantu dalam proses penyusunan modul ini. Dalam menyelesaikan modul ini, kami mengerti bahwa masih banyak kekurangan, semoga kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bersama kedepannya. Aamiin..

*Ilmu dan bakti kuberikan...*

*Adil dan makmur ku perjuangkan...*

*Wallahumuwafieq illa Aqwamith Thariq..*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Bandung, 9 Juni 2024

(Tim Penulis)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	viii

KE-PMII-AN .....	1
A. Pengertian PMII.....	1
B. Identitas dan Citra Diri PMII .....	1
C. Sejarah PMII.....	3
D. Asas, Sifat, Tujuan, dan Usaha PMII.....	4
E. Trilogi PMII.....	5
F. Pendiri PMII dan Ketua Umum PMII.....	7
G. Filosofi Logo PMII .....	9
AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH (ASWAJA) .....	11
NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP) .....	40
SEJARAH NEGARA & BANGSA .....	52
A. Sejarah Indonesia Merdeka .....	52
B. Peran Nahdatul Ulama dalam Kemerdekaan.....	66
SEJARAH GERAKAN MAHASISWA (SEJARAH GERMA).....	74
A. Geneologi Gerakan Mahasiswa Indonesia.....	74
B. Perkembangan Gerakan Mahasiswa dari Era Pra-Kemerdeaan hingga Era Reformasi .....	75
C. Legitimasi Sejarah Gerakan Mahasiswa.....	85
E. Gerakan Mahasiswa Mengusung Isu Pendidikan .....	88
ANTROPOLOGI KAMPUS.....	90
A. Pengertian Antropologi Kampus.....	90
B. Tipologi Mahasiswa .....	91
C. Peran Mahasiswa .....	92
D. Organisasi Mahasiswa.....	93
E. Aspek-aspek yang terdapat dalam Kampus .....	94
F. Tri Dharma Perguruan Tinggi.....	95
G. Sumpah Mahasiswa .....	96
STUDI GENDER DAN KELEMBAGAAN KOPRI.....	98
A. Pengertian Gender .....	100

B. Perbedaan Sex dan Gender .....	101
C. Manifestasi Ketidakadilan Gender .....	103
D. Perspektif Teori Gender.....	107
E. Kodrat Perempuan dalam Islam .....	110
F. Sejarah KOPRI.....	112
G. Lembaga KOPRI .....	113
H. Sistem Kaderisasi Perempuan di PMII.....	114
I. Panca Norma KOPRI .....	114
J. Nilai Kader KOPRI.....	114
K. Musuh KOPRI.....	115
LAGU-LAGU PERJUANGAN .....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	119
DAFTAR RUJUKAN BUKU BACAAN WAJIB.....	121

## KE-PMII-AN

### A. Pengertian PMII

PMII merupakan organisasi kaderisasi yang berlandaskan Islam ahlussunah waljamaah dan nilai-nilai ke Indonesiaan. Berdiri sejak tanggal 17 April 1960 di Surabaya (Fauzan Alfas: 2015) dan hingga lebih dari setengah abad kini PMII terus eksis untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. PMII menjadi wadah yang mengemban mandat sejarah dari nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan guna mendidik dan membimbing kader atau anggotanya untuk menjadi pribadi ulul albab.

### B. Identitas dan Citra Diri PMII

Apa itu identitas PMII? seperti empat huruf kata 'PMII', yaitu suatu wadah atau perkumpulan organisasi kemahasiswaan dengan label Pergerakan yang Islam dan Indonesia yang mempunyai tujuan “Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia Yang Bertaqwa kepada Allah swt. Berbudhi luhur, Berilmu, Cakap dan Bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan (BAB IV AD PMII). Menuju capaian ideal sebagai mahluk Tuhan, sebagai umat yang sempurna, yang kamil, yaitu mahluk Ulul Albab.

Kata Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia jika diurai adalah:

1. Pergerakan bisa didefinisikan sebagai 'lalu-lintas gerak', gerak dalam pengertian fisika adalah perpindahan suatu titik dari ordinat A ke ordinat B. Jadi 'Pergerakan' melampaui 'gerak itu sendiri, karena pergerakan berarti dinamis, gerak yang terus-menerus. Kesimpulannya, pergerakan meniscayakan dinamisasi, tidak boleh stagnan (berhenti beraktivitas) dan beku, beku dalam pengertian kaku, tidak kreatif-inovatif. Prasyarat kreatif- inovatif adalah kepekaan dan kekritisan, dan kekritisan butuh kecerdasan. Pergerakan bukan hanya menerangkan suatu

perkumpulan/organisasi tetapi juga menerangkan sifat dan karakter organisasi itu sendiri.

2. Mahasiswa adalah sebutan orang-orang yang sedang melakukan studi di perguruan tinggi, dengan predikat sebutan yang melekat, mahasiswa sebagai 'wakil rakyat, aktor perubahan, komunitas penekan terhadap kebijakan penguasa, dll.
3. Islam, Agama Islam yang dijadikan basis landasan sekaligus identitas bahwa PMII adalah organisasi mahasiswa yang berlandaskan agama. Karenanya jelas bahwa rujukan PMII adalah kitab suci agama Islam ditambah dengan rujukan selanjutnya, sunnah nabi dan para sahabat, yang itu terangkum dalam pemahaman jumbuh, yaitu *ahlussunnah waljama' ah*. Jadi Islam ala PMII adalah Islam yang mendasarkan diri pada aswaja -dengan varian didalamnya- sebagai landasan teologis (keyakinan keberagamaan).
4. Indonesia, kata 'Indonesia pada organisasi PMII tidak lain untuk menunjukkan sekaligus mengidealkan PMII sebagai organisasi kebangsaan, organisasi mahasiswa yang berpandangan nasionalis, punya tanggung jawab kebangsaan, kerakyataan dan kemanusiaan kurang tepat jika PMII hanya dipahami sebagai organisasi keagamaan semata. keislaman dan keIndonesiaan PMII adalah seimbang.

Jadi dapat dikatakan bahwa PMII adalah pergerakan mahasiswa yang Islam dan yang Indonesia, yang mendasarkan pada agama Islam dan sejarah, cita-cita kemendekan dan laju perjalanan bangsa ini kedepan, Islam-Indonesia (dua kata digabung) juga bisa dimaknai Islam yang bertransformasi ke ranah Nusantara Indonesia, Islam Indonesia adalah Islam lokal bukan Islam Arab secara persis, tapi nilai universalitas Islam atau prinsip nilai islam yang bersinkretisme dengan budaya nusantara menjadi Islam Indonesia, ini adalah karakter Islam PMII yang sejalan dengan ajaran aswaja.

### C. Sejarah PMII

Ide dasar berdirinya PMII adalah bermula dari keinginan kuat para mahasiswa Nahdliyin untuk membentuk wadah (organisasi) mahasiswa yang berideologi *ahlussunnah waljama'ah* (aswaja). Sebelum berdiri PMII, sudah ada organisasi mahasiswa nahdliyin yang berdiri, namun masih bersifat lokal seperti Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) yang berdiri pada tahun 1955 di Jakarta. Di Surakarta didirikan Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) pada tahun yang sama. Kemudian berdiri juga Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (PMNU) di Bandung Selain organisasi tersebut, ada pula mahasiswa Nahdliyin yang tergabung pada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang terwadahi pada departemen perguruan tinggi.

Adanya berbagai macam organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama ternyata tidak mampu membendung hasrat berdirinya organisasi mahasiswa nahdliyin secara nasional. Hal itu terbukti pada Konferensi Besar IPNU pada tanggal 14-17 Maret 1960 di Kaliurang Yogyakarta, disepakati untuk berdirinya organisasi kemahasiswaan Nahdliyin. Kemudian dibentuklah panitia yang menjadi tonggak berdirinya organisasi mahasiswa Nahdliyin yang sejumlah 13 orang mahasiswa NU dari berbagai daerah. Ketiga belas panitia ini kemudian mengadakan pertemuan yang disebut dengan Musyawarah Mahasiswa NU. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 14-16 April 1960 di Gedung Madrasah Muallimin Nahdlatul Ulama (Gedong Yayasan Khadijah Wonokromo Surabaya). Selanjutnya hal musyawarah tersebut diumumkan di Balai Pemuda pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 17 April 1960. Maka mulai saat itulah PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dinyatakan sebagai hari jadi PMII yang diperingati dengan istilah Hari lahir (Harlah) PMII.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah suatu organisasi mahasiswa yang bergerak memperjuangkan nilai-nilai beragama dan bernegara yang termanifestasi dalam sebuah ideologi yang menjadi dasar gerakan atau bisa disebut sebagai Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Ini merupakan ciri khas dari PMII

juga merupakan pembeda antara PMII dengan organisasi mahasiswa lainnya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan nilai-nilai yang diperjuangkannya yang berbeda dengan organisasi mahasiswa lainnya pasti memiliki pola gerak yang berbeda juga. PMII menjalankan perannya sebagai organisasi pergerakan termaktub dalam Trilogi PMII.

#### **D. Asas, Sifat, Tujuan, dan Usaha PMII**

##### **1. Asas PMII**

Sebagaimana termaktub dalam AD/ART bab II pasal 2, PMII berasaskan Pancasila. Pancasila diyakini sebagai suatu komitmen bersama *the founding fathers* bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga keutuhannya sebagai dasar Negara. Karena PMII merupakan organisasi kepemudaan yang lahir di bumi Pancasila, maka PMII pun wajib membela dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia di tengah kemajemukan dan kepluralan masyarakat Indonesia.

##### **2. Sifat PMII**

Dalam AD/ART bab III pasal 3 disebutkan bahwa PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independen dan professional, maksudnya:

- Keagamaan adalah nilai - nilai Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah.
- Kemahasiswaan adalah sifat yang dimiliki mahasiswa yaitu intelektualitas, idealisme, perubahan, komitmen, kepedulian sosial dan kecintaan pada hal yang bersifat positif.
- Kebangsaan adalah nilai - nilai yang bersumber dari kultur, filosofi, sosiologi dan yuridis bangsa Indonesia.
- Kemasyarakatan adalah bersifat menyeluruh dan menyatu dengan masyarakat, bergerak dari dan untuk masyarakat.

- Independen adalah berdiri secara mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok.
- Profesional adalah distribusi tugas dan wewenang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan keilmuan masing-masing.

### 3. Tujuan PMII

Sebagaimana termaktub dalam AD/ART bab IV pasal 4 bahwa tujuan PMII adalah “Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”.

### 4. Usaha PMII

Dijelaskan dalam AD/ART bab IV pasal 5 bahwa usaha PMII meliputi:

- Menghimpun dan membina mahasiswa islam Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta mewujudkan pribadi insal ulul albab.

## E. Trilogi PMII

Trilogi PMII merujuk pada nilai-nilai yang diperjuangkan PMII, yakni nilai bernegara dan nilai beragama. Trilogi PMII adalah Tri Motto, Tri Komitmen, dan Tri Khidmat.

1. Tri Motto mencakup tiga aspek, yakni Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh. Ketiga hal tersebut wajib tertanam pada diri setiap kader PMII guna menjadi penunjuk arah melangkah dalam menjani kehidupan didunia sebagai *khalifah fil ard*. Selalu mengingat akan keberadaan Tuhan

sebagai pemberi petunjuk, kemudian menafsirkan setiap petunjuk tersirat dari-Nya, dan mengimplementasikan dalam wujud amal sholeh. Inilah bentuk penerapan dari Tri Motto yang penting untuk dipahami.

2. Tri Komitmen yakni berupa Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan. Kader PMII yang juga merupakan seorang organisator berkewajiban mengimplementasikan Tri Komitmen. Jujur sebagai bentuk tanggungjawab kepada Allah SWT Kebenaran dalam berucap dan bertindak. serta adil dalam memihak, agar kedamaian dapat terjaga. Ketiga hal tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap dimensi yang berbeda-beda, Habbluminnallah, Habbluminnannas, dan Habblumminalam.
3. Tri Khidmat tersusun dari tiga kata yaitu Taqwa, Intelektual, dan Profesional. Yang merupakan kapasitas diri yang wajib dimiliki oleh setiap kader PMII. Dengan kapasitas diri seperti itu, para kader PMII diharapkan paham siapa, apa, dan bagaimana diri mereka dengan melihat kondisi yang ada. Dalam menjalankan tugas dan menjaga fungsi, sublimasi Tri Khidmat pada tataran batin menjadi penting. Taqwa akan membawa pada pemahaman melaksanakan perintah Allah SWT, yang kemudian didukung oleh kadar intelektual yang cukup sehingga tumbuh kesadaran dalam menjalankan perintah Allah SWT. Sehingga nampaklah sifat profesional. Hal seperti inilah yang harus terjadi pada diri setiap kader PMII ketika telah menjalankan amanat disetiap struktur keorganisasian, baik dalam struktur koorganisasian PMII maupun organisasi-organisasi lain.

Trilogi PMII harus tertanam didalam diri setiap kader PMII. Keberhasilan dalam pengimplementasian Trilogi PMII dapat dilihat dari pola pikir kader, ucapan, serta perbuatan tindakan dari setiap kader PMII Ketika tiga indikator tersebut tidak menunjukkan pertentangan terhadap nilai-nilai beragama dan bernegara, maka pastilah Trilogi PMII sudah tertanam didalam diri setiap kader. Pengimplementasian ini akan berdampak pada proses pencapaian tujuan PMII Sejah mana Trilogi ini dapat dimplementasikan oleh kader PMII, maka sejauh

itu pula capaian yang telah diperoleh oleh PMII. Karena perlu diakui, bahwa organisasi adalah sebuah wadah, sedangkan para anggotanya adalah penghuni wadah tersebut. Jika wadah tersebut hanya terisi oleh “kuantitas” tanpa kualitas, maka pengibaratanya seperti cawan emas penuh air tawar. Berbeda jika wadah tersebut terisi oleh “kualitas” walaupun secara kuantitas lemah, maka dapat diibaratkan seperti cawan hambru, berisi susu.

Melihat begitu dalamnya makna dibalik Trilogi, serta pentingnya pengimplementasiannya terhadap suksesi tujuan PMII, maka segala bentuk tantangan pada zaman ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak memaksimalkan penanaman pemahaman Trilogi kepada setiap kader. Pergeseran paradigma, penumpukan daya kritis, merupakan tantangan nyata yang terjadi saat ini. Pada kondisi seperti inilah sebenarnya para kader yang sudah paham terhadap Trilogi PMII dapat melakukan dua tindakan sekaligus, yakni mencoba mengimplementasikan Trilogi PMil tersebut, serta menjalankan kewajibannya untuk menyadarkan kader lain yang terlanjur "melupakan" Trilogi PMII agar kembali pada koridor gerak PMII sehingga tidak mudah terbawa oleh arus kekacauan moral dan akal.

## **F. Pendiri PMII dan Ketua Umum PMII**

- a. Pendiri PMII:
  1. Shobich Ubaid (Jakarta)
  2. Cholid Mawardi (Jakarta)
  3. Said Budairy (Jakarta)
  4. Makmun Syukri (Bandung)
  5. Hilman Badrudinsyah (Bandung)
  6. Ismail Makky (Yogyakarta)
  7. Moensif Nahravi (Yogyakarta)
  8. Nuril Huda Suaidy (Surakarta)
  9. Laily Mansur (Surakarta)
  10. Abdul Wahab Jaelani (Sernarang)
  11. Hisbullah Huda (Surabaya)

12. M. Cholid Narbuko (Malang)
13. Ahmad Husein (Makassar)
- b. Ketua Umum PMII
  1. Sahabat Mahbub Djunaidi (1960-1967)
  2. Sahabat M Zamroni (1967-1973)
  3. Sahabat Abduh Paddare (1973-1977)
  4. Sahabat Ahmad Bagja (1977-1981)
  5. Sahabat Muhyiddin Arusbusman (1981-1985)
  6. Sahabat Suryadharma Ali (1985-1988)
  7. Sahabat M. Iqbal Assegaf (1988-1991)
  8. Sahabat Ali Masykur Musa (1991-1994)
  9. Sahabat A Muhaimin Iskandar (1994-1997)
  10. Sahabat Syaiful Bahri Anshori(1997-2000)
  11. Sahabat Nusron Wahid (2000-2003)
  12. Sahabat A Malik Haramain (2003-2005)
  13. Sahabat Hery Hariyanto Azumi (2005-2008)
  14. Sahabat M Rodli Kaelani (2008-2011)
  15. Sahabat Addin Jauharudin (2011-2014)
  16. Sahabat Ammuddin Ma'ruf (2014-2017)
  17. Sahabat Agus Mulyono Herlambang (2017-2020)
  18. Sahabat M. Abdullah Syukri (2020-2024)

## G. Filosofi Logo PMII



Pencipta: H. Said Budairy

1. Bentuk Perisai berarti ketahanan dan kemampuan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh dari luar.
2. Bintang adalah perimbangan ketinggian dan semangat cita-cita yang selalu memancar.
3. 5 (lima) bintang sebelah atas menggambarkan Rasulullah dengan empat sahabat terkemuka (*Khulafa' ur Rasyidin*). 4 (empat) bintang sebelah bawah menggambarkan empat madzhab yang berhaluan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* (ASWAJA). 9 (sembilan) bintang secara keseluruhan dapat berarti ganda, yaitu Rasulullah dengan empat orang sahabatnya serta empat imam madzhab ASWAJA itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi dan penerang umat manusia. 9 (Sembilan) bintang juga menggambarkan sembilan orang pemuka penyebar Agama Islam di Indonesia yang disebut Wali Songo.
4. Warna biru, sebagaimana tulisan PMII, berarti kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh warga pergerakan, biru

juga menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kesatuan wawasan nusantara.

5. Warna biru muda, sebagaimana dasar perisai sebelah bawah berarti ketinggian ilmu, budi pekerti dan taqwa.
6. Warna kuning, Identitas sebagai mahasiswa yang menjadi sifat dasar pergerakan, lambang kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan.

## **AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH (ASWAJA)**

Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) merupakan bagian integral dari sistem keagamaan mayoritas umat Islam, di mana Aswaja merupakan metode pemahaman dan pengamalan keyakinan tauhid. Lebih dari itu, disadari atau tidak Aswaja merupakan bagian kehidupan sehari-hari setiap kaum muslimin. Akarnya tertanam dalam pada pemahaman dan perilaku penghayatan kita masing-masing dalam menjalankan Islam.

Selama ini proses reformulasi Aswaja telah berjalan, bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Tahun 1994, dimotori oleh Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA, muncul gugatan terhadap Aswaja yang sampai saat itu diperlakukan sebagai sebuah madzhab (qauli). Padahal di dalam aswaja terdapat berbagai madzhab, khususnya dalam bidang fiqh. Selain itu, gugatan muncul melihat perkembangan zaman yang sangat cepat dan membutuhkan respon yang kontekstual dan cepat pula. Dari latar belakang tersebut serta dari penelusuran terhadap bangunan isi aswaja sebagaimana selama ini digunakan, lahir lah gagasan aswaja sebagai manhaj al-fikr (metode berpikir).

Namun, gagasan aswaja sebagai manhaj al-fikr ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, yakni bagaimana rumusan metode berpikir yang dimiliki oleh aswaja dalam menjawab setiap problem kehidupan ini?

Dari pertanyaan ini, maka lahirkan konsep Manhajul Fikr li Ahl As-Sunnah wal Jama'ah yang digali dan diperas dari gagasan para ulama aswaja. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melihat bahwa gagasan tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman, selain karena alasan muatan doktrinal Aswaja selama ini yang terkesan terlalu kaku. Sebagai manhaj, aswaja menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan bagi pengamalnya untuk menciptakan ruang kreatifitas dan menelurkan ikhtiar-ikhtiar baru untuk menjawab perkembangan zaman.

Bagi PMII, Aswaja juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna bagi setiap tempat dan zaman. Islam tidak diturunkan untuk sebuah masa dan tempat tertentu. Kehadirannya dibutuhkan sepanjang masa dan akan selalu relevan. Namun relevansi dan makna tersebut sangat tergantung kepada kita, pemeluk dan penganutnya, memperlakukan dan mengamalkan Islam. Disini, PMII sekali lagi melihat bahwa Aswaja merupakan pilihan paling tepat ditengah kenyataan masyarakat kepulauan Indonesia yang beragam dalam etnis, budaya dan agama.

## B. Sketsa Sejarah

Ahlussunnah wal Jama'ah dapat ditinjau dari dua perspektif, pertama doktrinal (ajaran) dan kedua adalah historis (sejarah). Dalam perspektif doktrinal, Ahlussunnah wal Jama'ah adalah sekelompok orang yang mengikuti ajaran Nabi dan sahabatnya. Sebagaimana dalam hadits dinyatakan:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ زِيَادِ السَّمْدِيِّ الْمُعَلَّلِ الْبَقَّهَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأَيُّنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، تَفَرَّقُوا بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مَلَّةً، وَسَتَفْتَرِقُوا أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مَلَّةً تَزِيدُ عَلَيْهِمْ مَلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمَلَّةُ الَّتِي تَتَعَلَّبُ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

“Ma ana alaihi wa ashabi”, siapa yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Hadits tersebut menjelaskan bahwa golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pernyataan Nabi ini tentu tidak sekedar kita maknai secara tekstual, tetapi karena hal tersebut berkaitan dengan pemahaman tentang ajaran Islam, maka "Maa Ana 'Alaihi wa Ashabi" *فَهُمُ النَّصُوصُ وَتَفْسِيرُهَا* atau Ahlussunnah wal Jama'ah lebih kita artikan sebagai metode atau cara memahami nash dan bagaimana mentafsirkannya).

Dari pengertian diatas maka Aswaja sesungguhnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi bukanlah sebuah gerakan yang baru muncul diakhir abad ke-3 dan ke-4 Hijriyyah yang dikaitkan dengan lahirnya konsep akidah Aswaja

yang dirumuskan kembali (direkonstruksi) oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (wafat: 935 M) dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi (wafat: 944 M) pada saat munculnya berbagai golongan, yang pemahamannya di bidang akidah sudah tidak mengikuti manhaj atau thariqoh yang dilakukan oleh para sahabat, dan bahkan banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan.

Kemudian dalam perspektif sejarah, proses pembentukan Aswaja terentang sejak zaman Nabi Muhammad hingga Imam al-Asy'ari. Secara umum, ada empat fase sejarah pembentukan Aswaja.

Fase pertama ketika Nabi masih hidup. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam merupakan umat yang satu dan merdeka dari dominasi manapun sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Madinah (Medina Charter, Mitsaqu Madinah, Ahdu Yatsrib). Dalam piagam Madinah, Nabi menyatakan bahwa umat yang berada di bawah Nabi merupakan umat yang satu dan merdeka

إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ

Fase kedua ketika Nabi wafat para sahabat kebingungan hingga berselisih tentang beberapa persoalan. Setelah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW wafat, konsentrasi umat terpecah menjadi tiga, ahlul bayt sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar dan Muhajirin yang lain sibuk mengumumkan kepada umat muslim di pelosok negeri atas kematian Nabi. Pada saat kalut mendengar bahwa Nabi wafat, bangkitlah Sayyidina Umar seraya berkata “bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah wafat beliau sedang didatangi utusan sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan ada sebagian golongan yang beranggapan bahwa Nabi tidak wafat tetapi akan diangkat oleh Allah ke langit sebagaimana Nabi Isa bin Maryam. Maka sayyidina Umar berujar barang siapa yang mengatakan Nabi telah wafat maka aku penggal kepalanya”. Maka datanglah Abu Bakar untuk menyadarkan umat islam bahwa Nabi SAW telah meninggal dengan mengutip Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 30:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)

“Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula),”.

seraya menambahkan:

مَنْ كَانَ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

“Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal, tapi barang siapa yang menyembah Tuhan Muhammad, maka dia senantiasa hidup, tidak akan pernah mati.”.

Polemik umat tidak sampai di situ saja, ada sebagian umat Islam yang murtag dengan menyatakan bahwa ketika Nabi meninggal, maka risalahnya (ajarannya) pun sudah selesai. Tapi polemik ini masih bisa diatasi dengan kegigihan sahabat senior untuk meyakinkan mereka.

Masalah selanjutnya mengenai di manakah Nabi di makamkan? Orang Mekah menginginkan supaya Nabi di makamkan di Mekah, karena Mekah adalah tempat lahirnya, diutusnya, kiblatnya serta tempat keluarganya, dan di Mekah pula kuburan leluhurnya yakni Nabi Ismail AS berada. Sedangkan orang Madinah menginginkan agar Nabi di makamkan di Madinah, karena Madinah merupakan tempat hijrahnya serta tempat para penolongnya. Bahkan sebagian kelompok yang menginginkan Nabi Muhammad SAW agar di makamkan di Baitul Maqdis (Palestina), di sebelah kuburan leluhurnya, yakni Khalilullah Ibrahim AS. Kemudian Abu Bakar meleraikan perdebatan di antara mereka dengan dalil hadis Nabi yang berbunyi:

أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَذْفُونُ حَيْثُ يُبْحَثُونَ

“Sesungguhnya para Nabi di makamkan di tempat meninggalnya.”.

Akhirnya Nabi Muhammad SAW di makamkan di tempat meninggalnya, yakni di kamar Sayyidah Aisyah yang berada di emperan masjid Nabawi Madinah.

Nah, sengketa yang paling berpengaruh terhadap perpecahan umat adalah mengenai siapakah pengganti Nabi? Ketika itu Abu Bakar dan Muhajirin sedang mengumumkan meninggalnya Nabi Muhammad SAW kepada seluruh pelosok negeri Islam. Di pihak lain, sahabat Anshor sedang berkumpul di Tsaqifah bani Saidah untuk memilih khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam

kesempatan itu sahabat Anshor telah memilih Sa'ad bin Ubadah (beliau kadang dipanggil Abu Tsabit atau Abu Qoish atau Abul Hibab bin Ubadah bin Dalim Al-Anshori. Beliau merupakan gegegen suku Khazraj, meninggal di daerah Khouran sebuah daerah di Syam tahun 15 H) untuk menjadi khalifah.

Kemudian proses pengangkatan khalifah di kalangan Anshor ini sampai ke telinga Abu Bakar, maka berangkatlah Abu Bakar dan Umar beserta seorang sahabat Muhajirin ke Tsaqifah bani Saidah untuk memusyawarahkan siapakah yang berhak menjadi khalifah. Disitu terjadilah perdebatan sengit antara pihak Muhajirin dan Anshor tentang siapa yang harus menjadi khalifah. Sahabat Anshor membuat tesis “minna amirun waminkum amirun” (kami punya pemimpin dan kalian punya pemimpin) tapi tesis tersebut dipatahkan oleh Abu Bakar dengan argumentasi hadits Nabi “al-imamah min Quraisyin” (bahwa pemimpin harus dari Quraisy). Akhirnya semua sepakat bahwa khalifah harus dari Muhajirin (Quraisy) dan pilihan jatuh pada Abu Bakar .

Fase ketiga. Fase ini merupakan puncak dari konflik sesama umat Islam yakni peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan yang dikenal dengan nama Perang Siffin. Dalam perang ini pasukan Ali hampir menang, tapi dengan taktik muslihat Amru bin Ash (gubernur Mesir waktu itu dan sebagai pendukung kelompok Muawiyah) yang mengintruksikan seluruh pasukan Muawiyah untuk mengangkat mushaf Al-Qur'an yang ditusuk dengan tombak mereka, perlakuan ini sebagai tanda bahwa kelompok Muawiyah menginginkan berhenti berperang. Melihat keadaan pasukan Muawiyah yang ingin berdamai, maka pasukan Ali berbeda pendapat, ada yang berpendapat “kita harus meneruskan peperangan karena selangkah lagi kita memenagkan peperangan”, namun di pihak lain pengikut Ali ada yang mengatakan “kita harus terima tawaran damai. Hingga akhirnya, khalifah Ali menyetujui arbitrase (tahkim) dan akhirnya dikelabui oleh kubu Muawiyah. Dari sini umat Islam makin terpecah ke dalam berbagai golongan.

Efek dari tahkim adalah umat terpecah menjadi tiga golongan yaitu pertama Jumhur (yang mengakui hasil tahkim dan mengakui Muawiyah sebagai khalifah),

kedua Syiah (yaitu pengikut setia Ali bin Abu Thalib) dan ketiga Khawarij (orang yang keluar dari kelompok Ali kemudian mengkufurkan kelompok Ali dan Muawiyah). Dengan adanya tiga kelompok ini maka pemerintahan Muawiyah menjadi tidak stabil karena kekuasaannya dirongrong oleh kaum Khawarij dan kaum Syiah maka dalam rangka stabilisasi keadaan Muawiyah melontarkan tesis tentang Qodar yang berbunyi “Lau lam yaroni rabbi anni ahlun li hadza amri ma tarokani wa iyyah, wa lau karihallah ma nahnu fih laghayyarah” (seandainya Tuhanku tidak melihat diriku mampu untuk memegang tampuk pemerintahan ini, tentu ia tidak akan membiarkanku memegang tampuk kekuasaan ini. Seandainya ia tidak menyukainya, tentu ia akan mengubahnya). Dengan pernyataan politik diatas, pergolakan sedikit demi sedikit bisa diredam. Kata Kyai Said, dengan pernyataan di atas mungkin Muawiyah berpikiran seperti ini: “kalau Allah tidak ridha kepadaku, tidak mungkin aku akan menjadi khalifah. Kalau Allah benci kepadaku sebagai khalifah, niscaya Allah akan menggantikku dengan orang lain. Nyatanya saya berkuasa dan Ali kalah. Ini semua sudah merupakan ridha Allah”. Dengan kata lain, karena hingga sekarang ini Muawiyah masih berkuasa, berarti Tuhan masih merestui dan meridhai dirinya untuk tetap berkuasa. Tentu saja, doktrin seperti ini sangat efektif untuk meredam suasana tegang di kalangan umat Islam. Mereka yakin bahwa semuanya sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah SWT.

Kemudian paham ini dikembangkan pertama kali oleh Al-Ja’d ibnu Dirham dan dipopulerkan oleh Jahm bin Sofwan dari Khurasan dengan nama Jabariyah.

Selanjutnya, paham Jabariyah di atas di counter oleh Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah (beliau adalah putra sayidina Ali dari istri kedua yaitu Haulah binti Ja’far al-Hanafiyah) sebagai anti tesisnya, dengan pernyataan terkenalanya la qodowala qodar af’alul ibad minal ibad (tidak ada Qodo dan tidak ada Qodar perbuatan manusia dari manusia), yang kemudian paham ini diteruskan oleh Ma’bad al-Juhani dan Ghailam ad-Dimasyqi dengan pernyataanya la qodowala qodar af’alul ibad minal ibad wal amru unuf (tidak ada Qodo dan tidak ada Qodar perbuatan manusia dari manusia bahkan Allah tidak tahu manusia akan berbuat apa, Allah baru tahu setelah dilakukan oleh manusia) lalu Ma’bad dan Ghailam

ini dikenal sebagai pendiri Qodariyah, pernyataan Ma'bad dan Ghailam di atas di modernisir oleh Washil bin Atho (pendiri Muktazilah) dengan pernyataannya la qodowala qodar af'alul ibad minal ibad bal wawlohu ya'lam (tidak ada qodo dan tidak ada qodar perbuatan manusia dari manusia tapi Allah tahu).

Kaum Khawarij sebagaimana di atas mereka mengkufurkan Ali dan Muawiyah beserta orang yang melakukan dosa besar, kata mereka orang yang melakukan dosa besar akan masuk neraka karena mereka melakukan tahkim, dan tahkim ini menghukumi sesuatu dengan hukum manusia. Kemudian paham Khawarij ini dibantah oleh suatu golongan yang menamakan diri Murjiah. Kemudian dalam masing-masing golongan (sekte/aliran) di atas terjadi pertentangan dan silang pendapat di internal mereka hingga akhirnya mereka mengkafirkan satu sama lainnya, maka jadilah kurang-lebih 72 golongan.

Setelah kita mengetahui aliran dalam Islam maka pertanyaan sekarang dimana aswaja berada? Di tengah situasi kacau-balau dan situasi politik yang tidak menentu, ketika orang sulit menemukan kebenaran, ternyata ada beberapa orang dari generasi tabi'in (generasi penerus sahabat) yang bisa berpikir jernih dan tidak berpihak menyikapi situasi politik saat itu. Kelompok ini dipelopori oleh Imam Hasan Bashri (wafat: 110 H), Abu Sufyan Ats-Tsauri, Fudlail ibn Iyadl, serta Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris Asyafi'i.

Mereka menyikapi situasi saat itu dengan memilih tindakan yang menyejukan, yakni dengan memancarkan suatu doktrin bahwa satu-satunya cara untuk bisa tetap berada di jalan yang lurus adalah dengan ruju' ilal Qur'an (kembali kepada Al-Qur'an). Mereka memilih jarak dari segenap krisis politik saat itu.

Hasan Bashri inilah yang sebenarnya merupakan pondasi awal paham aswaja. Baru kemudian pemikirannya diteruskan oleh Abdullah ibn Kullab (wafat: 255 H), Harits ibn Asad Al-Muhasibi (wafat: 243 H) dan Abu Bakar Al-Qolanisi, yang pada abad berikutnya dilanjutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Ma'turidi.

Dari kajian sejarah di atas bisa disimpulkan bahwa Islam aswaja adalah Islam yang mengikuti ajaran Nabi dan sahabatnya (ma ana alaihi waashabii). Maka dari itu kemunculan aswaja sebagai sebuah ajaran (doktrin) berbarengan dengan munculnya Islam itu sendiri yang diajarkan oleh Nabi dan dipraktikkan oleh Sahabat kemudian diikuti oleh tabi'in dan dilanjutkan oleh tabi'it-tabi'in, tapi pada waktu itu belum terdengar nama atau istilah aswaja secara eksplisit, karena seandainya sudah ada istilah aswaja secara eksplisit niscaya Abu Hanifah (yang mengarang kitab Al Fiqhul Akbar yang berisi tauhid Ahlussunnah wal Jama'ah) dan Syaikh Hasan Bashri memakainya.

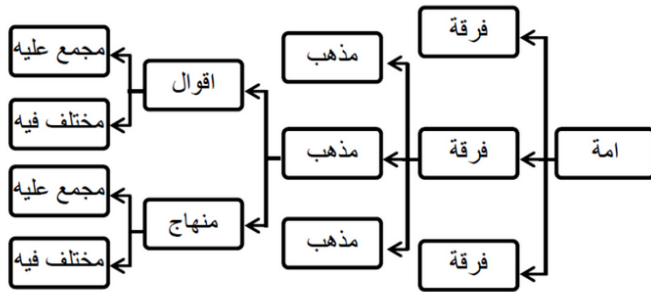
Fase keempat. Ketika masa Abu Hasan al-Asy'ari (wafat: 324 H) dan Abu Mansur al-Ma'turidi (wafat: 333 H). Al-Asy'ari inilah yang mempopulerkan nama Ahlussunnah wal Jama'ah. Beliau hidup pada zaman Al-Mutawakil Alawloh (khalifah Abasiyah ke 10) yang diposisikan sebagai anti tesis dari dominasi rasionalisme Muktazilah, karena pada zaman Dinasti Abasiyah khususnya masa pemerintahan Harun, al Ma'mun, Mu'tasim sampai Watsik, Muktazilah menjadi madzhab negara dan mereka memaksakan pemikirannya kepada khalayak yang puncaknya ditandai dengan Mihnah yang menimpa para ulama, tapi pada zaman al-Mutawakil keadaan berbalik dan Aswaja yang mendapat sokongan dari pemerintah. Oleh karena itu, aliran yang paling berkembang di dunia adalah aswaja (dengan berbagai versinya). Selanjutnya diteruskan oleh Imam Abu Mansur al-Ma'turidi (wafat: 333 H).

Kedua tokoh ini (Al-Asy'ari dan Al-Ma'turidi) menjadi tumpuan ajaran aswaja, bahkan dalam perkembangannya jika disebut aswaja maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asy'ari dan Al-Ma'turidi.

Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut paham aswaja terbesar di dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah penganut madzhab Syafi'i, dan sebagian terbesarnya tergabung -baik tergabung secara sadar maupun tidak- dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala Ahlussunnah wal Jama'ah.

Jika kita telaah perjalanan panjang sejarah umat Islam. Maka kita akan menemukan bahwa pada mulanya umat ini merupakan umat yang satu, kemudian berpecah menjadi beberapa firqoh (sekte/aliran) contohnya aswaja, Syiah, Khawarij dan lain-lain, lalu dari masing-masing firqoh ini memiliki madzhab. Dari setiap madzhab ini tentunya memiliki qoul (produk pemikiran) dan manhaj (metode berpikir) baik dalam bidang akidah (tauhid), fiqh dan tasawuf. Dari setiap qoul dan manhaj itu, ada yang mujm alaih (disepakati), ada pula yang

LIHAT BAGAN



mukhtalaf fiih (diperdebatkan).

### C. Pengertian Aswaja

Pertama-tama kita perlu mengetahui definisi Ahlulsunnah wal Jama'ah. Secara bahasa (etimologis), di mana kalimat tersebut terdiri dari tiga suku kata:

Ahlu, berarti keluarga, golongan atau pengikut. Sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maksudnya semua yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi. Al-Jama'ah, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaurrasyidun (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali). Kata Al-Jama'ah ini diambil dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim yang disetujui kesahihannya oleh Adz-Dzahabi.

مَنْ أَرَادَ بِخُبْرَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَزِمِ الْجَمَاعَةَ

“Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti Al-Jama’ah (kelompok yang menjaga kebersamaan).”

Definisi di atas diilhami dari pernyataan Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani (471-561 H/1077-1166 M) menjelaskan definisi Ahlussunnah wal Jama’ah dalam kitabnya Al-Gunyah lithalibi thariqil haq:

فَالسُّنَّةُ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْجَمَاعَةُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِلَافَةِ أَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ رَحْمَةً اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

“Al-Sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan Al-Jama’ah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi pada masa khulafaurrasyidin”. Jadi Ahlussunnah wal Jama’ah berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat dan tabi’in.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan ormas Islam pertama di Indonesia yang menegaskan diri berpaham Aswaja. Dalam Muqodimah Qonun Asasi (konstitusi dasar) yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari juga tidak disebutkan definisi Aswaja (ta’rif had), namun tertulis di dalam qonun tersebut bahwa Aswaja merupakan sebuah paham keagamaan di mana dalam bidang akidah menganut pendapat Abu Hasan al-Asy’ari dan al-Ma’turidi, dalam bidang fiqih menganut pendapat dari salah satu madzhab empat (Madzahibul Arba’ah - Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali), dan dalam bidang tasawuf –akhlak menganut Imam Junaedi Al-Bagdadi dan Imam Abu Hamid Al-Gozali.

Selama kurun waktu berdirinya (1926) hingga sekitar tahun 1994, pengertian aswaja tersebut bertahan di tubuh NU. aswaja sebagai madzhab artinya seluruh penganut Ahlussunnah wal Jama’ah menggunakan produk hukum atau pandangan para ulama dimaksud.

Secara doktrinal, pengertian aswaja di atas sama sekali tidak salah. Pengertian ini merupakan definisi operasional yang dalam ilmu mantiq disebut Ta’rif Taqsimi (mendefinisikan sesuatu dengan cara mengklasifikasikannya) yang ditujukan untuk memudahkan pemahaman aswaja. Definisi ini memang diperuntukkan bagi mereka yang karena profesi dan tingkat keilmuan yang dimilikinya, tidak mungkin

melakukan penelitian kesejarahan terhadap aswaja. Jadi untuk memudahkan pemahaman, maka disediakanlah jawaban yang praktis-operasional. Ini seperti Nabi yang ditanya Malaikat Jibril tentang pengertian Iman, Islam dan Ihsan. Jawaban yang diberikan Nabi merupakan jawaban praktis operasional. Meskipun Nabi yakin persoalan iman tidaklah sesederhana seperti yang digambarkannya, tapi Nabi tidak memberikan pengertian yang njlimet, abstract dan filosofis.

#### D. Aswaja sebagai Manhaj al-Fikr

Kurang lebih sejak 1995-1997, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Aswaja sebagai Manhaj al-Fikr. Tahun 1997 diterbitkan sebuah buku saku tulisan sahabat Chatibul Umam Wiranu berjudul Membaca Ulang Aswaja (PB PMII, 1997). Buku tersebut merupakan rangkuman hasil simposium aswaja di Tulungagung. Konsep dasar yang dibawa dalam aswaja sebagai Manhajul Fikr tidak dapat dilepas dari gagasan Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA yang mengundang kontroversi, mengenai perlunya aswaja ditafsir ulang dengan memberikan kebebasan lebih bagi para intelektual dan ulama untuk merujuk langsung kepada ulama dan pemikir utama yang tersebut dalam pengertian aswaja.

Dalam perkembangannya, aswaja sebagai madzhab mengalami kejumudan dan dirasa sulit menjawab kompleksitas problematika masa kini, maka para pemikir kontemporer seperti Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA, melakukan rekonstruksi terhadap rumusan Aswaja yang asalnya hanya dipahami sebagai madzhab (di antaranya rumusan mbah Hasyim) menjadi aswaja sebagai Manhajul Fikri (metodologi berpikir), bukan sebagai mazhab dengan salah satu argumentasinya “tidak mungkin ada madzhab diatas madzhab” (maksudnya tidak mungkin ada madzhab aswaja diatas madzhab fiqh, tauhid dan tasawuf) aswaja adalah berfiqih madzhab yang empat, berakidah Asy’ari-Ma’turidi, tasawuf Ghozali-Junaedi Al Baghdadi.

Secara mantiqi itu bukan definisi, karena syarat ta’rif (definisi) itu harus jami’-mani’ (jelas cakupannya dan jelas batasannya). Kendati demikian definisi di atas itu kondusif untuk zaman mbah Hasyim, namun untuk saat ini perlu dicari formula definisi yang pas dan ilmiah, maka beliau merumuskan definisi aswaja sendiri

.Ahlussunnah wal Jama'ah hiya manhajul fikridini asyamil ala syu'unil hayati wamuqtadoyatiha al-qoim alal asas tawasuth, tawazun, tasamuh wal I-tidah (Aswaja ialah metodologi berpikir keagamaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang berdiri diatas dasar moderat, berimbang, toleran dan proporsional).

Dalam definisi di atas, Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA sebagaimana dipahami oleh PMII menjadikan aswaja sebagai metode berpikir keagamaan yang dibangun di atas dasar tawasuth, tawazun, tasamuh dan i'tidal. Dari definisi ini Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj, MA tidak merumuskan metode berfikir (manhajul fikr) nya, maka dari itu tugas selanjutnya adalah rumusan Manhajul Fikr li Ahl As-Sunnah wal Jama'ah.

#### E. Pengertian Manhajul Fikr li Ahl As-Sunnah wal Jama'ah

Aswaja adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berpegang pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijthad (akal), yang pemikirannya didukung oleh salah satu ihtimal dilalal dalil (data atau ayat) beserta karakter-karakternya, yang memiliki watak (norma-norma) berpikir sesuai keahlian atau profesional yang dikuasainya (al-ahliyah), tidak merasa pemikirannya paling benar sendiri ('adamul ijab bi ro'yi), tidak berkelompok atau bergontok-gontokkan ('adamu al-tasayyu), tidak mengeluarkan seseorang dari jama'ah ('adamu al-ikhroj), tidak mengkafirkan sesama ahli kiblat ('adamu takfir li ahl al-kiblat), serta memiliki kecenderungan (naz'ah) berpikir moderat (tawasut), berkeseimbangan atau ekuilibrium (tawazun), berkeadilan (ta'adul), toleran (tasamuh), selalu membiasakan berjama'ah (mengikuti mayoritas) / mengikuti jalan kaum muslimin (luzumu al-jama'ah / ittiba sabilu al-mu'minin), keahlian (al-ahliyah), mengikuti mayoritas (al-sawadu al-a'dlom), tidak suka membid'ahkan dan seperti tidak berbuat bid'ah; tidak mendustakan (dalam rangka taat) kepada Allah, Rasul serta Ulil Amri dan tidak mengikuti hawa nafsu ('adamu ibtida; adamu al-iftiro ala allah dan Adamu ittibail hawa), memilih sesuatu yang paling bermaslahat (ikhtiar al-ashlah)

#### F. Rumusan Manhajul Fikr li Ahl As-Sunnah wal Jama'ah

Telah masyhur di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jama'ah bahwa hal yang pertama yang wajib bagi seluruh manusia adalah Ma'rifatullah serta memahami dalilnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Ibnu Ruslan dalam nadhom kitab Zubad.

أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْإِنْسَانِ # مَعْرِفَةُ إِلَهِهِ بِاسْتِثْقَانٍ

Untuk bisa ma'rifat (kenal, mengerti, paham) kepada Allah, manusia diberikan madzahir (media Allah untuk menampakan dirinya)<sup>12</sup> Nya kepada manusia berupa ayat-ayat nya (ayatillah). Ayat-ayat Allah tersebut ada yang berupa teks dan disebut dengan ayat qauliyyah, baik yang Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad secara lafadz dan maknanya (Al-Qur'an), ada juga yang hanya maknanya saja sedangkan lafadznya dari Nabi Muhammad SAW (sunnah). Selanjutnya ayat Kauniyyah. yaitu tanda-tanda Allah berupa manusia, alam semesta dan seluruh ciptaan Allah yang lainnya.

Kita meyakini bahwa Allah adalah sumber segalanya (minallah), dan segala aktivitas makhluk itu Bersama Allah (billah), kemudian seluruh realitas dikembalikan kepada Allah (ilallah).

Allah menciptakan tiga hal besar sebagai dalil (tanda) dari keberadaan-Nya (wujud) dan sekaligus sebagai dalil kebenaran. Dalil kebenaran yang Allah ciptakan adalah al-Kitab –bisa juga disebut al-Dien atau al-Qur'an dan al-Sunnah–, manusia yang memiliki fitrah, indra dan akal serta alam yang merupakan hidayah bagi umat manusia. Interaksi antara Allah, Alkitab, manusia dan alam tersebut sering kali terjadi. Namun untuk memahami interaksi antara Allah, Alkitab, manusia dan alam itu membutuhkan seperangkat keilmuan. Salah satu dari interaksi itu menyebabkan proses studi atau proses berpikir Dalam proses berpikir, manusia diperintahkan untuk membaca dan memahami ayat-ayat Allah ini, sebagaimana dalam surat Al-'Alaq ayat 1:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

*”Bacalah dengan nama tuhan mu yang menciptakan”.*

Dalam ayat ini tidak terdapat maf'ul bih (objek yang dibaca) padahal jika maf'ul bih nya di tampilkan, maka Iqro al-Ayat (bacalah ayat-ayat). Ayat-ayat Allah sebagaimana yang diungkapkan di atas ini dalam ilmu penelitian disebut dengan data atau dalil untuk di input. Kemudian Allah SWT, memberikan potensi kepada manusia berupa potensi As-Sam'a dan Al-Abshor serta Al-Af'idah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78:

اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

”dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

”dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”.

Dari ayat ini, kita tahu bahwa Allah memberikan potensi As-Sam'a (pendengaran) dan Al-Abshor (penglihatan) serta indra yang lainnya, berfungsi untuk mengimput dan mengumpulkan data/dalil. Disebut hanya pendengaran dan penglihatan saja dalam ayat ini, namun yang dimaksud adalah seluruh indra. Proses input data atau dalil oleh seluruh indra yang dimiliki oleh manusia ini disebut dengan istidlal.

Setelah data/dalil terkumpul kemudian data tersebut diolah dan di proses oleh alat yang bernama Al-Af'idah (jamak dari lafadz Al-Fuad) atau Al-Qolbu (bentuk jamaknya Al-Qulub). Mengapa Al-Af'idah dipahami sebagai alat untuk memproses data/dalil/informasi? Hal ini senada dengan makna Al-Af'idah secara etimologis yang berasal dari kata fa-a-da (memasak).

Sebagaimana kita ketahui bahwa memasak itu pasti membolak-balik benda yang dimasak, hal ini semakna dengan kata Al-Qolbu (jamaknya adalah kata Al-Qulub)

(bolak-balik). Setelah data di proses (dimasak) dalam Af'idah maka output dari hasil proses tersebut disebutlah dengan ilmu.

Sebagaimana ungkapan di atas, bahwa Al-Af'idah atau Al-Qulub adalah tempat untuk mengolah dalil yang selanjutnya proses pengolahan dalil/data ini disebut dengan istilah An-Nadhor. Adapun kerja Al-Af'idah

adalah melakukan (تقليم) yang secara berarti memotong atau memilah) dalil menjadi beberapa bagian, dalam metode penelitian disebut dengan identifikasi masalah. istilah taqlim ini dalam Al-Qur'an surat Al-'Alaq ayat 4:

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾

*"Allah yang mengajarkan manusia dengan memberikan kemampuan mengidentifikasi"*.

Setelah proses taqlim, kemudian dilanjutkan dengan proses (يعقل) yang secara bahasa berarti mengaitkan hal yang satu dengan yang lainnya). Dalam metode penelitian, setelah identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan merelasikannya dengan yang lain. Setelah itu baru di (يعلم) memberi nama). Setiap proses penelitian yang sudah selesai baru dinamai, itulah yang disebut dengan teori atau ilmu.

Kemudian jika ditinjau dari perspektif metode yang digunakan, maka tergantung data/dalil yang ada. Jika bersumber dari ayat qouliyah maka metodenya menggunakan metode deduktif (istinbath). Adapun jika data/dalilnya berupa ayat kauniyah maka menggunakan metode induktif (istiqro).

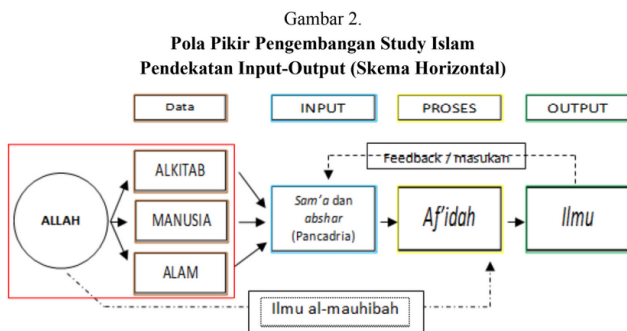
Dalam proses memahami dan mengamalkan ajaran Islam, Aswaja mengkategorisasikan manusia menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama yang paling atas adalah 'alim, kedua yakni muta'alim (yang sedang berproses menjadi 'alim) dan yang ketiga adalah 'Ami (awam). Pada masing-masing tingkatan ini berlaku tuntutan yang berbeda. Pada kategori 'Alim (mujtahid mutlaq), seseorang diharuskan untuk melakukan ijtihad untuk memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Bagi seorang 'alim maka dia diharuskan untuk mengamalkan metode yang disampaikan di atas. Sedangkan pada tingkatan muta'alim dan 'ami, ia harus

bertaqlid atau dalam istilah lain ikhroj dan ittiba kepada mujtahid, entah secara qauli (taqlid kepada pandangan-pandangan parsial dari imam) atau secara manhaji (taqlid kepada model berpikir atau pola pikir imam). Pada titik inilah, kejelasan metode berpikir aswaja bagi para kader pemikir PMII menjadi penting, hal ini terjadi karena tuntutan untuk dapat menjawab berbagai problematika yang terjadi di zamannya.

Selain itu, aswaja juga meyakini bahwa Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang dikehendakinya. Ilmu tersebut jika diberikan kepada Nabi disebut wahyu, dan jika diberikan kepada orang lain bisa disebut dengan ilham, atau ilmu ladunni, atau ilmu mauhibah (Ilmu pemberian). Bahkan Imam Ghazali menyatakan bahwa jalan mencari ilmu adalah cahaya yang diberikan Allah kepada hati siapa saja yang dikehendakinya. Dan cahaya itu merupakan kunci segenap pengetahuan. Ilmu yang dihasilkan juga bisa memberikan feedback atau masukan terhadap As-Sam'a dan Al-Abshor juga kepada Al-Af'idah.

Itulah uraian mengenai metode berpikir yang digunakan oleh aswaja dalam rangka menemukan sebuah ilmu atau teori.

Seperti terlihat pada gambar berikut ini merupakan pola pikir pengembangan studi Islam dengan menggunakan pendekatan input – output.



Selanjutnya, teori atau ilmu tersebut harus berbentuk dan mengkristal menjadi prilaku, maka dalam Al-

Qur'an disebut dengan istilah Syakilah, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلِهِ ۗ... (٨٤)

84. Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut syakilahnya

Dari ayat ini dipahami bahwa seseorang akan berperilaku sesuai dengan syakilahnya. Karena syakilahnya lahir atas dasar proses pencarian ilmu secara benar, maka syakilah tersebut akan melahirkan amal shaleh.

Amal shaleh ini tentunya dibarengi dengan keimanan. karena banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menyertakan istilah amal shaleh dengan istilah iman. Seperti dalam surat Al-Ashr ayat 1-3:

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ،  
وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

1. “Demi masa.” 2. “Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian”,3. “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

Bahkan dalam Al-Qur'an ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat, ayat muhkamat ini adalah ayat amal sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat iman. Dalam arti, bahwa ayat muhkam adalah ayat Al-Qur'an yang menjadi panduan perilaku atau amal shaleh sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat Al-Qur'an yang menjadi panduan beriman. Sebagaimana dinyatakan oleh Ikrimah dan Qotadah serta yang lainnya:

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِكْرَمَةَ وَ قَتَادَةَ وَ غَيْرِهِمَا: أَنَّ الْمُحْكَمَ الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَ الْمُتَشَابِهَ الَّذِي يُؤْمَنُ بِهِ وَ لَا يُعْمَلُ بِهِ

“Berkata dari Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan dari Ikrimah, Qotadah dan lain-lain: bahwa ayat Muhkam adalah ayat yang di amalkan sedangkan Mutasyabih adalah ayat yang di imani bukan yang di amalkan.”

Jika seseorang sudah beriman dan beramal shaleh maka sebagaimana janji Allah dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan surga di akhirat. Hal tersebut termuat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97:

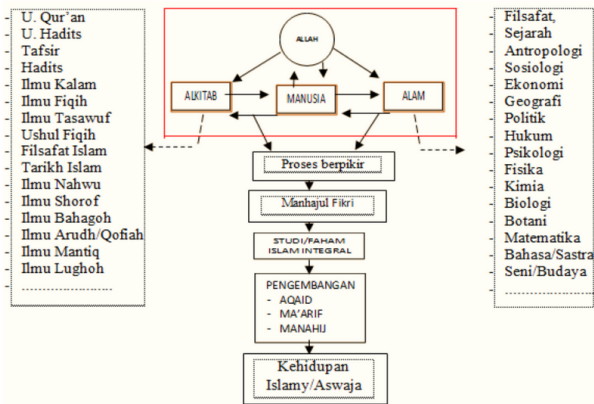
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

97. “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Yang dimaksud dengan hayyatan thoyyibah, mayoritas ahli tafsir mengartikannya dengan kehidupan yang baik di dunia, sedangkan yang dimaksud dengan walanajziyannahum ajrohum adalah kehidupan yang baik di akhirat berupa surga nya Allah SWT.

Untuk lebih jelas mengenai skema Manhajul Fikr li Ahl As-Sunnah wal Jama'ah perhatikan bagan berikut ini:

Gambar 3  
Pola Pikir Pengembangan Studi Islam Versi Aswaja



Allah SWT menggambarkan betapa luasnya objek pemikiran (kalimat Allah dalam bentuk Al-Kitab, manusia dan alam) yang kemudian bisa melahirkan

beberapa produk pemikiran/ilmu seperti filsafat, sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, geografi dsb dan itupun bahkan belum seluruhnya terungkap, sehingga Allah mengilustrasikan bila air laut dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena untuk menuliskannya, meski dilipatgandakan sekalipun dengan jumlah yang sama bahkan lebih, tidak akan bisa seluruhnya tertulis. Dan begitupun dengan produk pemikiran yang saat ini menjadi masukan bagi proses berpikir umat Islam pun belum mewakili kitab, manusia dan alam yang Allah SWT gambarkan tersebut, bahkan masih teramat jauh untuk mewakilinya.

Selanjutnya dalam rangka berpikir di kalangan aswaja tidak boleh terlepas dari norma-norma berpikir, yang mana norma berfikir tersebut menjadi koridor aswaja.

Norma-norma tersebut adalah:

- Dalam kerangka taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri
- Keahlian atau profesional (al-ahliyah)
- Kecenderungan (Naz'ah) berfikirnya moderat (tawassut), berkeseimbangan (tawazun), berkeadilan (ta'adul) dan toleran (tasammuh).
- Tidak mengikuti bid'ah ('adamul ibtida) terbagi: ('adamu al-iftiro ala allah), tidak mengikuti hawa nafsu ('adamu ittibaul hawa)
- Tidak mengeluarkan orang lain dari jama'ah ('adamu al-ikhroj), Mempertahankan jama'ah atau persatuan (luzumul jama'ah), mengikuti jalan kaum mu'minin (sabilu al-mu'minin), Mengikuti mayoritas (ittiba al-sawadul a'dlom).
- Tidak merasa pemikirannya benar sendiri ('adamu al-ujub bi al-ro'yi)
- Tidak mengkafirkan sesama ahli kiblat ('adamul takfir li ahl al-qiblat)
- Tidak berkomplot atau bergontok-gontokkan ('adamu at-tasayyu)
- Memilih yang paling bermaslahat (ikhtiyar al-aslah)

G.Prinsip-Prinsip Ahlussunnah wal Jama'ah

Berikut ini adalah prinsip-prinsip aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi bidang keilmuan, aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak dan bidang sosial-politik.

## 1. Bidang Keilmuan

Pada dasarnya sumber ilmu pengetahuan itu adalah ayat qouliyah dan ayat kauniyah. Dalam bidang keilmuan yang menjadi epistemologi ilmu dalam Aswaja sandarannya adalah Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78 dan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36, dari ayat-ayat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa manusia itu memiliki dua potensi. Pertama, potensi alat pencari data/dalil, yaitu al-Sam'a dan al-Abshor. Kedua, potensi alat pengolah data/dalil yaitu al-Af'idah. Dengan dua potensi yang dimiliki itu, memungkinkan manusia untuk melakukan penggalian ilmu secara lebih mendalam. Prinsip aswaja dalam bidang keilmuan ini sangat penting dan harus lebih dahulu dari prinsip lainnya, sebagaimana ijma' (konsensus) ulama aswaja karangan al-Baghdadi, terlebih di Aswaja ada doktrin tentang iman, dimana iman itu ada iman 'ala ilmin (iman atas dasar ilmu) dan iman 'ala taqlidin (iman atas dasar taqlid). Sebab keilmuan ini akan menopang seluruh aspek terutama berkaitan dengan kualitas hidup dan kehidupan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

*"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan,".*

## 2. Bidang Akidah

Dalam bidang aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah diantaranya yang pertama adalah aqidah 'uluhiyyah (ketuhanan), berkaitan dengan ihwal eksistensi Allah SWT. Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai eksistensi sifat dan asma Allah SWT, di mana

terjadi diskursus terkait masalah apakah asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan al-Asy'ari (w. 324 H) secara filosofis berpendapat bahwa nama (ism) bukanlah yang dinamai (musamma). Sifat bukanlah yang disifati (mausuf), sifat bukanlah dzat. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (asma)-Nya. tetapi nama-nama itu bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya.

Aswaja menekankan bahwa pilar utama keimanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap muslim bahwa Allah-lah yang menciptakan, memelihara dan mematikan kehidupan semesta alam. Ia esa, tidak terbilang dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang kedua adalah nubuwat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rasul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan umat manusia dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridloi oleh Allah SWT. Dalam doktrin nubuwat ini, umat manusia harus meyakini dengan sepenuhnya bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, yang membawa risalah (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah Rasul terakhir, yang harus diikuti oleh setiap manusia.

Pilar yang ketiga adalah al-Ma'ad, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapat imbalan sesuai amal dan perbuatannya (yaumul jazaa). Dan mereka semua akan dihitung (hisab) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

Pilar yang keempat adalah amal shaleh. Aswaja menekan pada perealisasiian terhadap pemahaman Uluhiyah, Nubuwat dan Al-Ma'ad dalam kehidupan sehari-hari kader, sehingga amal shaleh yang dilakukan kader PMII merupakan manifestasi dari penghayatannya terhadap konsep Uluhiyah, Nubuwat dan Al-Ma'ad tersebut. Adapun implementasi aspek akidah dalam kehidupan ini diantaranya senantiasa harus mempunyai keseimbangan dalam penggunaan dalil

'aqli dan dalil naqli memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam dan tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir.

### 3. Bidang Sosial-Politik

Islam tidak memiliki patokan yang baku tentang sebuah konsep negara. Dalam tindakan politik, aswaja lebih menekankan pada hukum Islam yang sangat penting tentang tata hubungan antara penguasa dan rakyatnya. Sebagaimana dalam kaidahnya:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan ummat"*.

Kewajiban pemerintah untuk memperhatikan kemaslahatan dalam mengatur urusan rakyatnya terkait erat dengan ajaran islam tentang kedudukan pemerintah dihadapan rakyatnya. As-Syafii menegaskan

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

*"Kedudukan pemerintah bagi rakyatnya adalah seperti kedudukan wali bagi anak-anak yatim"*). Kekuasaan politik pemerintahan harus dipandang sebagai amanah, ijarah dan wakalah".

Oleh sebab itu Islam juga menganjurkan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. Al-Imam Abu Yusuf, misalnya menulis dalam Al-Kharaj:

وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا بِحَقِّ تَابِتٍ مَعْرُوفٍ

*"bahwa tidak ada hak bagi pemerintah untuk mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang kecuali berdasarkan hak yang telah tetap ma'ruf."*

Bagi aswaja, negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan bersama (mashlahah al-Musyarakah).

Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi (kerajaan) atau negara modern/demokrasi, asal mampu memenuhi prinsip-prinsipnya. Apabila prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Adapun prinsip tersebut adalah :

a. Prinsip Syuro (Musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan, kebijakan dan peraturan demi terwujudnya kemaslahatan umat (rakyat). Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syuro ayat 36-39:

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩)

36. “Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal”. 37. “dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf”. 38. “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. 39. “dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri”.

Menurut ayat di atas, Syura merupakan ajaran yang setara dengan iman kepada Allah (iman billah), tawakal, menghindari dosa-dosa besar (ijtinabul kaba'ir),

memberi maaf setelah marah, memenuhi titah ilahi, mendirikan shalat, memberikan sedekah, dan lain sebagainya. Seakan-akan musyawarah merupakan suatu bagian integral dari hakikat Iman dan Islam.

Di dalam ayat lain juga menjelaskan untuk melakukan musyawarah sebagaimana pada QS. Ali Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... (١٥٩)

159. “dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan”

Dalam urusan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan umum, yakni yang berkaitan dengan pengaturan umat, baik dalam situasi perang maupun dalam situasi damai dan dalam dunia umat manusia. Pendapat ini sesuai dengan para ulama seperti Ibnu Taimiyah yaitu: “Tidak boleh bagi penguasa untuk mengesampingkan musyawarah, karena Allah SWT telah memerintahkan Nabinya untuk itu (Musyawarah)”. Bahkan mufassir Andalusia Ibnu ‘Athiyah dengan tegas juga menyatakan sebagai berikut: “Syura termasuk kaidah syariat dan hukum yang pokok. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, maka wajib dimakzulkan. Ini merupakan hal yang tidak diperselisihkan lagi”.

Syura hanyalah salah satu elemen dari demokrasi. Ia merupakan sekadar cara pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap kompeten. Agar pengambilan keputusan seperti yang diharapkan dapat mewakili kepentingan umat, maka diperlukan elemen- elemen lain dari demokrasi sebagai pelengkapannya. Karena tanpa elemen-elemen itu, prinsip Syura bisa menjelma menjadi sekadar ritus politik yang sangat simbolik, sehingga demokrasi yang dihasilkan sekadar berupa demokrasi yang “seolah-olah” demokrasi (formalistik). Elemen-elemen demokrasi yang lainnya antara lain: prinsip keadilan, kesetaraan dan kebebasan.

b. Prinsip Al-Adl (Keadilan)



### c. Prinsip Al-Huriyyah (Kemerdekaan)

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat alami setiap manusia. Kebebasan dalam arti bebas dari dan bebas untuk. Dengan kebebasan dimungkinkan bagi setiap orang untuk berani mengekspresikan segala kebenaran yang diyakininya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara-cara yang berakhlakul karimah dalam rangka “al’amru bi al-ma’ruf wa an-nahy an al-munkar”. Maka tidak ada alasan agama yang bisa membenarkan penguasa untuk membungkamnya.

Kebebasan dimaksudkan sebagai suatu jaminan bagi rakyat (umat) agar dapat melakukan hak-hak mereka, dalam hal ini juga berarti bebas dari fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menghalang-halangi dalam mencari kebenaran. Hak-hak tersebut dalam syariat dikemas dalam Maqasid as-Syar’iyyah (maksud-maksud syariat) yang menjadi kebutuhan primer (dharuri) bagi setiap insan. Prinsip-prinsip tersebut adalah termasuk mendapatkan hak-hak atas Maqasid al-Syar’i (arkanul al-hayat) antara lain:

Prinsip kebebasan manusia dalam Syariat, yaitu:

- Hifzhu al-Nafs (menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang dalam wilayahnya.
- Hifzhu al-Din (menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Negara tidak berhak memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga Negara.
- Hifdzul ‘aqli (menjaga akal); adalah kewajiban setiap pemimpin untuk menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat agar setiap warga negara bisa mengembangkan kreativitas keilmuan

- Hifzhu al-Mal (menjaga harta benda); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.

- Hifzhu al-Nasl; bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mengunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. Hifzhu al-Nasl berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.

- Hifzhu al-'Irdh; jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

Maqasid as-Syar'iyah identik dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih dikenal dalam dunia modern. Pokok atau prinsip-prinsip di atas menjadi ukuran baku bagi legitimasi sebuah pemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kemudian hari.

#### d. Prinsip Al-Huriyyah (Kemerdekaan)

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan manusia lain, bangsa dengan bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Demikian disebutkan dalam surat Al-Ma’idah ayat 48:

فَاخْتُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فَاسْتَتَبِقُوا الْخَيْرُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٧)

48. “dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

Dalam sebuah negara kedudukan warga negara adalah sama. Semua warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama, dan haruslah mendapat perlakuan yang sama pula. Sistem kasta atau pemihakkan terhadap golongan, ras, jenis kelamin atau pemeluk agama tertentu tidaklah dibenarkan.

Orang-orang yang menjabat di tubuh pemerintahan memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mereka memiliki jabatan semata-mata adalah untuk

mengayomi, melayani dan menjamin kemashlahatan bersama, dan tidak ada privilege (keistimewaan) khususnya di mata hukum. Negara justru harus mampu mewujudkan kesetaraan derajat antar manusia di dalam wilayahnya, yang biasanya terlanggar oleh perbedaan status sosial, kelas ekonomi dan jabatan politik.

Dari beberapa syarat tersebut, tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa sebenarnya system pemerintahan yang mendekati kriteria di atas adalah sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah sistem pemerintahan yang bertumpu kepada kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat (civil society) sebagai amanat dari Allah.

Harus kita akui, bahwa istilah “demokrasi” tidak pernah dijumpai dalam bahasa Al-Qur’an maupun wacana hukum Islam klasik. Istilah tersebut diadopsi dari para negarawan di Eropa. Namun, harus diakui bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya banyak menyerupai prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam berbangsa dan bernegara menurut aswaja.

Di era globalisasi dimana kondisi percaturan politik dan kehidupan umat manusia banyak mengalami perubahan yang mendasar, misalnya kalau dulu dikenal komunitas kabilah, saat ini sudah tidak dikenal lagi, bahkan kondisi umat manusia sudah menjadi “perkampungan dunia”, maka demokrasi harus dapat ditegakkan.

Pada masa lalu banyak ditemui ghanimah (harta rampasan perang) sebagai suatu perekonomian negara. Sedangkan pada saat ini sistem perekonomian tersebut sudah tidak dikenal lagi.

Perekonomian negara banyak diambil dari pajak dan pungutan lainnya. Begitu pula jika pada tempo dulu akidah merupakan sentral kekuatan pemikiran, maka saat ini akidah bukanlah merupakan satu- satunya sumber pijakan. Umat sudah banyak berubah kepada pemahaman akidah yang bersifat plural.

Dengan demikian, pemekaran pemikiran umat Islam haruslah tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang remeh dan enteng, jika umat Islam tidak ingin tertinggal oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini.

Tentu hal ini mengundang konsekuensi yang mendasar bagi umat Islam, sebab pemekaran tersebut pasti banyak mengubah wacana pemikiran yang sudah ada (salaf/klasik) dan umat Islam harus secara dewasa menerima transformasi tersebut sepanjang tidak bertabrakan dengan hal-hal yang sudah paten (qath'iy). Sebagai contoh, dalam kehidupan bernegara (baca: demokrasi), umat Islam harus dapat menerima seorang pemimpin (presiden) dari kalangan non-muslim atau wanita. Prinsip kesetaraan harus menjadi landasan bergerak, karena pada dasarnya manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan Tuhan kecuali masalah kualitas ketaqwaannya. (QS. Al- Hujurat, 49:13).

Oleh karena itu kesetaraan yang harus jadi acuan gerak agar semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama/ setara. Sebab semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Kesetaraan ini harus mewujud dalam bentuk setiap warga mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak dari negara, kesetaraan dalam bidang pendidikan, kesetaraan dimuka hukum dan kesetaraan diwilayah gender serta kesetaraan dalam mendapatkan hak-hak politik. Sehingga tidak benar adanya penindasan yang dilakukan oleh satu manusia atau sebuah bangsa terhadap manusia serta bangsa lainnya dan jangan sampai ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

## **NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP)**

### **A. Pendahuluan**

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi yang secara terang-terangan menyatakan diri berhaluan Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah, hal itu sebagaimana dalam Muqadimah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII, bahwa "PMII Berhaluan Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah".

Di PMII sendiri penyebutan Ahlusunnah Wal Jama'ah lebih sering dikenal dengan ASWAJA, kemudian pemahaman ASWAJA di PMII dalam kerangka dasarnya merupakan sebuah kelompok yang bermadzhab Aqidah pada Imam Abu Hasan Al-

Asyari dan Imam Abu Manshur Al-mathuridi, kemudian bermadzhab Fiqih pada Madzahibul Arba'ah (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali), serta bermadzhab Tasawwuf kepada Imam Al-Ghazaly dan Imam Junaidi Al-Baghdadi.

Pemahaman dan keyakinan PMII terhadap haluannya pun tergambar dalam konsep rumusan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII yakni Tauhid, Habluminallah (hubungan manusia dengan Allah), Hablu minan-nas (hubungan manusia dengan manusia), dan Hablu minal alam (manusia dengan alam). Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara keduanya, yakni Ahlusunnah Wal Jama'ah merupakan haluan PMII, sedangkan NDP merupakan penjabaran ASWAJA itu sendiri, sehingga NDP harus senantiasa menjadi kerangka seluruh aturan organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi, serta menjadi konsep dasar setiap kegiatan organisasi. Rumusan mengenai NDP ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti dan motivasi gerakan sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas apa yang harus dilakukan PMII, dalam rangka mencapai cita-cita perjuangannya, sesuai dengan maksud didirikannya organisasi PMII. NDP adalah tali pengikat (kalimatun sawa') yang mempertemukan warga pergerakan dalam satu cita-cita perjuangan sesuai tujuan organisasi.

NDP menjadi sandaran organisasi dalam menegakkan Tauhid dalam kehidupan sehari-hari, sebagai panduan nilai dalam berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan alam. Oleh sebab itu seluruh warga PMII harus memahami dan menginternalisasikan NDP baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Maka sesungguhnya dalam setiap gerakan dan kaderisasi PMII, ASWAJA haruslah menjadi pondasi utama serta NDP menjadi kerangka dasar. Terutama ASJAWA dan NDP harus menjadi bagian pokok dalam setiap jenjang kaderisasi baik itu MAPABA, PKD Maupun PKL.

## B. Arti

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII adalah pokok-pokok ajaran yang diambil dari nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang dijadikan sebagai landasan berfikir, bergerak dan sumber motivasi bagi warga pergerakan (Kader PMII) dalam melakukan perubahan. NDP ini sebagai Kalimatun Sawa (Tali pengikat) antara sesama kader PMII serta PMII dengan lingkungannya. NDP PMII merupakan rumusan nilai-nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah serta kenyataan masyarakat dan negeri Indonesia.

NDP harus senantiasa menjiwai seluruhnya aturan organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi, serta menjadi penggerak setiap kegiatan organisasi dan kegiatan masing-masing anggota. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam harus dihayati dan diamalkan secara kaffah atau menyeluruh oleh seluruh anggota dengan mencapai dan mengamalkan iman (aspek aqidah), islam (aspek syariah) dan ihsan (aspek etika, akhlak dan tasawuf) untuk memohon Ridho-Nya serta memohon keselamatan hidup di dunia dan akhirat (sa'adatu ad-darain).

### C. Fungsi dan Kedudukan

Fungsi adalah Upaya memanfaatkan segala sesuatu untuk mewujudkan harapan yang sebelumnya menjadi kenyataan. Jika melihat pengertian tentang fungsi secara umum, maka fungsi Nilai Dasar Pergerakan (NDP) bagi PMII sendiri adalah sebagai satu pendorong semangat dan optimisme kader dalam mengawal dan mengamalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kemanusiaan sebagai sebuah amanah yang perlu untuk disampaikan kepada orang lain. Sehingga dengan fungsi NDP tersebut warga pergerakan tidak akan keliru etika menentukan satu kebijakan maupun keputusan. Dalam mengamalkan fungsi NDP, semua warga pergerakan dituntut untuk selalu tetap menggunakan haluan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

Adapun fungsi NDP lebih rinci antara lain, yaitu:

1. Sebagai kerangka refleksi, NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi, gerakan dan tindakan organisasi dihadapkan untuk berdialog

dengan rumusan-rumusan NDP. Dialog ini sejatinya harus berlangsung terus menerus, sehingga butiran-butiran NDP menjadi hidup dan menjiwai setiap gerakan dan kegiatan organisasi. Tentu menjadi kewajiban setiap anggota untuk senantiasa melakukan perenungan dan refleksi mengenai setiap tindakan dan kegiatannya tetap senantiasa mendekati nilai dasar.

2. Sebagai kerangka aksi, NDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota. Sebagai kerangka aksi, etos akan muncul dari proses aksirefeksi yang dilakukan secara terus menerus. Tahap memahami NDP harus segera diikuti dengan ikhtiar untuk mewujudkan nilai itu dalam gerak dan tindakan, kemudian setelah bergerak dan bertindak harus pula segera ditinjau apakah tindakan dan gerakan itu telah memenuhi atau mendekati nilai dasar.

3. Sebagai Kerangka Ideologis:

a. Menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.

b. Menjadi landasan berpikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing anggota.

Adapun Kedudukan NDP :

1. NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi.

2. NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi.

3. NDP menjadi pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berfikir, berbicara dan bertindak setiap anggota.

Kedudukan NDP bila dilihat dari perspektif lain adalah ruang filterisasi (penyaring) terhadap segala aktivitas-aktivitas warga pergerakan untuk dijadikan bahan refleksi dalam menata pergerakan ke depan yang lebih baik, sehingga mampu menjadikan seluruh warga pergerakan mencapai identitasnya sebagai kader ulul albab. Yaitu sebagaimana tujuan PMII dalam AD PMII Bab IV pasal 4, dan mampu menjadi kader yang berfikir kritis, bersikap dialektis dan bertindak

transformatif. Serta kedudukan NDP adalah sebagai ruang pengukur terakhir dalam pembenaran gerakan PMII.

#### D. Rumusan NDP

##### 1. Tauhid

التَّوْحِيدُ لِعَمَّةٍ : الْعِلْمُ بِأَنَّ الشَّيْءَ وَاحِدٌ وَشَرَعًا بِمَعْنَى الْمَدُونِ فِيمَا سَيَأْتِي وَهُوَ الْعِلْمُ بِقُدْرَةِ بِهِ عَلَى اثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ مُكْتَسَبٌ مِنْ أُدْلِيَّتِهَا الْبَيِّنِيَّةِ التَّوْحِيدُ هُوَ إِفْرَادُ الْمَعْبُودِ بِالْعِبَادَةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ وَحَدِيثِهِ وَالتَّصَدِيقِ بِهَا ذَاتًا وَصِفَاتًا وَأَفْعَالًا (تحفة المريد ص 8)

“Secara bahasa ilmu tauhid adalah meyakini bahwa sesuatu itu satu, sedangkan dalam perspektif syara’ Tauhid adalah sebuah ilmu yang mampu mengukuhkan aqidah keagamaan yang di ambil dari dalil-dalil yaqiniyyah, Sedangkan bertauhid adalah beribadah hanya kepada Allah serta meyakini dan menetapkan ke esaannya baik secara dzat, sifat dan af’al.”

Adapun definisi tauhid menurut Ahlusunnah wal Jama’ah adalah:

وَأَمَّا التَّوْحِيدُ فَقَدْ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمِيعُ الصَّحَابَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي دَاتِهِ لَا قَسِيمَ لَهُ وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ الْأَزَلِيَّةِ لَا تَظْيِيرَ لَهُ وَوَاحِدٌ فِي أَعْمَالِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ (الملل والنحل ص 30)

“Ahlusunnah wal Jama’ah dan seluruh kelompok sifatiiyyah (yang meyakini Allah memiliki sifat) bahwa Allah ta’ala adalah esa secara dzat yang berarti tidak terbagi. Serta esa dalam sifat-sifatnya yang berarti tidak ada di luar Allah yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah, Serta esa dalam perbuatannya yang berarti tidak ada yang memiliki perbuatan seperti perbuatannya Allah.”

Dalam upaya aktualisasi nilai tauhid, maka setiap kader PMII harus memahami hukum. Hukum adalah keterelasian antara satu entitas dengan entitas lain, seperti keterelasian antara manusia dengan Allah. Kemudian Hukum terbagi 3, yakni Syar’i, ‘Adiy dan Aqliy:

الحكم هو اثبات أمر أو نفيه فاحكامك بذلك اما الرشح او العادة او العقل فلهذا انقسم احكامك على اهل ثلاثة أقسام رشي وعادي وعقيل . فالرشي هو خطاب هلا تعال امتعلق بأفعال املاكني اطلب او الابهة او الوضع . واما احكامك العادي حقيقته اثبات الربط بني أمر وأمر وجودا أو عدمها بواسطة تكرار

القران بيهناملعل احلس . وأ ما احلمك العقيل فهو عبارة عام يدرك العقل ثبوته أ و نفيه من غري توقف  
عل تكرر ول وضع واضع

Hukum adalah menetapkan sesuatu atau menafikannya. Sedangkan yang menghukuminya ada syara' ada adat dan ada akal. Oleh karena itu maka hukum terbagi 3 yakni hukum syara', hukum adat dan hukum akal.

Hukum syara' adalah seperangkat ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa materil maupun formil.

Adapun hukum adat (hukum rasional) adalah menetapkan satu relasi satu hal dengan hal lain karena terjadi berulang<sup>2</sup> baik dalam ada nya maupun tiadanya. Sedangkan hukum akal (hukum logis) adalah sebuah gambaran yang diterima oleh akal baik tetap maupun tidak nya sesuatu hal tanpa mempertimbangan terjadi berulang<sup>2</sup> atau tanpa mempertimbangkan ada yang membuatnya.

## 2. Hablun Minallah

Sebelum lebih jauh membicarakan bagaimana Konsepsi Hablun Minallah, perlu kembali terlebih dahulu ditekankan mengenai substansi dari keterelasian Antar NDP dan Ahlussunnah wal Jama'ah. Hablu Minallah berarti berhubungan dengan Allah, maka dalam konsepsi study Islam, hal ini sudah di atur melalui perangkat Ilmu Fiqih, terkhusus Fikih Ubudiyah, namun bukan berarti mendikotomikan antara tiga sirkel dunia yakni Allah, Manusia dan alam, hanya saja dalam ranah pengkajian agar lebih mudah maka perlu kiranya memberikan pembatasan kajian itu sendiri, terutama dalam membekali anggota yang baru mengenal PMII.

### a. Fikih Ubudiyah

Hablun minallah yang merupakan salah satu rumusan NDP PMII, dalam keterelasiannya dengan Ahlussunnah wal Jama'ah tergambar dalam Fikih Ubudiyah. Maka sudah semestinya pengambilan definisi Fiqih haruslah dari salah satu Madzahibul Arba'ah yang sesuai dengan konsep Ahlussunnah Wal jama'ah, sehingga dalam konteks doktrinasi, harus diberikan pemahaman sesuai dengan madzhab yang digunakan di masingmasing Cabang PMII, seperti pemahaman

fikih yang diambil dari Imam syafi'i, meskipun Imam Syafi'i tidak mendefinisikan fikih secara eksplisit.

Namun kelompok syafi'iah memaknai fikih sebagai seperangkat ilmu tentang hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan dalil-dalil terperinci, sehingga konsepsi ubudiyah PMII harus sesuai dengan dalil-dalil tersebut.

#### b. Tokoh fikih

Dalam Qonun Asasi NU, menyatakan bahwa ASAWAJA dalam beraqidah mengikuti Al-Asy'ari dan Al-Ma'turidi, dalam berfiqih mengikuti Madzahibul Arba'ah yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dalam bertasawuf mengikuti Imam Junaedi Al-Bagdadi dan Imam Al- Ghozaly. Pernyataan Hadhrotussyaikh Hasyim Asy'ari diatas sejalan dengan pernyataan ulama- ulama Mutaakhirin (yakni ulama yang hidup sesudah tahun lima ratus Hijriyyah). Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa pilihan jatuh kepada Tokoh-tokoh di atas, dalam arti apa alasan ulama ASWAJA menetapkan pilihan pada rentetan ulama diatas.

Selanjutnya mengenai pilihan berfiqih kepada madzhab yang empat (madzahibul arba'ah) yakni:

- 1) Imam Syafi'i,
- 2) Imam Hanafi
- 3) Imam Maliki
- 4) Imam Hambali

Padahal apabila ditelaah dalam bentangan sejarah peradaban islam, sangat memungkinkan munculnya banyak ulama Fiqih, setidaknya pernah lahir sekitar 11 ulama pembangun madzhab Fiqih sebagaimana pendapat Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf pengarang kitab Fawaidul Makiyyah, Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf menerangkan alasan mengenai madzhab yang empat menjadi pegangan, yakni karena madzhab-madzhab selain yang empat tidak terjaga dari penyelewengan-penyelewengan, berbeda dengan madzhab yang empat.

Selanjutnya Habib Alawi memberikan contoh madzhab Zaidiyyah yang dibangun oleh Imam Zaid bin Ali, beliau adalah seorang Imam yang hebat dan ilmunya dapat dipercaya namun para pengikutnya tidak mengerahkan kemampuan untuk menjaga madzhab itu sehingga madzhab Zaidiyyah terindikasi penyimpangan-penyimpangan. Selain itu juga banyak pendapat para pembangun madzhab tidak terbukukan oleh murid-muridnya dan alasan yang lain karena tidak ada pengikut.

Selain itu juga, menurut pandangan KH Hamdun Ahmad ada tiga alasan kuat yang membuat Ahlussunnah Wal Jama'ah memilih tokoh-tokoh fikih di atas yakni Pertama ajaran dan prodaknya masih terjaga, Kedua banyaknya jumlah pengikut serta ketiga lolos dari seleksi sejarah yang juga ditopang oleh pemerintahan yang berkuasa pada masanya, sebagai contoh madzhab Maliki dipakai oleh penguasa Hijaz, madzhab Hanafi dipakai oleh dinasti Abasiyyah pada masa Harun Ar-Rasyid, bahkan dua murid Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad As-Syaibani menjadi Qodhil Qudhat (Hakim Agung) pada masa Harun Ar-Rasyid, madzhab Hanbali juga dipakai oleh penguasa dinasti Bani Abasiyyah pada waktu khalifah AlMutawakkil Allawloh berkuasa, sedangkan madzhab Syafi'i dipakai oleh penguasa mesir pasca Syiah yakni dinasti Ayubiyah dengan sultannya Solahuddin Al-Ayubi. Jadi, taqlid kepada yang empat itu dimulai oleh pemerintah.

### c. Definisi Fikih

Definisi Fiqih sejauh ini belum ditemukan dalam karya yang langsung disampaikan oleh Imam Syafi'i: seperti Ar-Risalah, Al-Umm, Mukhtasor AlMuzani, Mukhtasor Al-Buwaithi. Begitupun dalam Manaqibu Syafi'i karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Muqoddimah Ibnu Kholdun, serta beberapa kitab fiqih madzhab syafi'i.

Namun untuk sementara ini dicantumkan definisi fiqih menurut salah satu ashab syafi'i, yakni Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami'

وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ . (روضة الطالبين ، ج 1 ، ص 43)

"Fiqih adalah ilmu tentang hukum yang bersifat perilaku yang diambil dari dalil-dalil spesifik."

### 3. Hablun Minanas dan Hablun Minal Alam

#### a. Pembatasan Hablun Minannas dan Hablun Minal Alam

Sesungguhnya Hablun Minanaas serta Hablun Minal Alam merupakan satu kesatuan, namun apabila diberikan batasan, maka fokus dari Hablun Minannas merupakan (Fikih Muamalah) sedangkan Hablun Minal Alam merupakan (Fikih Muamalah dan Tasawwuf), terlepas dari pembatasan dalam rangka mempermudah fokus kajian, dalam dosis untuk kaderisasi maka konsep Hablun Minanas dan Hablun Minal. Alam ini merupakan kesatuan konsepsi sikap. Dalam Fikih Muamalah harus diiringi dengan tasawwuf seperti pendapat imam Al-Ghozaly, tentang ilmu, yakni Hakullah, Hakul Ibad yang terbagi pada dua konsep dasar yakni Muaqodah dan Muamalah serta Hakunnafsi yang berbicara tentang jiwa, dalam konsep Tasawuf sendiri Imam Al-Ghozaly mendefinisikan Tasawwuf adalah istiqomah terhadap Allah dan diam bersama Manusia (Hablunminallah dan Hablunminal Minannas dan Hablun Minal Alam) jika kita telaah lebih dalam, pendefinisian tasawuf Imam Al-Ghozaly ini substansinya sama dengan konsep NDP PMII Namun dalam pandangan imam Junaidi Al-Baghdadi berbicara Tasawwuf itu sendiri lebih mendalam dimana “Manusia dimatikan jika dihadapan kebenaran, dan Manusia menghidupkan kebenaran itu” ada juga pendapat Imam Junaidi bahwa manusia hidup bersama Allah tanpa adanya penyambung.

#### b. Konsepsi tasawwuf Imam Al-Ghozaly

Konsep Tasawuf Imam Al-Ghozaly mengenai Hakullah (Hablunminallah), Hakul Ibad (Muamalah & Muaqodah) Hakul Nafsi (hak jiwa) dimana hak Manusia dengan Alam atau relasi subjek dengan realitas berada pada diri Manusia itu sendiri. Maka jika pengamalan NDP PMII kita sandingkan dengan konsep Imam Al-Ghozaly, secara tidak langsung pengamalan NDP merupakan konsep pengamalan bertasawuf ala PMII, lebih jelasnya dapat dilihat dalam keterangan berikut:

النُّوعُ الثَّانِي مِنَ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ هُوَ عِلْمُ الْفُرُوعِ . (أُولَاهَا) حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ أَرْكَانُ الْعِبَادَاتِ مِثْلَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ . (وِثَانِيهَا) حَقُّ الْعِبَادِ وَهُوَ أُثُوبُ الْعِبَادَاتِ. وَيَجْرِي فِي وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا الْمُعَامَلَةُ مِثْلَ الْبَيْعِ

وَالشَّرَكَةُ وَالهِبَةُ وَالْقَرْضُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي الْمُعَاقَدَةُ مِثْلُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِثْقِ ... ( وَثَالِثُهَا ) حَقُّ النَّفْسِ وَهُوَ عِلْمُ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَخْلَاقُ إِمَّا مَذْمُومَةٌ . (رسالة اللدونييه ص 19-20)

“Bagian kedua dari ilmu syara adalah ilmu cabang,

- Yang pertama yang berkaitan dengan Allah, yakni rukun-rukun ibadah seperti shalat dan zakat.
- Yang kedua adalah hak-hak hamba-hamba Allah, yakni bab-bab tentang ibadah dan berjalan di dalam dua bentuk: Pertama adalah muamalah seperti jual beli, usaha kerjasama, hibah dan pinjam-meminjam, Kedua adalah akad-akad seperti nikah, talak dan memerdekakan hamba sahaya.
- Yang ketiga Haqqun Nafsi adalah ilmu akhlak dan akhlak itu ada akhlak yang tercela.”

Kemudian Imam Ghazali memberikan definisi operasional tentang tasawwuf:

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ النَّصُوفَ لَهُ خَصْلَتَانِ الْإِسْتِقَامَةُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَالسُّكُونُ عَنِ الْخَلْقِ فَمَنْ اسْتَقَامَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحْسَنَ خُلُقَهُ بِالنَّاسِ وَعَامَلَهُمْ بِالْجَلْمِ فَهُوَ صُوفِي (أيها الولد ص 15)

“Ketahuilah bahwa Tasawwuf itu memiliki dua dimensi, pertama istiqomah bersama Allah dan kedua tentram bersama manusia, barang siapa yang beristiqomah Allah Azza Wajalla dan akhlaknya baik bersama manusia dan bergaul bersama manusia dengan kasih sayang maka itu disebut dengan sufi.”

Dari definisi di atas sehingga oleh Imam Ghazali disimpulkan bahwa aspek aksiologis dari tasawwuf ialah:

وَكَانَ حَاصِلُ عُلُومِهِمْ قَطَعَ عَقَبَاتِ النَّفْسِ وَالتَّنَزَّرَهُ عَنِ اخْلَاقِهَا الْمَذْمُومَةِ وَصِفَاتِهَا الْخَبِيثَةِ حَتَّى يَتَّوَصَلَ بِهَا إِلَى تَخْلِيَةِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْلِيَّتِهِ بِذِكْرِ اللَّهِ . (المنقذ من الضلال ص 48)

“Kesimpulan ilmu tasawwuf adalah memutus ambisi jiwa dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat yang tidak terpuji, sehingga melahirkan keadaan hati yang bersih dari selain Allah dan keadaan hati diperindah dengan dzikir kepada Allah.”

c. Tashawuf Imam Junaidi Al-Baghdadi

Dalam pandangan Imam Junaidi Al-Baghdadi berbicara Tasawwuf itu sendiri lebih mendalam dimana “Manusia dimatikan jika dihadapan kebenaran, dan Manusia menghidupkan kebenaran itu” ada juga pendapat Imam Junaidi bahwa Manusia hidup bersama Allah tanpa adanya penyambung. Seperti keterangan dibawah ini:

Kemudian Imam Junaidi mendefinisikan tasawuf:

النَّصُوفُ ذِكْرٌ مَعَ اجْتِمَاعٍ وَوَجْدٌ مَعَا سِتْمَاعٍ وَعَمَلٌ مَعَ اتِّبَاعٍ . (رسالة القشيرية 281)

“Tasawwuf adalah dzikir bersama-sama, ingat Allah bersama-sama, menemukan kebenaran kebenaran dengan cara mendengarkan ayat-ayat Allah dan beramal dengan cara mengikuti praktik nabi dan Sahabat.”

Penutup

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII yang merupakan rumusan nilai-nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, serta kenyataan masyarakat dan negeri Indonesia. NDP menghendaki PMII sebagai salah satu lokomotif gerakan mahasiswa di Indonesia untuk senantiasa memiliki titik pemberangkatan dan titik tujuan yang utuh, sebagaimana komitmen PMII terhadap Keislaman yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah dan Keindonesiaan yang berasaskan Pancasila.

Atas dasar NDP PMII, maka titik pemberangkatan PMII adalah tauhid dan titik tujuan PMII adalah cita-cita Kemerdekaan Indonesia, yang dalam perjalanannya adalah koherensi pola hubungan secara integral dan holistic dengan Allah SWT (Hablun Minallah), dengan sesama manusia (Hablun Minannas), dan dengan alam (Hablun Minal Alam).

Maka oleh karena itu, rumusan NDP PMII mesti teroperasionalkan menjadi kerangka strategis organisasi dalam seluruh kebijakan dan gerakan PMII, serta dalam setiap aktivitas keseharian Anggota dan Kader PMII.

Dan sesungguhnya, pengkajian, pengembangan dan pengejawantahan NDP PMII merupakan keharusan bagi setiap warga pergerakan.

Salam Pergerakan!

# SEJARAH NEGARA & BANGSA

## Prawacana

Perjalanan Indonesia dari era Politik Etis hingga statusnya saat ini sebagai negara demokrasi adalah kisah perjuangan, reformasi, dan ketahanan yang menarik. Sejarah ini ditandai oleh berbagai peristiwa penting yang membentuk lanskap politik, sosial, dan ekonomi bangsa, yang mengarah pada kemunculannya sebagai pemain kunci di Asia Tenggara. Bagian ini membahas evolusi sejarah Indonesia, dimulai dengan era Politik Etis di awal abad ke-20, melalui perjuangan kemerdekaannya yang penuh gejolak, dan akhirnya hingga reformasi demokrasi yang telah menentukan era modernnya.

## A. Sejarah Indonesia Merdeka

### Era Politik Etis: Katalis Perubahan

Era Politik Etis, yang dikenal sebagai Politik Etis, menandai titik balik penting dalam sejarah Indonesia di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Dimulai pada awal abad ke-20, kebijakan ini disusun sebagai respons terhadap kritik yang berkembang atas eksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia yang kejam selama Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) sebelumnya. Kebijakan Politik Etis didorong oleh rasa tanggung jawab moral, sebuah konsep yang muncul dari gerakan etika Belanda, yang berpendapat bahwa Belanda memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kolonialnya. Era ini dimaksudkan untuk membawa reformasi sosial, ekonomi, dan pendidikan, tetapi secara tidak sengaja juga meletakkan dasar bagi gerakan nasionalis Indonesia.

Inti dari kebijakan Politik Etis adalah tiga tujuan utama: pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Pendidikan dipandang sebagai landasan dari upaya ini, dengan Belanda percaya bahwa dengan mendidik elit Indonesia, mereka dapat menciptakan kelas pegawai negeri yang setia yang akan mendukung pemerintahan kolonial. Sekolah-sekolah didirikan di seluruh nusantara, menyediakan akses ke pendidikan gaya Barat untuk pertama kalinya bagi banyak orang Indonesia. Inisiatif ini menyebabkan munculnya elit Indonesia terpelajar

yang, alih-alih menjadi rakyat yang loyal, mulai mengembangkan kesadaran nasional dan mempertanyakan legitimasi kekuasaan Belanda.

Perluasan kesempatan pendidikan selama periode ini juga menyaksikan diperkenalkannya ide-ide politik dan sosial modern kepada siswa Indonesia. Kurikulum, yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Barat, mencakup mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan sastra, yang memaparkan siswa pada konsep demokrasi, kebebasan, dan nasionalisme. Hasilnya, benih-benih perlawanan terhadap kekuasaan kolonial ditaburkan di benak generasi muda ini. Banyak pemimpin masa depan gerakan kemerdekaan Indonesia, termasuk Sukarno, presiden pertama negara itu, adalah produk dari sistem pendidikan ini.

Selain pendidikan, era Politik Etis difokuskan pada peningkatan praktik pertanian melalui pengembangan sistem irigasi. Belanda bertujuan untuk meningkatkan produksi beras, yang merupakan makanan pokok penduduk dan komoditas ekspor utama. Dengan membangun bendungan, kanal, dan saluran irigasi, pemerintah kolonial berupaya meningkatkan hasil pertanian dan, pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan. Akan tetapi, meskipun proyek-proyek ini berhasil meningkatkan ketahanan pangan di beberapa daerah, proyek-proyek ini juga melayani kepentingan ekonomi kolonial, yang memperkuat eksploitasi sumber daya Indonesia untuk kepentingan Belanda.

Pilar ketiga dari kebijakan Politik Etis adalah emigrasi, yang melibatkan dorongan perpindahan penduduk dari pulau-pulau Jawa dan Bali yang berpenduduk padat ke daerah-daerah yang berpenduduk lebih sedikit seperti Sumatera dan Kalimantan. Hal ini dimaksudkan untuk meredakan tekanan penduduk dan mendorong pembangunan pertanian di pulau-pulau terluar. Kebijakan transmigrasi, sebagaimana yang kemudian dikenal, memiliki hasil yang beragam. Meskipun kebijakan ini mengarah pada pembentukan pemukiman baru dan penyebaran praktik pertanian, kebijakan ini juga menciptakan ketegangan antara para migran dan penduduk asli di daerah-daerah ini, yang menjadi dasar bagi konflik etnis di masa mendatang.

Meskipun niatnya tampak baik, era Politik Etis bukannya tanpa kontradiksi dan keterbatasan. Manfaat reformasi ini tidak merata, dengan mayoritas penduduk Indonesia terus hidup dalam kemiskinan dan di bawah kondisi pemerintahan kolonial yang keras. Perbaikan infrastruktur dan pendidikan terutama melayani kepentingan pemerintahan kolonial dan kelas elit kecil yang bekerja sama dengan Belanda. Ketimpangan ini hanya memicu ketidakpuasan yang semakin besar di antara penduduk yang lebih luas, terutama karena ekonomi kolonial terus mengeksploitasi sumber daya Indonesia dengan sedikit perhatian pada kesejahteraan penduduk asli.

Selain itu, kebijakan Politik Etis gagal untuk menanggapi aspirasi politik rakyat Indonesia. Meskipun menyediakan pendidikan dan peluang ekonomi untuk beberapa orang terpilih, kebijakan tersebut tidak menawarkan bentuk representasi politik atau otonomi apa pun. Pemerintah kolonial Belanda tetap memegang kendali dengan kuat, dan setiap upaya orang Indonesia untuk berorganisasi secara politik ditanggapi dengan penindasan. Kurangnya kebebasan politik ini semakin menggembelng gerakan nasionalis, karena elit terpelajar mulai menuntut tidak hanya reformasi sosial dan ekonomi tetapi juga hak politik dan penentuan nasib sendiri.

Meskipun pada awalnya era Politik Etis dimaksudkan sebagai periode reformasi sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, pada akhirnya era ini menjadi katalis bagi gerakan nasionalis. Kebijakan pendidikan, irigasi, dan emigrasi, meskipun bermanfaat dalam beberapa hal, juga menyoroti ketidaksetaraan dan eksploitasi yang melekat dalam pemerintahan kolonial. Era ini menjadi panggung bagi kebangkitan nasionalisme Indonesia, karena kaum elit terdidik mulai melawan penindasan kolonial, yang meletakkan dasar bagi perjuangan kemerdekaan pada akhirnya. Oleh karena itu, era Politik Etis merupakan bab yang kompleks dan penting dalam sejarah Indonesia, yang menggarisbawahi konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan kolonial dan ketahanan rakyat Indonesia dalam mengejar kebebasan dan penentuan nasib sendiri.

## **Bangkitnya Nasionalisme dan Perjuangan Kemerdekaan**

Kebangkitan nasionalisme di Indonesia sangat terkait erat dengan perkembangan kesadaran kolektif di antara berbagai kelompok sosial dan pembentukan organisasi yang bertujuan untuk menantang kekuasaan kolonial Belanda. Awal abad ke-20 menandai periode kebangkitan bagi banyak orang Indonesia, khususnya di kalangan elit terpelajar, yang mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari identitas nasional yang lebih besar, bukan sekadar anggota komunitas etnis atau daerah yang terisolasi. Pergeseran identitas ini sangat penting dalam pembentukan organisasi nasionalis yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan.

Salah satu organisasi paling awal dan paling berpengaruh adalah Budi Utomo, yang didirikan pada tahun 1908 oleh sekelompok mahasiswa kedokteran Jawa yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Budi Utomo awalnya berfokus pada peningkatan pendidikan dan kemajuan budaya di kalangan orang Jawa, tetapi dengan cepat menjadi simbol gerakan nasionalis yang lebih luas. Meskipun kegiatannya terbatas di Jawa dan tidak secara eksplisit menyerukan kemerdekaan, Budi Utomo meletakkan dasar bagi munculnya organisasi nasionalis lainnya dengan menumbuhkan rasa persatuan dan tujuan bersama di antara para anggotanya.

Setelah Budi Utomo, Sarekat Islam muncul pada tahun 1911 sebagai kekuatan penting dalam gerakan nasionalis. Awalnya didirikan sebagai koperasi pedagang Muslim, Sarekat Islam dengan cepat berkembang menjadi organisasi massa dengan agenda politik yang kuat. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Sarekat Islam berusaha melindungi kepentingan ekonomi para anggotanya sekaligus mengadvokasi reformasi politik dan otonomi yang lebih besar bagi orang Indonesia. Tidak seperti Budi Utomo, Sarekat Islam memiliki basis dukungan yang luas di seluruh Jawa dan pulau-pulau lainnya, menjadikannya salah satu gerakan nasional pertama yang sesungguhnya di Indonesia.

Munculnya organisasi-organisasi ini mencerminkan meningkatnya politisasi masyarakat Indonesia. Karena semakin banyak orang menyadari ketidaksetaraan dan ketidakadilan pemerintahan kolonial, mereka mulai berorganisasi dan menuntut perubahan. Periode ini juga menyaksikan menjamurnya kelompok-kelompok nasionalis lainnya, seperti Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan, yang berfokus pada pendidikan dan reformasi sosial dalam kerangka Islam. Organisasi-organisasi ini berkontribusi pada tumbuhnya rasa identitas Indonesia dengan menyatukan orang-orang di sekitar tujuan dan nilai-nilai bersama.

Pada tahun 1920-an, gerakan nasionalis memperoleh momentum dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Didirikan oleh Sukarno dan sekelompok aktivis yang berpikiran sama, PNI adalah partai politik pertama yang secara eksplisit menyerukan kemerdekaan penuh dari kekuasaan Belanda. Kepemimpinan Sukarno yang karismatik dan kemampuannya untuk mengartikulasikan aspirasi rakyat Indonesia menjadikan PNI sebagai kekuatan utama dalam gerakan nasionalis. Penekanan PNI pada mobilisasi massa, non-kerjasama dengan pemerintah kolonial, dan sikap anti-imperialisnya bergema dalam di hati orang Indonesia, khususnya kaum muda.

Penguasa kolonial Belanda, yang khawatir dengan sentimen nasionalis yang berkembang, menanggapi dengan tindakan represif. Para pemimpin organisasi nasionalis, termasuk Sukarno, sering ditangkap, diasingkan, atau dipenjara. Meskipun ada upaya-upaya untuk meredam gerakan tersebut, tindakan represif tersebut hanya memperkuat tekad para pemimpin nasionalis dan para pengikutnya. Penahanan tokoh-tokoh terkemuka seperti Sukarno dan Mohammad Hatta mengubah mereka menjadi simbol perlawanan dan mengilhami dukungan yang lebih besar bagi gerakan kemerdekaan.

Tahun 1930-an menjadi saksi semakin kuatnya kegiatan nasionalis karena organisasi-organisasi seperti Pemuda Indonesia dan Kongres Perempuan Indonesia mulai memainkan peran yang lebih aktif. Gerakan Pemuda Indonesia sangat berpengaruh, dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda yang bersejarah

pada tahun 1928, yang menyatakan persatuan Indonesia, satu bangsa, satu rakyat, dan satu bahasa. Sumpah ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan identitas nasional, yang selanjutnya memperkuat konsep Indonesia sebagai satu negara yang bersatu.

Perang Dunia II dan pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 berdampak besar pada gerakan nasionalis. Jepang, yang menyadari kekuatan nasionalisme Indonesia, berupaya memanfaatkannya untuk tujuan mereka sendiri dengan menjanjikan kemerdekaan dan mengizinkan organisasi-organisasi nasionalis beroperasi lebih bebas. Mereka mendirikan organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat), yang menyatukan para pemimpin nasionalis utama seperti Sukarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara untuk memobilisasi dukungan bagi upaya perang Jepang. Meskipun banyak nasionalis yang bekerja sama dengan Jepang, mereka juga menggunakan periode ini untuk mempersiapkan kemerdekaan pada akhirnya.

Selama pendudukan Jepang, pembentukan dua organisasi penting, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), menandai langkah-langkah penting menuju kemerdekaan. BPUPKI didirikan pada bulan Maret 1945 oleh Jepang sebagai sarana untuk menenangkan kaum nasionalis Indonesia dan untuk mempersiapkan pengalihan kekuasaan pada akhirnya. Panitia tersebut, yang terdiri dari 62 perwakilan Indonesia dari berbagai daerah dan latar belakang, bertugas menyusun konstitusi dan meletakkan dasar bagi Indonesia yang merdeka.

BPUPKI mengadakan dua sesi utama, di mana perdebatan kritis terjadi mengenai struktur politik Indonesia di masa depan. Selama sesi-sesi inilah dokumen-dokumen penting seperti Pancasila, landasan filosofis negara Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia dirumuskan. Sukarno, yang memainkan peran utama dalam diskusi-diskusi ini, mengusulkan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bagi penduduk Indonesia yang beragam, dengan

menekankan kepercayaan kepada satu Tuhan, kemanusiaan, persatuan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial.

Ketika perang hampir berakhir dan kekalahan Jepang sudah di depan mata, Jepang mengizinkan pembentukan PPKI pada bulan Agustus 1945 untuk menyelesaikan persiapan kemerdekaan. Tidak seperti BPUPKI, yang agak inklusif, PPKI lebih eksklusif, terdiri dari 21 anggota yang dipilih oleh Sukarno dan Hatta, yang mewakili berbagai daerah dan kelompok etnis. Tugas PPKI adalah untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh BPUPKI dan untuk mengawasi transisi menuju pemerintahan yang independen.

Peran BPUPKI dan PPKI dalam proses kemerdekaan tidak dapat dilebih-lebihkan. Organisasi-organisasi ini menyediakan platform terstruktur bagi para pemimpin Indonesia untuk membahas dan merencanakan masa depan bangsa mereka. Mereka juga memastikan bahwa transisi menuju kemerdekaan dilakukan dengan cara yang relatif tertib dan sah, dengan penyusunan konstitusi dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang mendasar. Pekerjaan yang dilakukan oleh komite-komite ini meletakkan dasar bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Sukarno dan Hatta.

Namun, deklarasi kemerdekaan hanyalah awal dari perjuangan Indonesia. Setelah proklamasi tersebut, pemerintah Indonesia yang baru dibentuk menghadapi tantangan langsung dari pasukan Belanda yang kembali, yang berusaha untuk membangun kembali kendali atas bekas koloni mereka. Hal ini menyebabkan Revolusi Nasional Indonesia, konflik yang keras dan berkepanjangan yang berlangsung hingga tahun 1949. Selama periode ini, PPKI dibubarkan, dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) didirikan untuk berfungsi sebagai badan legislatif sementara, membimbing republik yang baru lahir melalui tahun-tahun perang yang penuh gejolak.

Sepanjang perjuangan kemerdekaan, peran masyarakat sipil dan organisasi nasionalis sangat penting. Organisasi-organisasi ini, baik budaya, agama, maupun politik, berperan penting dalam memobilisasi rakyat Indonesia, menumbuhkan rasa identitas nasional, dan menciptakan front persatuan melawan

kekuasaan kolonial. Keterlibatan berbagai kelompok, termasuk pemuda, wanita, dan pemimpin agama, memastikan bahwa gerakan kemerdekaan bersifat inklusif dan mewakili aspirasi masyarakat luas.

Kebangkitan nasionalisme di Indonesia dan perjuangan kemerdekaan selanjutnya dibentuk oleh berbagai upaya organisasi dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Sejak awal berdirinya Budi Utomo dan Sarekat Islam hingga peran penting yang dimainkan oleh BPUPKI dan PPKI, organisasi-organisasi ini berperan penting dalam membangun fondasi bagi Indonesia yang merdeka. Upaya kolektif masyarakat Indonesia, yang dipersatukan oleh visi kebebasan bersama, akhirnya membuahkan keberhasilan dalam mewujudkan kemerdekaan pada tahun 1945. Periode dalam sejarah Indonesia ini merupakan bukti kekuatan gerakan akar rumput yang terorganisasi dalam menantang kolonialisme dan mencapai kedaulatan nasional.

### **Awal Kemerdekaan: Demokrasi Terpimpin Sukarno**

Tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia ditandai dengan berbagai tantangan dan pergolakan yang signifikan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berjuang tidak hanya untuk mengonsolidasikan kebebasan yang baru diperolehnya tetapi juga untuk mempertahankannya dari upaya Belanda untuk menegaskan kembali kendalinya. Periode ini, yang dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia, ditandai dengan berbagai upaya militer dan diplomatik yang intens untuk mendapatkan pengakuan internasional dan kedaulatan republik baru tersebut.

Revolusi Nasional Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1949, merupakan periode yang menentukan dalam sejarah bangsa ini. Pasukan Indonesia, yang sebagian besar terdiri dari milisi tidak teratur dan mantan anggota organisasi pemuda yang dilatih Jepang, terlibat dalam perang gerilya melawan Belanda, yang berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas bekas koloni mereka. Meskipun kalah dalam hal sumber daya dan peralatan militer, para pejuang Indonesia didorong oleh rasa nasionalisme yang mendalam dan keinginan

untuk menentukan nasib sendiri. Konflik tersebut brutal, dengan banyaknya korban sipil dan kerusakan yang meluas di seluruh nusantara.

Selama periode yang penuh gejolak ini, pemerintah Indonesia yang masih muda menghadapi tantangan ekonomi yang sangat besar. Perang telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur negara, dan ekonomi pun hancur. Blokade Belanda terhadap pelabuhan-pelabuhan Indonesia sangat membatasi perdagangan, yang menyebabkan kekurangan barang-barang penting dan hiperinflasi. Pemerintah, yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, berjuang untuk menjaga ketertiban dan memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Situasi ekonomi yang buruk memperburuk ketegangan sosial dan menyebabkan kerusuhan di berbagai bagian negara.

Pada tahun 1949, di bawah tekanan internasional yang kuat dan setelah negosiasi yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengalihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, menandai berakhirnya Revolusi Nasional secara resmi, tetapi tantangan bagi negara baru itu masih jauh dari selesai. Indonesia mewarisi ekonomi yang dilanda perang, masyarakat yang terpecah belah, dan lanskap politik yang penuh dengan ketidakstabilan.

Sukarno, sebagai presiden pertama negara itu, menghadapi tugas yang berat untuk menyatukan penduduk Indonesia yang beragam dan membangun negara yang kohesif. Awal tahun 1950-an ditandai oleh fragmentasi politik, dengan banyaknya partai yang mewakili berbagai macam ideologi, dari komunisme hingga Islamisme dan nasionalisme sekuler. Keberagaman ini membuat sulit untuk membangun pemerintahan yang stabil, karena koalisi sering kali berumur pendek dan rentan terhadap konflik internal. Sistem parlementer yang diadopsi setelah kemerdekaan terbukti tidak efektif dalam mengelola lingkungan politik negara yang kompleks.

Menyadari keterbatasan sistem parlementer dan meningkatnya ancaman disintegrasi, Sukarno mulai menganjurkan sistem politik baru yang disebutnya Demokrasi Terpimpin. Diperkenalkan pada tahun 1957, Demokrasi

Terpimpin merupakan upaya Sukarno untuk menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan tersentralisasi yang dapat secara efektif mengelola tantangan negara. Ia percaya bahwa demokrasi gaya Barat yang diadopsi setelah kemerdekaan tidak cocok untuk Indonesia, mengingat keragaman budayanya dan perlunya persatuan dalam menghadapi ancaman eksternal dan internal.

Di bawah Demokrasi Terpimpin, Sukarno berusaha untuk mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengurangi pengaruh partai politik dan membawa elemen-elemen kunci negara di bawah kendali langsungnya. Ia membangun sistem di mana pengambilan keputusan terpusat di tangan sekelompok kecil elit, termasuk militer, nasionalis, dan perwakilan dari organisasi sosial besar, seperti kelompok agama dan serikat buruh. Sukarno memposisikan dirinya sebagai penengah utama kepentingan nasional, dengan kewenangan untuk mengesampingkan keputusan yang dibuat oleh parlemen atau lembaga lain.

Secara ekonomi, Indonesia terus berjuang selama tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin. Negara ini tetap sangat bergantung pada pertanian, khususnya ekspor komoditas seperti karet, kopi, dan minyak sawit. Namun, pasar global untuk produk-produk ini tidak stabil, dan infrastruktur Indonesia masih dalam tahap pemulihan dari kehancuran Revolusi Nasional. Upaya pemerintah untuk melakukan industrialisasi ekonomi terhambat oleh kurangnya investasi, baik dalam maupun luar negeri, dan oleh keresahan sosial yang sedang berlangsung.

Untuk mengatasi tantangan ekonomi, Sukarno memulai serangkaian proyek pembangunan yang ambisius, yang dikenal sebagai proyek mercusuar atau "proyek mercusuar," yang dimaksudkan untuk memamerkan kemajuan Indonesia dan menegaskan kemerdekaannya di panggung dunia. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur utama, seperti Monumen Nasional (Monas) di Jakarta dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun proyek-proyek ini penting secara simbolis, namun proyek-proyek ini membebani anggaran nasional dan tidak banyak membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi yang mendasarinya, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan luar negeri Sukarno selama periode ini ditandai dengan strategi menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara blok Barat dan Timur, sebuah konsep yang disebutnya Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri). Ia berusaha menegaskan kemerdekaan Indonesia dalam urusan internasional dengan menjalankan kebijakan non-blok, yang memungkinkan negara tersebut menerima bantuan dan dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, tindakan penyeimbangan ini menjadi semakin sulit karena ketegangan Perang Dingin meningkat, yang menyebabkan perpecahan internal di Indonesia sendiri.

Kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan politik pada era Demokrasi Terpimpin akhirnya menyebabkan meningkatnya ketegangan antara militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang keduanya merupakan pilar utama rezim Sukarno. PKI telah tumbuh secara signifikan pengaruhnya selama tahun 1950-an dan awal 1960-an, menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Aliansi dekatnya dengan Sukarno dan kekuatannya yang semakin meningkat membuat khawatir militer dan elemen konservatif lainnya dalam masyarakat Indonesia, yang menjadi panggung bagi konflik besar.

Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia berada di ambang kehancuran. Perekonomian jatuh bebas, dengan inflasi yang merajalela, kekurangan pangan, dan kemiskinan yang meluas. Kerusuhan sosial meningkat, dan situasi politik menjadi semakin terpolarisasi. Upaya Sukarno untuk mempertahankan kendali melalui Demokrasi Terpimpin gagal, karena perpecahan di dalam negeri semakin dalam. Panggung disiapkan untuk perubahan dramatis dan keras dalam lanskap politik Indonesia, yang akan datang dengan peristiwa tahun 1965, yang akhirnya menyebabkan jatuhnya Sukarno dan bangkitnya rezim Orde Baru Suharto.

### **Orde Baru: Rezim Otoriter Suharto**

Orde Baru, di bawah kepemimpinan Jenderal Suharto, menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Menyusul berakhirnya Demokrasi Terpimpin Sukarno yang kacau dan peristiwa berdarah tahun 1965, yang mencakup Gerakan 30 September (G30S) yang

terkenal kejam dan pembunuhan massal berikutnya, Suharto muncul sebagai pemimpin baru negara itu. Rezimnya, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, dicirikan oleh otoritarianisme, pembangunan ekonomi, dan penindasan ketat terhadap perbedaan pendapat politik.

Naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan dimulai setelah G30S, kudeta yang gagal yang menyebabkan terbunuhnya enam jenderal tinggi Indonesia. Kudeta itu dengan cepat disalahkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Suharto, yang saat itu seorang mayor jenderal, memanfaatkan kekacauan itu untuk melancarkan kampanye melawan PKI dan para pendukungnya. Kampanye ini mengakibatkan pembunuhan massal sekitar 500.000 hingga satu juta orang, termasuk komunis, terduga komunis, dan etnis Tionghoa. Kebrutalan pembersihan ini secara efektif memberantas PKI dan memungkinkan Suharto untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya.

Pada bulan Maret 1966, Suharto memaksa Sukarno untuk menyerahkan kewenangan eksekutif kepadanya melalui dekrit Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Ini menandai dimulainya Orde Baru, sebuah rezim yang menjanjikan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan berakhirnya pergolakan yang menjadi ciri tahun-tahun terakhir kekuasaan Sukarno. Suharto dengan cepat menyingkirkan Sukarno, yang ditempatkan dalam tahanan rumah hingga kematiannya pada tahun 1970, dan membangun tatanan politik baru yang berpusat di sekitar kepemimpinannya.

Rezim Orde Baru dibangun di atas fondasi dominasi militer dan kontrol ketat atas lanskap politik. Pemerintah Suharto secara sistematis membongkar lembaga-lembaga demokrasi yang didirikan selama tahun-tahun awal kemerdekaan, menggantinya dengan sistem yang sangat tersentralisasi dan otoriter. Partai-partai politik dilarang atau dipaksa bergabung ke dalam organisasi-organisasi yang disetujui pemerintah, dengan Golkar (Golongan Karya), kelompok fungsional yang didukung pemerintah, menjadi kekuatan politik yang dominan. Pemilu, meskipun diadakan secara teratur, dimanipulasi secara besar-besaran untuk memastikan dominasi Suharto yang berkelanjutan.

Untuk melegitimasi kekuasaannya, Soeharto mempromosikan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya prinsip panduan bagi bangsa. Pancasila, yang awalnya dirumuskan selama gerakan kemerdekaan, ditafsirkan ulang oleh Soeharto untuk menekankan kesesuaian, ketertiban, dan persatuan nasional di bawah kepemimpinannya. Semua organisasi politik dan sosial diharuskan untuk mengadopsi Pancasila sebagai ideologi inti mereka, yang secara efektif menghilangkan ruang untuk perbedaan pendapat atau pandangan politik alternatif. Penafsiran ketat rezim terhadap Pancasila juga berfungsi sebagai alat untuk menekan identitas agama, etnis, dan daerah yang dapat menantang otoritas pusat.

Secara ekonomi, Orde Baru awalnya mencapai keberhasilan yang signifikan. Pemerintah Soeharto menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi, yang telah berantakan setelah bertahun-tahun salah urus dan hiperinflasi di bawah Sukarno. Dengan bantuan para ekonom lulusan Barat, yang sering disebut sebagai "Mafia Berkeley," Soeharto memperkenalkan serangkaian reformasi berorientasi pasar, termasuk penghematan fiskal, deregulasi, dan dorongan investasi asing. Kebijakan-kebijakan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, khususnya selama tahun 1970-an dan 1980-an, yang didorong oleh ledakan minyak dan peningkatan ekspor sumber daya alam.

Kebijakan ekonomi Orde Baru dipuji secara luas karena membawa stabilitas dan kemakmuran bagi Indonesia, mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan dan mengubah negara ini menjadi salah satu ekonomi paling dinamis di Asia Tenggara. Pemerintah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur, pendidikan, dan perawatan kesehatan, yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas hidup bagi banyak orang Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi ini harus dibayar dengan harga mahal. Orde Baru sangat korup, dengan Suharto dan lingkaran dalamnya menyedot sejumlah besar sumber daya negara untuk keuntungan pribadi. Korupsi ini, ditambah dengan kapitalisme kroni, menciptakan sistem di mana kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara banyak orang Indonesia tetap dalam kemiskinan.

Sifat otoriter rezim tersebut juga terwujud dalam pendekatannya terhadap perbedaan pendapat dan oposisi. Pemerintah Suharto mempertahankan kontrol ketat atas media, pendidikan, dan masyarakat sipil, memastikan bahwa setiap kritik terhadap rezim tersebut segera dibungkam. Lawan politik sering ditahan tanpa pengadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia meluas. Militer memainkan peran utama dalam mempertahankan sistem represif ini, dengan doktrin dwifungsi yang memungkinkan militer untuk campur tangan dalam semua aspek kehidupan politik dan sipil. Kehadiran militer yang meluas ini meredam segala potensi tantangan terhadap pemerintahan Suharto.

Meskipun Orde Baru bersifat represif, ia berhasil mempertahankan stabilitas politik relatif selama sebagian besar pemerintahan Suharto. Namun, stabilitas ini dibangun di atas fondasi yang rapuh. Ketergantungan rezim pada kontrol otoriter, korupsi, dan penindasan perbedaan pendapat menciptakan ketegangan mendasar yang akhirnya muncul ke permukaan. Pertumbuhan ekonomi yang menopang rezim tersebut mulai goyah pada tahun 1990-an, terutama setelah Krisis Keuangan Asia tahun 1997. Krisis tersebut mengungkap kelemahan ekonomi Indonesia, termasuk ketergantungannya yang berlebihan pada modal asing jangka pendek dan praktik korupsi yang telah mewabah di bawah Suharto.

Krisis keuangan tersebut menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah, dengan nilai tukar rupiah yang anjlok, pengangguran yang meluas, dan peningkatan tajam dalam kemiskinan. Kesulitan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh krisis tersebut mengikis legitimasi rezim Suharto, yang menyebabkan protes publik yang meluas. Mahasiswa, pekerja, dan kelompok lain turun ke jalan, menuntut reformasi politik dan diakhirinya kekuasaan Suharto. Militer, yang telah menjadi tulang punggung kekuasaan Suharto, mulai retak, dengan beberapa elemen menyatakan simpati kepada para pengunjuk rasa.

Pada bulan Mei 1998, situasi menjadi tidak dapat dipertahankan. Demonstrasi besar-besaran, terutama di Jakarta, dikombinasikan dengan keruntuhan ekonomi dan meningkatnya ketidakpuasan dalam militer, memaksa

Suharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Pengunduran dirinya menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era baru reformasi demokrasi, yang dikenal sebagai periode Reformasi. Jatuhnya Suharto merupakan akhir yang dramatis dan tiba-tiba bagi rezim yang telah mendominasi Indonesia selama lebih dari tiga dekade, meninggalkan warisan yang kompleks berupa pembangunan ekonomi, penindasan politik, dan perpecahan sosial.

### **Jatuhnya Suharto dan Era Reformasi**

Pada akhir 1990-an, cengkeraman kekuasaan Suharto mulai melemah. Krisis Keuangan Asia tahun 1997-1998 menghantam Indonesia dengan keras, yang menyebabkan kekacauan ekonomi, kemiskinan yang meluas, dan ketidakpuasan publik. Protes besar-besaran meletus di seluruh negeri, menuntun pengunduran diri Suharto. Pada Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Suharto mengundurkan diri, menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi.

Periode pasca-Suharto menyaksikan reformasi politik yang signifikan, termasuk desentralisasi kekuasaan, pembentukan sistem multipartai, dan pemilihan umum yang bebas. Reformasi ini mengubah Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, transisi ini bukannya tanpa tantangan, termasuk korupsi, kekerasan sektarian, dan perlunya reformasi ekonomi lebih lanjut.

### **B. Peran Nahdlatul Ulama dalam Kemerdekaan**

Nahdlatul Ulama (NU) sejak awal didirikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk melawan segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan Jepang. Selain itu, NU juga aktif dalam dakwahnya untuk menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran besar NU dalam perjuangan kemerdekaan dan pertahanan NKRI mencerminkan latar belakang pendirian ormas terbesar di dunia ini. Pendirian Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 didorong oleh tiga faktor utama: pertama, motif agama;

kedua, keinginan untuk mempertahankan paham Ahlu al-Sunnah wa 'l-Jamā'ah, dan ketiga, semangat nasionalisme.

Motif nasionalisme muncul karena NU didirikan dengan tujuan kuat untuk menyatukan ulama dan tokoh agama dalam perjuangan melawan penjajahan. Semangat nasionalisme ini juga tercermin dari nama Nahdlatul Ulama sendiri, yang berarti “Kebangkitan Para Ulama.” NU yang dipimpin oleh Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat menonjol dalam semangat nasionalismenya. Sebelum kemerdekaan RI, banyak pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi yang bersifat kedaerahan, seperti Jong Celebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Sumatera. Namun, para kiai NU memilih untuk mendirikan organisasi pemuda yang bersifat nasionalis. Pada tahun 1924, para pemuda pesantren mendirikan Shubban al-Waṭān (Pemuda Tanah Air).

Nahdlatul Ulama (NU) selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama dalam setiap langkahnya, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai keislaman, serta memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme yang tinggi. Hal ini tercermin dari latar belakang pendirian NU, perannya yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan usaha mempertahankan keutuhan NKRI. Di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari, NU sangat menghargai nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme yang selaras dengan syariat Islam serta paham Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah.

Peran Nahdlatul Ulama selama masa penjajahan Belanda dapat terlihat dari keputusan Mukhtamar NU ke-2 di Banjarmasin pada tahun 1936, yang menetapkan bahwa Hindia Belanda (sekarang Indonesia) adalah Dār al-Salām, menegaskan komitmen NU terhadap tanah air. Meskipun hukum yang berlaku tidak didasarkan pada Islam, NU tidak mempermasalahkannya karena yang penting adalah umat Islam dapat menjalankan syariat agamanya dengan bebas dan aman. NU berpendapat bahwa jihad ulama dalam mengusir penjajah Belanda adalah bagian dari ajaran Islam yang harus dilaksanakan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jihad yang dilakukan oleh ulama dan santrinya adalah perjuangan

untuk membela tanah air, yang dipandang sebagai bentuk cinta tanah air (*ḥubb al-waṭan*) dan termasuk dalam *jihād fi sabilillāh*. Menurut pandangan Islam, mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia adalah bagian dari kewajiban agama. KH. Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa jihad adalah amalan penting dalam Islam dengan banyak keutamaan, dan menjadi kewajiban setiap Muslim untuk melaksanakannya jika menghadapi serangan dari musuh kafir. Dalam konteks melawan penjajah Belanda, KH. Hasyim Asy'ari memberikan fatwa bahwa jihad untuk mempertahankan tanah air Indonesia adalah wajib bagi seluruh penduduk yang berada di wilayah Indonesia yang diserang oleh penjajah kafir Belanda.

Berdasarkan ajaran al-Qur'an, Nahdlatul Ulama (NU) sepakat bahwa jihad melawan penjajah Belanda adalah suatu kewajiban. Dalam konteks ini, pimpinan NU, terutama KH. Hasyim Asy'ari, turut aktif mendukung perjuangan kemerdekaan dengan menggerakkan rakyat melalui fatwa jihad. Pada 22 Oktober 1945, KH. Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama di kantor NU Jawa Timur mengeluarkan resolusi jihad. Akibat tindakan ini, KH. Hasyim Asy'ari menghadapi ancaman penangkapan oleh Belanda, namun ia tetap teguh dan memilih untuk bertahan bersama laskar *Ḥizbullāh* dan *Sabilillāh* melawan penjajah. Bahkan ketika Bung Tomo meminta KH. Hasyim untuk mengungsi dari Jombang, KH. Hasyim Asy'ari tetap bersikukuh bertahan hingga akhir, sehingga muncul prinsip yang terkenal di kalangan tradisional NU: *ḥubbu al-waṭan min alīmān* (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Semangat dakwah anti kolonialisme sudah melekat pada diri KH. Hasyim sejak belajar di Makkah, ketika jatuhnya dinasti Ottoman di Turki. KH. Hasyim pernah mengumpulkan kawan-kawannya, lalu berdoa di depan Multazam, berjanji menegakkan panji-panji keislaman dan melawan berbagai bentuk penjajahan. Sikap anti-penjajahan KH. Hasyim Asy'ari juga menyebabkan dia dipenjarakan selama masa penjajahan Jepang. Saat itu, kedatangan Jepang disertai dengan kebudayaan Saikerei, yang KH. Hasyim Asy'ari tolak keras karena dianggap haram dan dosa besar. Ia memandang tindakan membungkukkan badan tersebut, yang mirip dengan rukū' dalam shalat, sebagai sesuatu yang hanya boleh dilakukan untuk menyembah

Allah. KH. Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa tindakan tersebut haram, bahkan jika ditujukan kepada Kaisar Tenno Heika yang dianggap sebagai keturunan Dewa Amaterasu. Akibat penolakannya, pada akhir April 1942, KH. Hasyim Asy'ari yang sudah berusia 70 tahun dijebloskan ke penjara di Jombang, kemudian dipindahkan ke Mojokerto, dan selanjutnya ke penjara Bubutan Surabaya.

### **Peran NU Dalam Perjuangan Melawan Penjajah**

Belanda, sebagai penjajah yang paling lama menguasai Indonesia, telah menerapkan banyak kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Hal ini mendorong Nahdlatul Ulama untuk bangkit dan mengorganisir laskar-laskar kekuatan (hizbullāh) dalam melawan penjajah Belanda yang dianggap kafir dan zalim. Dengan kekuatan komunitasnya yang menyeluruh, NU berhasil mempengaruhi masyarakat, sehingga muncul kelompok baru yang terdiri dari ulama dan santri. Seiring dengan meningkatnya kekuatan NU, Belanda berusaha menjauhkan organisasi ini dari pengaruh politiknya.

Pandangan dan cara hidup Islam yang melahirkan ulama beserta pesantrennya tidak hanya berfokus pada perubahan sosial, tetapi lebih cenderung pada revolusi sosial yang radikal dan menyeluruh, yang didasarkan pada perubahan sikap mental. Arus perubahan ini kemudian menghadapi tantangan baru berupa agresi perdagangan dan agama dari imperialis Barat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, para ulama bekerja keras dalam membina santri-santrinya agar memiliki semangat tempur yang kuat (*combative spirit*). Pesantren yang tadinya merupakan lembaga pendidikan, bertambah fungsinya sebagai tempat kegiatan membina pasukan sukarela yang akan disumbangkan untuk mempertahankan agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Thomas Stamford Raffles, peran strategis kelompok ulama tidak muncul dari proses pemilihan atau karisma raja, tetapi dari perkembangan Islam itu sendiri, yang memandang ulama sebagai kelompok intelektual penting. Hal ini telah menjadi karakter dasar bangsa Indonesia, yang sering mengangkat kalangan berilmu sebagai pemimpin. Kehadiran ulama dalam masyarakat diterima sebagai pelopor pembaharuan, dan pengaruh mereka semakin mendalam

setelah berhasil mengelola pesantren. Eksistensi ulama tidak hanya sebatas sebagai pengelola pesantren, tetapi peran mereka dalam perjuangan bangsa juga sangat militansi. Meskipun banyak penulis sejarah yang meremehkan peran ulama, Raffles mencatat betapa besar kontribusi mereka dalam mendukung Sultan melawan Belanda. Ia menilai ulama sebagai kelompok intelektual yang kuat dan berbahaya bagi penguasa pribumi dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, serta aktif dalam menggerakkan perjuangan dan memberikan semangat untuk pemberontakan. Pengaruh luas ulama ini tidak hanya terbatas pada politik dan militer, tetapi juga meluas ke bidang ekonomi. Mereka meninggalkan jejak dalam aktivitas perdagangan, tukar-menukar barang, dan kegiatan perniagaan lain yang mendukung perekonomian keluarga dan perjuangan agama. Pasar, yang bukan hanya tempat jual beli barang, juga berfungsi sebagai arena dakwah, dan kegiatan pasar sangat dipengaruhi oleh hari-hari besar Islam. Dengan demikian, Islam yang disebarkan di Indonesia oleh ulama memiliki peran positif dalam mendukung kegiatan sosial, politik, dan ekonomi.

Oleh karena itu, Belanda melihat kegiatan umat Islam yang memiliki dua fungsi sebagai da'i dan pedagang yang ini menjadi ancaman terhadap usaha perdagangan mereka. Islam dianggap sebagai senjata politik dalam melawan *Calvinisme* VOC Belanda. Dengan demikian, peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada membangkitkan semangat santri dan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk memengaruhi pemerintah agar segera mengambil sikap melawan kekuatan asing yang berusaha menggagalkan kemerdekaan negara..

Saat masa pendudukan Jepang, ulama dan santrinya sudah bersiap-siap menyusun kekuatan. Laskar *Ḥizbullāh* (Tentara Allah) dan *Sabīlillāh* (Jalan Allah) didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang, dan mendapat latihan kemiliteran di Cibarusah, sebuah desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Laskar *Ḥizbullāh* berada di bawah komando spiritual KH. Hasyim Asy'ari dan secara militer dipimpin oleh KH. Zaenul Arifin. Adapun laskar *Sabīlillāh* dipimpin oleh KH. Masykur, dia adalah pemuda pesantren dan anggota Ansor NU (ANU) sebagai pemasok paling besar dalam keanggotaan *Ḥizbullāh*. Menurut Martin van

Bruinessen, lahirnya “Resolusi Jihad” tidak terlepas dari peran Hizbullah, peran mereka nyata terlihat setelah berkumpulnya para kiai se-Jawa dan Madura di kantor ANO (Ansor Nahdlatul Oelama) pada tanggal 21 Oktober 1945. Setelah rapat darurat sehari semalam, maka pada 22 Oktober dideklarasikan seruan jihad fi sabilillah yang belakangan dikenal dengan istilah “Resolusi Jihad”, ketika NU melihat ancaman terhadap negara yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, dan sudah mempunyai konstitusinya sendiri (UUD 1945), maka pada tanggal 22 Oktober 1945, organisasi ini mengeluarkan sebuah “Resolusi Jihad”. Sedangkan tokoh ulama NU yang memprakarsai “Resolusi Jihad” ini adalah KH. Hasyim Asy’ari (1875-1947 M), KH. Wahab Hasbullah (1888-1971 M), Kiai Bisri Syansuri (1886-1980 M) dan Kiai Abbad Buntet (1879-1946 M).<sup>32</sup> Ketika NU melihat ancaman terhadap negara yang sudah menyatakan proklamasi kemerdekaannya, dan sudah mempunyai konstitusinya sendiri (UUD 1945), maka pada tanggal 22 Oktober 1945, organisasi ini mengeluarkan sebuah “Resolusi Jihad”. Namun, sebelumnya NU mengirim surat resmi kepada pemerintah yang berbunyi: ”Memohon dengan sangat kepada pemerintah Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap tiap-tiap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap Belanda dan kaki tangannya. Supaya pemerintah melanjutkan perjuangan yang bersifat fi sabilillah untuk tegaknya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan beragama Islam.

Adapun resolusi yang diputuskan dalam rapat para konsul NU se-Jawa itu berbunyi:

- a. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan.
- b. Republik Indonesia (RI) sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah, wajib dibela dan diselamatkan.
- c. Musuh negara Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara Sekutu (Inggris) dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia.

- d. Umat Islam, terutama NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia.
- e. Kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap Muslim yang berada pada jarak radius 94 km (jarak dimana umat Islam diperkenankan shalat jamā' dan qasr).

Resolusi jihad tersebut akhirnya mampu membangkitkan semangat arekarek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Dengan semangat takbir yang dipekkikan oleh Bung Tomo, maka terjadilah perang rakyat yang heroik pada 10 November 1945 di Surabaya.

Selain dari perannya sejak pra-kemerdekaan, NU banyak memberikan kontribusinya saat persiapan kemerdekaan sampai pasca-kemerdekaan. Pada saat penyusunan dasar negara, NU berperan dalam menjaga toleransi untuk tetap bersatu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam proses perumusannya, tahun 1945 yang menghasilkan dokumen sejarah penting, yaitu "Piagam Jakarta". Syukurlah rumusan "Atas berkat rahmat Allah.." itu tidak dituntut untuk dicoret sebagaimana rumusan tujuh kata "(Ketuhanan)... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya....", seperti kita pahami tujuh kata itu kemudian dicoret dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945. Bung Hatta mengaku, ia mendapat telepon dari seorang perwira Jepang yang mengaku menyampaikan aspirasi kaum Kristen Indonesia Timur, bahwa mereka tidak mau bergabung dengan NKRI jika tujuh kata itu tidak dihapus.

Menurut KH. Wahid Hasyim, disini dapat dilihat bahwa toleransi yang dilakukan oleh NU dan tokoh-tokoh pejuang Muslim lain yang menerima untuk menghapus tujuh kata dan menerima tuntutan kaum Kristen Indonesia Timur, itu semua merupakan pengorbanan dan perjuangan para ulama NU demi terpeliharanya kemerdekaan dan juga demi persatuan dan kesatuan NKRI.

## Penutup

Sejarah Indonesia dari era Politik Etis hingga saat ini adalah kisah tentang ketahanan, perjuangan, dan transformasi. Dari benih-benih nasionalisme yang ditabur selama masa kolonial hingga reformasi demokrasi abad ke-21, Indonesia telah membuat kemajuan yang luar biasa. Namun, perjalanannya masih jauh dari selesai. Seiring dengan terus berkembangnya negara ini, negara ini harus mengatasi tantangan yang ada untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya sebagai negara terkemuka di masyarakat global.

Dalam perjalanan sejarah panjang itu, Nahdlatul Ulama (NU) hadir didalamnya. NU dibawah pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dimana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme yang berdasar atas syaria't Islam alā Ahlu al-sunnah wal al-jamā'ah. Sebelum negara Republik Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, akan tetapi Kiai-Kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis. Perjuangan laskar-laskar Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengusir penjajah Belanda sebenarnya adalah tuntunan ajaran agama Islam yang harus dilaksanakan setiap umat-Nya sebagai bentuk manifestasi rasa syukur terhadap Allah SWT yang maha kuasa. Jihad yang dilakukan oleh laskar-laskar Nahdlatul Ulama (NU) ialah jihad membela tanah air, sebagai bentuk cinta tanah air (*ḥubb alwaṭan*) yang dimaknai sebagai *jihad fī sabīlillāh*.

Narasi sejarah ini tidak hanya menyoroti peristiwa dan tokoh utama yang telah membentuk Indonesia, tetapi juga menggarisbawahi kompleksitas perjalanannya. Sejarah Indonesia adalah bukti semangat abadi rakyatnya dan pengejaran mereka yang tak kenal lelah akan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan.

## **SEJARAH GERAKAN MAHASISWA (SEJARAH GERMA)**

### **A. Geneologi Gerakan Mahasiswa Indonesia**

Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa. Sejarah Gerakan mahasiswa yang tertua yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang didirikan pada 1922 oleh Mohammad Hatta, yang saat itu sedang belajar di Netherland Handelshogeschool di Rotterdam. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkaran kekuasaan Orde Baru, di antaranya Akbar Tanjung, Cosmas Batubara Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, dll. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditunggangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru Dalam perkembangannya di kemudian hari,

Orde Baru juga banyak mendapatkan koreksi dari germa seperti dalam gerakan-gerakan berikut:

1. Gerakan anti korupsi yang diikuti oleh pembentukan Komite Anti Korupsi, yang diketuai oleh Wilopo (1970).

2. Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang.
3. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut.
4. Gerakan mahasiswa Indonesia 1974. Gerakan memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia pada 1974. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, yang mengakibatkan dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden.

## **B. Perkembangan Gerakan Mahasiswa dari Era Pra-Kemerdeaan hingga Era Reformasi**

### **Tahun 1908**

Boedi Oetomo, adalah wadah perjuangan yang didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908 oleh para pemuda dari lembaga pendidikan STOVIA, wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual. Pada kongres yang pertama di Yogyakarta, tanggal 5 Oktober 1908 ditetapkan tujuan perkumpulan yaitu “Kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan”. Dalam 5 tahun permulaan Budi Oetomo sebagai perkumpulan, tempat keinginan-keinginan bergerak maju dapat dikeluarkan, tempat kebaktian terhadap bangsa dinyatakan, mempunyai kedudukan monopoli dan oleh karena itu Boedi Oetomo maju pesat, tercatat akhir tahun 1909 telah mempunyai 40 cabang dengan kurang lebih 10.000 anggota. Disamping itu, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, salah satunya Mohammad Hatta yang saat itu sedang belajar di Nederland Handelshogeschool di Rotterdam mendirikan Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeninging tahun 1922, disesuaikan dengan perkembangan dari pusat kegiatan diskusi menjadi wadah yang berorientasi politik dengan jelas. Dan terakhir untuk lebih mempertegas identitas nasionalisme yang diperjuangkan, organisasi ini kembali berganti nama baru menjadi Perhimpunan Indonesia, tahun 1925.

Berdirinya Indische Vereeninging dan organisasi-organisasi lain, seperti: Indische Partij yang melontarkan propaganda kemerdekaan Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah yang beraliran nasionalis demokratis dengan dasar agama, Indische Sociaal Democratische Vereeninging (ISDV) yang berhaluan Marxisme, menambah jumlah haluan dan cita-cita terutama ke arah politik. Hal ini di satu sisi membantu perjuangan rakyat Indonesia, tetapi di sisi lain sangat melemahkan Boedi Oetomo karena banyak orang kemudian memandang Boedi Oetomo terlalu lembek oleh karena hanya menuju "kemajuan yang selaras" dan terlalu sempit keanggotaannya (hanya untuk daerah yang berkebudayaan Jawa) meninggalkan Boedi Oetomo . Oleh karena cita-cita dan pandangan umum berubah ke arah politik, Boedi Oetomo juga akhirnya terpaksa terjun ke lapangan politik. Kehadiran Boedi Oetomo, Indische Vereeninging, dll pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdempannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia: generasi 1908, dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme.

## **Tahun 1928**

Pertengahan tahun 1923, para mahasiswa yang bergabung dalam Indonesische Vereeninging kembali ke tanah air. karena Kecewa dengan perkembangan perjuangan di Indonesia, oleh sebab itu, mereka membentuk kelompok studi yang dikenal amat berpengaruh, karena keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. Pertama, adalah Kelompok Studi Indonesia (Indonesische Studie-club) yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1924 oleh Soetomo. Kedua, Kelompok Studi Umum (Algemeene Studie-club) direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang dimotori oleh Soekarno pada tanggal 11 Juli 1925. Diinspirasi oleh pembentukan Kelompok Studi Surabaya dan Bandung. menyusul kemudian Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), prototipe organisasi yang

menghimpun seluruh elemen gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan tahun 1926, Kelompok Studi St. Bellarmius yang menjadi wadah mahasiswa Katolik, Cristelijke Studenten Vereniging (CSV) bagi mahasiswa Kristen, dan Studenten Islam Studie-club (SIS) bagi mahasiswa Islam pada tahun 1930-an. Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, munculnya generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dicetuskan melalui Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928, dimotori oleh PPPI.

### **Tahun 1945**

Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah inernjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik, dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan. Praktis, akibat kondisi yang kosong dan carut marut tersebut, maka mahasiswa kebanyakan akhirnya memilih untuk lebih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi, bersarna para pemuda lainnya terutama di asrama-asrama. Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah, berperan besar dalam melahirkan sejumlah tokoh, adalah Asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945, yang menentukan kehidupan bangsa. Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa

menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok.

## **Tahun 1966**

Setelah Kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, di antaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947. Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai-partai politik. Misalnya. GMKI Gerakan Mahasiswa kristen Indonesia, PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dengan Partai Katholik. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi mahasiswa independen secara organisatoris, dan lain-lain. Di antara organisasi mahasiswa pada masa itu. CGMI lebih menonjol setelah PKI tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. CGMI secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, bahkan jauh lebih berusaha memengaruhi PPMI, kenyataan ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI dan, terutama dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI- khususnya setelah Kongres V tahun 1961.

Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni PMKRI. HMI, PMII, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) atau PPMI. Tujuan pendiriannya, terutama agar para

aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan. Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain.

Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkaran kekuasaan Orde Baru di antaranya Cosmas Batubara (Eks Ketua Presidium KAMI Pusat), Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi ketiganya dari PMKRI, Akbar Tanjung dari HMI dll. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan 66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabinet pemerintahan Orde Baru Tahun 1974.

Berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 1974, adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan militer. Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktik kekuasaan rezim Orde Baru, seperti:

1. Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang.
2. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang mengusir banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut.

Dengan reaksi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut gerakan "Mahasiswa Menggugat" yang dimotori Arif Budiman yang program utamanya adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM, dan korupsi. Menyusul aksi-aksi lain dalam skala yang lebih luas, pada 1970 pemuda dan mahasiswa kemudian mengambil inisiatif dengan membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo. Terbentuknya KAK ini dapat dilihat merupakan reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Task Force UI sampai Komisi Empat. Berbagai pembangunan dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD.

Muncul berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat kekecewaan, mereka mendorong munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada tanggal 28 Mei 1971 yang dimotori oleh Arif Bodiman, Adnan Buyung Nasution, Asmara Nababan.

Di tahun 1972, mahasiswa yang bernama Aji Uga telah melancarkan berbagai protes terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek eksklusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan, misalnya terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada saat Indonesia haus akan bantuan luar negeri. Protes terus berlanjut. Tahun 1972, dengan isu harga beras naik, berikutnya tahun 1973 selalu diwarnai dengan isu korupsi sampai dengan meletusnya demonstrasi memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia dan peristiwa Malari pada 15 Januari

1974. Gerakan mahasiswa di Jakarta meneriakkan isu “ganyang korupsi” sebagai salah satu tuntutan “Tritura Baru” disamping dua tuntutan lainnya bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga; sebuah versi terakhir Tritura yang muncul setelah versi koran Mahasiswa Indonesia di Bandung sebelumnya. Gerakan ini berbuntut dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden.

### **Tahun 1977 – 1978**

Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus disamping kuliah sebagai kegiatan rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Dies Natalis, acara penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi protes kecil tetap ada. Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekrutmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakikat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional. Awalnya, pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah Tim Dialog Pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. Namun, upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa. Pada periode ini terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik, penyebab lain adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi diwilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa tahun 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal.

Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia. Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya dan tuntutan mahasiswa pun tidak membuahkan hasil. Meski

demikian, perjuangan gerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional. Gerakan bersifat nasional namun tertutup dalam kampus. Oktober 1977 Gerakan mahasiswa tahun 1977/1978 ini tidak hanya berporos di Jakarta dan Bandung saja namun meluas secara nasional meliputi kampus-kampus di kota Surabaya, Medan, Bogor, Ujungpandang (sekarang Makassar), dan Palembang 28 Oktober 1977, delapan ribu anak muda menyemut di depan kampus ITB. Mereka berikrar satu suara, "Turunkan Suharto!". Besoknya, semua yang berteriak, raib ditelan teralis besi. Kampus segera berstatus darurat perang. Namun, sekejap kembali tentram.

### **Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1977**

Berkumpulnya mahasiswa kembali 10 November 1977, di Surabaya dipenuhi tiga ribu jiwa muda. Setelah peristiwa di ITB pada Oktober 1977, giliran Kampus ITS Baliwerti beraksi. Dengan semangat pahlawan, berbagai pimpinan mahasiswa se-Jawa hadir memperingati hari Pahlawan 1977. Seribu mahasiswa berkumpul, kemudian berjalan kaki dari Baliwerti menuju Tugu Pahlawan. Sejak pertemuan 28 Oktober di Bandung. ITS didaulat menjadi pusat konsentrasi gerakan di front timur. Hari pahlawan dianggap cocok membangkitkan nurani yang hilang. Kemudian disepakati pusat pertemuan nasional pimpinan mahasiswa di Surabaya. Sementara di kota-kota lain, peringatan hari Pahlawan juga semarak. Di Jakarta, 6000 mahasiswa berjalan kaki lima kilometer dari Rawamangun (kampus IKIP) menuju Salemba (kampus UI), membentangkan spanduk, "Padamu Pahlawan Kami Mengadu". Juga dengan pengawalan ketat tentara. Acara hari itu, berwarna sajak puisi serta hentak orasi. Suasana haru-biru, mulai membuat gerah. Beberapa batalyon tempur sudah ditempatkan mengitari kampus-kampus Surabaya. Sepanjang jalan ditutup, mahasiswa tak boleh merapat pada rakyat. Aksi mereka dibungkam dengan cerdas.

Konsolidasi berlangsung terus. Tuntutan agar Soeharto turun masih menggema jelas, menggegerkan semua pihak. Banyak korban akhirnya jatuh. Termasuk media- media nasional yang ikut mengabarkan, dibubarkan paksa.

Pimpinan Dewan Mahasiswa (DM) ITS rutin berkontribusi pada tiap pernyataan sikap secara nasional. Senat mahasiswa fakultas tak henti mendorong dinamisasi ini. Mereka bergerak satu suara. Termasuk mendukung Ikrar Mahasiswa 1977. Isinya hanya tiga poin namun berarti. "Kembali pada Pancasila dan UUD 45, meminta pertanggungjawaban presiden, dan bersumpah setia bersama rakyat menegakan kebenaran dan keadilan".

### **Peringatan Tritura 10 Januari 1978, Dihentikannya Gerakan oleh Penguasa**

Peringatan 12 tahun Tritura, 10 Januari 1978. peringatan 12 tahun Tritura itu jadi awal sekaligus akhir. Penguasa menganggap mahasiswa sudah di luar toleransi. Dimulailah penyebaran benih-benih teror dan pengekangan. Sejak awal 1978, 200 aktivis mahasiswa ditahan tanpa sebab. Bukan hanya dikurung, sebagian mereka diintimidasi lewat interogasi. Banyak yang dipaksa mengaku pemberontak negara. Tentara pun tidak sungkan lagi masuk kampus. Berikutnya, ITB kedatangan pria loreng bersenjata. Rumah rektornya secara misterius ditembaki orang tak dikenal. Di UI, panser juga masuk kampus. Wajah mereka garang, lembaga pendidikan sudah menjadi medan perang. Kemudian hari, dua rektor kampus besar itu secara semena-mena dicopot dari jabatannya. Alasannya, terlalu melindungi anak didiknya yang keras kepala. Di ITS, delapan fungsionaris DM masuk "daftar dicari" Detasemen Polisi Militer. Sepulang aksi dari Jakarta, di depan kos mereka sudah ditunggu sekompri tentara. Rektor ITS waktu itu, Prof Mahmud Zaki, ditekan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membubarkan aksi dan men-drop out para pelakunya. Sikap rektor seragam, sebisa mungkin ia melindungi anak-anaknya. Beberapa berhasil tertangkap, sisanya bergerilya dari satu rumah ke rumah lain. Dalam proses tersebut, mahasiswa tetap "bergerak". Selama masih ada wajah yang aman dari daftar, mereka tetap konsolidasi, sembunyi-sembunyi. Pergolakan kampus masih panas, walau Para Rektor berusaha menutupi, intelegen masih bisa membaca jelas.

### **Tahun 1990**

Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut Setelah ada aksi mahasiswa di Yogyakarta yang

bernama FKMY (Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta). Aksi tersebut adalah menuntut pencabutan NKK/BKK di depan Mendikbud Fuad Hasan saat membuka pameran purna tugas mengajar seniman Widayat di ISI Yogyakarta. Adapaun FKMY sendiri adalah perwakilan mahasiswa dari ISI, Jarabadra, UMY, UGM, UII dan IAIN Sunan Kalijaga. Seperti aksi mahasiswa sebelumnya, aksi ini menjadi pelopor gerakan mahasiswa paska 77/78 yang dimatikan dengan NKK/BKK oleh Mendikbud Daed Joesoef dan aksi tersebut dikavulkan NKK/BKK dibubarkan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang didalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Dikalangan mahasiswa secara kelembagaan dan personal terjadi pro kontra, menanggapi SK tersebut.

Oleh mereka yang menerima, diakui konsep ini memiliki sejumlah kelemahan namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan, bahwa konsep SMPT tidak lain hanya semacam hiden agenda untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus. Dalam perkembangan kemudian, banyak timbul kekecewaan di berbagai perguruan tinggi karena kegagalan konsep ini. Mahasiswa menuntut organisasi kampus yang mandiri, bebas dari pengaruh korporatisasi negara termasuk birokrasi kampus. Sehingga, tidaklah mengherankan bila akhirnya berdiri Dewan Mahasiswa di UGM tahun 1994 yang kemudian diikuti oleh berbagai perguruan tinggi di tanah air sebagai landasan bagi pendirian model organisasi kemahasiswaan alternatif yang independen. Dengan dihidupkannya model-model kelembagaan yang lebih independen, meski tidak persis serupa dengan Dewan Mahasiswa yang pernah berjaya sebelumnya upaya perjuangan mahasiswa untuk membangun kemandirian melalui SMPT, menjadi awal kebangkitan kembali mahasiswa pada tahun 1990-an Gerakan yang menuntut kebebasan berpendapat dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di dalam kampus pada 1987-1990 sehingga akhirnya demonstrasi bisa dilakukan

mahasiswa di dalam kampus perguruan tinggi. Saat itu demonstrasi di luar kampus termasuk menyampaikan aspirasi dengan longmarch ke DPR/DPRD tetap terlarang.

Pada tahun 1993 ditangkapnya 21 mahasiswa dari berbagai daerah karena melakukan aksi di DPR/MPR dengan spanduk ungu "Seret Soeharto ke Sidang Istimewa" dan 21 Mahasiswa yang mengatasnamaka FAMI (Front Aksi Mahasiswa Indonesia) mendapatkan pidana penjara dari 9 bulan samapai 3 tahun. Disitulah awal gerakan mahasiswa terkonsolidasi dengan baik dan dalam persidanganpun dilalui dengan berbagai aksi mahasiswa secara berturut-turut, sampai aksi penuntutan mahasiswa di gelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah ditangkap beberapa mahasiswa di pagi hari karena melakukan aksi alegorisnya. Mereka di tangkap oleh polres Jakarta Pusat, waktu itu Kasat sersinya Tito Karnavian karena dianggap mengganggu ketertiban. Walaupun akhirnya dilepas setelah mengalami BAP.

### **Tahun 1998**

Gerakan 1998 menuntut reformasi dan dihapuskannya "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa, meski pada kenyataanya gerakan yang di bangun itu ada juga keterlibatan kelompok buruh, sehingga kekuatan pemberontakan menjadi kuat sehingga pada akhirnya mereka menuntut Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam gerakan ini di antaranya: Peristiwa Cimanggis. Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999. Dan itu adalah sekema yang coba di bangun oleh sekelompok orang yang berada di kekuasaan, sehingga memanfaatkan peluang tersebut.

### **C. Legitimasi Sejarah Gerakan Mahasiswa**

Latar belakang mengapa gerakan mahasiswa banyak muncul di negara berkembang, jika ditelisik yaitu:

*Pertama*, modernisme dalam banyak bidang ekonomi politik, terutama dalam rangkaian dengan kekuasaan, oleh kekuatan dan dominasi ekonomi politik negara-negara Utara terhadap negara-negara Selatan, menyebabkan terjadinya transformasi sosial dalam bentuk kolonialisme, imperialisme sampai neo liberalisme yang terjadi hingga sekarang ini. Fakta akan adanya dominasi dan kesenjangan kelas semakin kentara dan tidak bisa di tutup-tutupi. Ini yang menjadi latar belakang utama kemunculan gerakan-gerakan pembebasan yang banyak didominasi kelompok muda intelektual yaitu mahasiswa. Dalam banyak hal keterlibatan gerakan mahasiswa dalam gerakan-gerakan terutama gerakan politik banyak mendapat pengaruh dari kondisi domestik maupun global. Namun hal yang cukup menjadi dorongan utama adalah kondisi politik dalam negeri. Misalnya saja kediktatoran pemerintah militer Soeharto atau kediktatoran rezim yang sama di Amerika Latin menjadi pemicu awal dari tumbuhnya gerakan-gerakan demokratik mahasiswa.

*Kedua*, di Indonesia Gerakan Mahasiswa mendapat suatu legitimasi sejarah atas keturutsertaannya terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan semenjak berdirinya negara menjadi bagian yang diakui dari sistem politik. Jika kita telusuri, misalnya, perjuangan kemerdekaan Nasional yang didorong Soekarno dan lainnya lewat kelompok-kelompok studinya, Hatta lewat Perhimpunan Indonesianya, ternyata efektif dan mampu secara luas membangkitkan perasaan untuk sesegera mungkin lepas dari belenggu kolonialisme. Kelompok yang dulunya disebut "pemuda pelajar" ini menjadi semacam "martir kelompok terdidik" yang membawa angin perubahan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat akan kemerdekaan. Ketiga, kekurangan lembaga dan struktur politik yang mapan. Akibat dari itu adalah relatif mudahnya bagi setiap kelompok yang terorganisir untuk mempunyai dampak langsung terhadap politik. Eksistensi politik GM muncul ketika kebutuhan tersebut hadir.

Apalagi di barisan bawah gerakangerakan yang disponsori rakyat belum terakomodasi menjadi kekuatan perubahan yang signifikan. GM mulai membentuk suatu elit, sehingga merasa berperan dalam kemungkinan terjadinya transformasi sosial yang lebih luas. Akses informasi tentang situasi perpolitikan

memungkinkan banyak telaah untuk pembuktian bahwa proses regimentasi politik totaliter harus mendapat tanggapan yang serius dan diterjemahkan dalam bentuk gerakan-gerakan yang lebih konkrit. Banyak di antara universitas yang berada di perkotaan yang sebagian besar populasi mahasiswa berada dalam jarak jangkauan yang mudah terhadap pusat kekuasaan. Ini memungkinkan GM mudah melakukan sebuah aksi untuk memblow-up isu yang potensial dalam upaya pemobilisasian kesadaran massa yang lebih maju. Beberapa fenomena politik mahasiswa menjadi makin membesar karena ia dilakukan di tempat-tempat yang relatif mudah di jangkau media. Peristiwa 1965, 1974, sampai peristiwa Mei 98 menjadi semacam pilot project radikalisme mahasiswa yang bergerak di lini oposisi pemerintahan. GM kemudian mencuat menjadi semacam gerakan-gerakan ujung tombak (*avant garde*), dan eksistensinya semakin menjadi jelas ketika di dalam pereaturan politik di tingkatan negara dan massa akar rumput (*grass roots*), merasa kekurangan oposisi dari sistem politik rezim parlementarian atau sentralisme. Sehingga GM seringkali menjadi "cabang keempat" dari sistem pemerintahan. Berbagai faktor seperti situasi ekonomi politik yang memprihatinkan kehidupan umum, ketidakadilan sosial, kebijaksanaan luar negeri pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, politik yang telah menjadi tidak demokratis, dari semua faktor tersebut, mahasiswa kemudian membuat jalinan ideologis yang dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan gerakan transformasi sosial. Beberapa dekade terakhir GM mencoba untuk membedakan tawaran yang lebih jauh mengenai hubungannya dengan realitas rakyat yang menderita akibat perlakuan rezim. Pasca diberlakukannya NKK/BKK di semua perguruan tinggi, GM yang memilih untuk tetap menjaga jarak dengan kekuasaan langsung bersentuhan dengan kegiatan advokasi permasalahan rakyat. Kasus Badega, Kedung Ombo, Rancamaya, menjadi saksi kegigihan GM yang tidak lagi mengemukakan ekspresi teoritik dalam diskusi-diskusi tapi langsung bergerak dalam level praksis. Sampai dengan tahun 1998 klimaks GM terjadi dan dalam skala luas memperoleh dukungan luas dari rakyat.

## **E. Gerakan Mahasiswa Mengusung Isu Pendidikan**

Selain kondisi-kondisi di atas, sebenarnya faktor penting keterlibatan mahasiswa dalam gerakan-gerakan politik yaitu faktor subjektif posisi kelas mahasiswa. Mahasiswa yang terdefiniskan dalam wilayah akademisnya terutama mengenai kondisi pendidikan seringkali menjadi pemicu yang cukup material dalam memotivasi GM. Seringkali mahasiswa dari kelas menengah bawah merasa ia adalah generasi yang tersingkirkan terutama saat ideologi developmentalisme gencar dipaksakan oleh rezim orde baru. Sehingga ada gejala para lulusan PT yang kurang memenuhi "kualifikasi" pembangunan dianggap merupakan faktor tersier yang tidak produktif dalam perekonomian. R. Michels merumuskannya sebagai kelas sosial proletar intelektual. Sampai saat ini, kondisi pendidikan yang masih didominasi oleh kenyataan tidak bisa menjadi jaminan sosial seperti harapan untuk mejadi orang-orang yang sukses dan bisa memperoleh kemapanan hidup, memancing keresahan. Bayangan banyaknya generasi lulusan yang menganggur, yang tercatat sampai 20% dengan kenaikan 2-3 persen per tahun, membuat banyak mahasiswa kebat-kebit meyakini ini. Harapan perubahan yang berkembang menjadi upaya transformasi sosial, membuat kelompok-kelompok mahasiswa bereksperimen membentuk komunitas yang bisa secara lugas akar penyebab ketidakadilan ini Sehingga saya pikir cara-cara baru sosialisasi, pengembangan pendidikan yang antioriter, serta bentuk-bentuk persahabatan baru, kesemuanya ini bukan hanya upaya untuk mengubah pola-pola masyarakat yang ada tetapi juga usaha memecahkan persoalan-persoalan pribadi mereka.

Apalagi sistem pendidikan menjadi sangat rancu dan berorientasi pada penguatan dominasi ideologis negara hadir dengan kuatnya. Peran ideologisasi pragmatisme negara menyebabkan mahasiswa merasa teralienasi. Konsensus kelas menengah mengenai nilai dan norma pendidikan yang hams mengacu pada kebutuhan masyarakat konsumtif, dalam beberapa hal justru menjadikan mahasiswa sadar akan posisi konsumennya" sehingga dalam aksi-aksinya mahasiswa mulai mengidentifikasi kelompoknya sebagai penolakan atas alienasi struktural ini. GM seringkali hadir untuk menjemati gejala alienasi ini untuk secara partisipatif berkenalan dengan realitas sosial.



# ANTROPOLOGI KAMPUS

## A. Pengertian Antropologi Kampus

Antropologi secara Etimologi berasal dari kata "Antrop" yang mempunyai arti manusia, dan juga kata "logos" yang mempunyai arti kajian, diskusi atau ilmu pengetahuan. Sederhanya, Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Kampus sendiri kalau dilihat dari konteks Student Government adalah sebuah Miniatur State yang didalamnya manusia dilatih bagaimana praktikum cara kerja sebuah negara tapi dengan bentuk negara kecil atau hanya dalam lingkup kampus. Antropologi kampus pada dasarnya berusaha menjelaskan bagaimana kehidupan didalam lingkungan kampus. khususnya mahasiswa sebagai pemeran utama PMII.

Didalam kampus sendiri juga ada bentuk pemerintahan yang disebut Student Government yang merupakan bentuk pemerintahan yang ada dikampus yang didalamnya mahasiswa dilatih agar paham cara kerja sebuah negara melalui kehidupan pemerintahan di kampus. Namun perlu diketahui bahwa kehidupan kampus pun sama halnya kehidupan dimasyarakat yang memiliki berbagai jenis tipologi mahasiswa.

Prinsip dasar Student Government sebagai berikut:

### 1. Moralitas

Para pelaku Student Government haruslah mempunyai moralitas tinggi karena merekalah yang akan dilihat/menjadi acuan dalam bergerak oleh mereka para mahasiswa lainnya yang menjadi warga dari kampus mereka.

### 2. Intelektualitas

Dalam hal ini mahasiswa pastinya kalau dalam hal intelektualitas karena menjadi hal yang penting bagi seorang yang sedang masuk dalam jajaran BEM, DPM, atau ormawa yang masuk dalam Student Government lainnya untuk bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik dengan gagasan yang cemerlang.

### 3. Politik

Hal ini menjadi hal yang tidak bisa dielakkan dari diri pemerintahan, karena bicara politik pastinya tidak bisa lepas dari pemerintahan walaupun dikehidupan kampus. Maka dari itu para mahasiswa yang berdiri di jajaran pemerintahan kampus biasanya setelah lulus nanti biasanya menjadi politis ataupun jabatan sebagai petinggi didesanya karena sudah mengerti cara berpolitik yang baik dan benar.

### 4. Independen

Ke-Independenan sangat diperlukan oleh politikus kampus untuk bisa menguatkan adil-dalil yang mereka keluarkan tentunya independen sangat diperlukan.

### 5. Posisi tawar yang sejajar

Artinya semua mahasiswa mempunyai peluang disetiap diri mereka untuk mengisi posisi yang ada di pemerintahan kampus. Upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada. Tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya.

## **B. Tipologi Mahasiswa**

Mahasiswa hidup dengan gaya nya masing-masing karena hal itu, ada banyak tipologi mahasiswa yang ada, berikut beberapa tipologi mahasiswa yang dapat ditemui di kampus:

#### 1. Hedonis

Yakni mahasiswa yang hidup dengan mengikuti perkembangan zaman, *up to date*, *gaul* dan *popular*, tergerus gaya hidup kebarat-baratan. Namun usaha mengikuti perkembangan zaman tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa perkembangan zaman bersifat absurd yakni menawarkan kesenangan tanpa manfaat. Tipe mahasiswa hedonis adalah tipe mahasiswa yang tidak

mementingkan perkuliahan dan tidak juga mementingkan organisasi, dia hanya memikirkan bagaimana dirinya senang dengan dunianya.

## 2. Akademis

Mahasiswa yang memanfaatkan status kemahasiswaannya sebagai waktu untuk menuntut ilmu. Mahasiswa ini adalah mahasiswa yang aktivitasnya sebagian besar dipusatkan untuk dapat memperoleh nilai yang baik, kerjanya belajar dan cenderung apatis terhadap masalah disekitarnya.

## 3. Aktivis

Mahasiswa yang aktif dalam dinamika organisasi, ia tidak hanya berkuliah saja tetapi juga aktif di organisasi intra kampus maupun ekstra kampus.

## 4. Apatis

Yakni mahasiswa yang tidak peduli dengan kehidupan di sekitarnya, dapat dikatakan mahasiswa yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, mereka cenderung bersikap acuh tak acuh, memiliki sikap tidak mau tahu tentang kondisi sosial dan politik di kampus

## 5. Pragmatis

Mahasiswa yang mengandalkan kecakapan mereka dalam berinteraksi untuk dapat menonjol diantara kawan-kawannya, se-idealnya mahasiswa menurut pemikirannya sendiri. kecenderungan mereka adalah mencari muka didepan birokrat-birokrat kampus.

## **C. Peran Mahasiswa**

Mahasiswa adalah aset masa depan bangsa, kaum sosial yang belajar peka terhadap perubahan disekelilingnya, dan orang yang belajar menjadi kaum idealis, intelektualis, pemikir, kritis, dan analisis tajam, serta belajar

merencanakan, melaksanakan dan merealisasikan sebagai bentuk tanggung jawab kemasyarakatan. Peran mahasiswa sedikitnya adalah:

### 1. Mahasiswa Sebagai Iron Stock

Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Mahasiswa itu merupakan asset, cadangan, dan harapan bangsa untuk masa depan.

### 2. Mahasiswa Sebagai Agent of Change

Peran mahasiswa sebagai agent of change yaitu mahasiswa bertindak, dalam artian kita tidak hanya menjadi penggagas perubahan, melainkan menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut. Bisa disebut yang paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi yang dilakukan. Mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan menyaarakan aspirasi rakyat.

### 3. Mahasiswa Sebagai Social Control

Peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Ketika ada hal-hal yang tidak pas atau ganjil di masyarakat, mahasiswa sudah seharusnya memberontak terhadap birokrasi yang tidak lazin. Sebagai mahasiswa seharusnya menumbuhkan jiwa kepedulian sosial yang peduli terhadap masyarakat.

## **D. Organisasi Mahasiswa**

Organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus.

### 1. Organisasi Intra Kampus

Yakni organisasi yang secara administratif dan structural berhubungan dengan kampus. Organisasi mahasiswa intra kampus dibedakan menjadi dua,

antara lain organisasi intra kampus dibawah naungan mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa (UKM). Organisasi tersebut sebagai berikut:

- a. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-U)
- c. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)
- d. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)
- e. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
- f. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK), yaitu lembaga otonom diluar republik mahasiswa yang bertujuan sebagai wadah pengembangan kegiatan, minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa.

## 2. Organisasi Ekstra Kampus

Organisasi ekstra kampus adalah organisasi independen yang baik struktur dan administrasinya lepas dari manapun serta memiliki aturan-aturan secara mandiri dan lepas dari pengawasan manapun. Sehingga organisasi ini lebih berani menyuarakan aspirasi secara lantang, organisasi ekstra kampus secara umum bertujuan memberikan wadah bagi mahasiswa untuk bersikap dan bertindak dalam menanggapi masalah- masalah yang bersifat sosial kemasyarakatan baik dalam lingkungan regional maupun nasional dan tidak terkait dengan organ-organ lain baik yang bersifat politik maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak structural kampus. Beberapa contoh organisasi ekstra kampus antara lain PMII, IIMI, IMM, KAMMI, GMNI, dan lain-lain.

### **E. Aspek-aspek yang terdapat dalam Kampus**

1. Birokrasi & Kebijakan Kampus
2. Dinamika Akademik
3. Norma Akademik (Etika Kampus)
4. Perilaku/ Sikap Mahasiswa
5. Dinamika Organisasi Kemahasiswaan Intra kampus dan ekstra kampus

Mahasiswa diarahkan untuk menjadi seseorang yang memiliki kualifikasi (kompetensi) sebagai berikut:

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya kesenian yang merupakan keahliannya.

## **F. Tri Dharma Perguruan Tinggi**

### **1. Pendidikan dan Pengajaran**

Poin pertama pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam keberlangsungan pendidikan di suatu institusi pendidikan baik itu universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, ataupun bentuk lainnya. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha dalam pembentukan pribadi agar sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, pendidikan merupakan usaha sadar yang sudah direncanakan untuk dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya. Adapun jika proses belajar mengajar tidak dilakukan dengan baik, maka akan berefek pada kemajuan bangsa itu sendiri, dimana masyarakat memiliki kualitas yang minimal. Untuk itu, pendidikan dan pengajaran menjadi poin yang paling penting dilakukan oleh perguruan tinggi.

### **2. Penelitian dan Pengembangan**

Poin kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah mengadakan penelitian dan pengembangan Hal ini untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi yaitu memiliki Sumber Daya Manusia yang kreatif, cerdas, dan kritis. Sebagai

contoh, negara maju yang ada di Dunia sudah memiliki sistem penelitian dan pengembangan yang tinggi. Oleh karenanya, negara-negara yang memiliki tingkat penelitian tinggi, kini berkembang sangat pesat baik dari segi teknologi atau pun produk lainnya. Salah satu bentuk kontribusi agar bangsa terus maju dan berkembang yakni dengan menerapkan penelitian dan pengembangan. Kedua hal tersebut akan berdampak positif pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan sektor lainnya. Maka dari itu, sebagai mahasiswa maupun tenaga pendidik, harus terbiasa membuat penelitian, laporan melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Hal ini untuk memajukan perguruan tinggi agar lebih berkualitas.

### 3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Selanjutnya poin Tri Dharma Perguruan Tinggi terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas. Salah satu contoh untuk dapat mengabdikan kepada masyarakat yakni mengadakan workshop atau seminar. Dimana dalam pengadaan workshop atau seminar harus memiliki tim yang solid dan satu tujuan yang sama. Tanpa jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat, tentu saja tidak ada artinya. Mahasiswa hanya menjadi cikal bakal manusia yang egois dan tidak peduli terhadap masyarakat. Hal itu tentu bukan sesuatu yang baik, dimana mahasiswa merupakan harapan besar bangsa ini dan diharapkan mampu tumbuh, berkembang, dan menjadi harapan masa depan bangsa.

### G. Sumpah Mahasiswa

*"Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, bertanah air satu tanah air tanpa penindasan."*

*"Kami mahasiswa bersumpah, berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan."*

*"Kami mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan."*



## STUDI GENDER DAN KELEMBAGAAN KOPRI

### Prawacana

Konsep penting yang harus dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender (konstruksi sosial). Pemahaman terhadap perbedaan antara konsep seks dengan gender sangat diperlukan untuk melakukan analisis dan memahami persoalan-persoalan mengenai ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan antara perbedaan gender (gender difference) dan ketidakadilan gender (gender inequities) dengan struktur keadilan masyarakat secara lebih luas,

Pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep ini telah melahirkan suatu analisis gender. Analisis gender juga ikut mempertajam analisis kritis yang sudah ada. Misalnya analisis kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx ketika melakukan kritik terhadap sistem kapitalisme. Demikian halnya dengan analisis kritis lain seperti analisis hegemoni ideologi dan kultur yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, merupakan kritik terhadap kelas yang dianggap sangat sempit. Dalam bidang epistemologi dan riset misalnya analisis kritis (critical theory) dan penganut mazhab Frankfurt yang memuatkan perhatian kepada perkembangan akhir masyarakat kapitalisme dan dominasi epistemologi positivisme terutama kurang mendasar justru karena tidak ada pertanyaan tentang gender dalam kritiknya. Lahirnya epistemologi feminis dan riset feminis adalah penyempumaan dari kritis mazhab Frankfurt dengan adanya pertanyaan gender. Demikian pula analisis diskursus (discourse analysis) yang berangkat dari pemikiran Foucault dan Althusser yaitu merupakan kritik atas semangat reduksionisme dan anti pluralisme dari keseluruhan analisis di bawah pengaruh zaman modernisme.

Perbedaan anatomi biologis utara laki-laki dan perempuan cukup jelas, akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan jenis kelamin inilah menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologi (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap jenis

kelamin inilah yang disebut gender. Sesungguhnya atribut dan beban gender tidak mesti ditentukan oleh analisis biologis. Jadi dapat dibedakan antara pemilikan penis dan vagina sebagai peristiwa sosial budaya dan pemilikan penis dan vagina sebagai peristiwa biologis. Yang pertama dapat disebut alat kelamin biologi (physical genital) dan yang kedua dapat disebut alat kelamin budaya (cultural genital). Secara biologis, alat kelamin adalah konstruksi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan sosial budaya masyarakat (gender less). Akan tetapi secara budaya, alat jenis kelamin menjadi faktor paling penting dalam melegitimasi atribut gender seseorang. Begitu atribut jenis kelamin kelihatan, maka pada saat itu konstruksi budaya mulai terbentuk. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran dan status dalam masyarakat.

Aksesori yang membedakan antara bayi laki-laki dan perempuan adalah atribut gender (gender attribute). Jika atribut gender sudah jelas, misalnya seorang anak mempunyai penis, maka ia dikonsepsikan sebagai anak laki-laki. Ia diberikan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana layaknya anak laki-laki lain. Jika mempunyai vagina, maka ia dikonsepsikan sebagai anak perempuan dan ia diberikan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana layaknya anak perempuan lain. Kekhususan inilah yang melekat kepada diri anak tersebut yang kemudian disebut dengan identitas gender (gender identity). Begitu anak dilahirkan bukan saja dijumpai dengan identitas budaya tetapi juga nilai budaya, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran budaya yang berbeda dalam masyarakat. Perbedaan peran budaya ini biasanya distilahkan dengan beban gender (gender Assignment). Pola pembenturan beban gender dalam lintas budaya masyarakat (cross cultural society) lebih banyak mengacu pada jenis kelamin (*sex*).

Di dalam suatu negara yang masyarakatnya kental dengan nilai-nilai budaya dan tertanam nilai-nilai ajaran agama Islam, merupakan suatu konsekuensi logis, apabila nilai-nilai tersebut menjadi sumber dari pembuatan berbagai produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku terhadap nilai pembagian peran aturan laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Di dalam

hukum Indonesia, kita mengenal sebuah undang-undang yang sangat strategis mengantar masalah pembagian peran ini, yakni undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang dalam pasalnya disebutkan, pria adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kemampuannya, sementara istri wajib mengantar ramah tangga sebaikbaiknya. Jadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya bisa ditinjau dari aspek sosial budaya, agama, politik, hukum, dan aspek lain yang melingkupi sendi kehidupan manusia. Keberadaan budaya masyarakat inilah yang harus dinetralisir dari segala bentuk kekerasan, sub-ordinasi dan marginalisasi terhadap hak asasi dan kehendak perempuan. Sehingga nantinya dalam proses transformasi sosial outputnya akan terwujud masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan.

## **A. Pengertian Gender**

1. Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris "gender" berarti "jenis kelamin". Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku".
2. Di dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
3. Hilany M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender, an Introduction mengatakan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men). Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketentuan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kanan gender (what A given society difines as masculine or feminine is a component of gender).

4. HT. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi lakilaki dan perempuan. Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstrukli sosial budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis (an analytic concept) yang dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu.
5. Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "gender". Gender diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni lakilaki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian karya yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Dari banyaknya definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.

Konsep gender yakni suatu hal yang melekat pada kaum laki-laki alan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural sejarah perbedaan gender (gender difference) antara manum jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosial iasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosil dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara.

## **B. Perbedaan Sex dan Gender**

Gender secara umum digunakan untuk mengidentikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sedangkan sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Istilah sex berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang,

meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Secara fisik biologis, laki-laki dan perempuan tidak saja dibedakan oleh identitas jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologi lainnya, melainkan juga komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan yang terakhir ini menimbulkan akibatakibat fisik biologis seperti laki-laki yang mempunyai suara lebih besar, berkumis, berjenggot, pinggul lebih ramping dan dada yang datar. Sementara perempuan mempunyai suara lebih bening, buah dada menonjol, pinggul umumnya lebih besar dan organ reproduksi yang amat berbeda dengan laki-laki.

Implikasi Perbedaan Biologis Terhadap Manusia Anatomi biologis dan komposisi kimia tubuh manusia memiliki beberapa keunggulan sebagaimana dapat dilihat dalam perilaku manusia. Potensi keunggulan ini menjadikan manusia sebagai penguasa di kaumi (khalifah fil Ard). Perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh oleh sejumlah ilmuwan dianggap berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas urgen, misalnya, mengidentifikasi perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan yaitu:

Laki-laki (Masculine)	Perempuan (Feminine)
Sangat agresif	Tidak selalu agresif
Obyektif	Subyektif
Lebih logis	Kurang logis
Kompetitif	Kurang kompetitif
Ruang publik	Konsentrasi dirumah (Privat)

Kalangan feminis dan ilmuwan Marxis menolak anggapan diatas dan menyebutnya hanya sebagai bentuk stereotipe gender. Mereka membantah adanya

skematisasi perilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan anatomi tubuh dan genetika antara laki-laki dan perempuan didominasi dan dipolitisi terlalu jauh sehingga seolah-olah secara substansial perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Anggapan bahwa laki-laki lebih kuat, lebih cerdas, dan emosional, lebih stabil, sementara perempuan lemah, kurang cerdas dan emosional, kurang stabil hanyalah stereotipe gender. Para feminis menunjuk beberapa faktor yang dianggap sebagai agen pemasyarakatan ("agent of civilization") stereotipe gender, antara lain penganut bahwa susana keluarga, kehidupan ekonomi dan susana sosial politik.

Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender (gender inequalities) bagi kaum laki-laki terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau dalam pelabelan negatif kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

### **C. Manifestasi Ketidakadilan Gender**

#### **1. Gender dan Marginalisasi Perempuan**

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan. sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya; pengusuran, bencana alam atau proses eksploitasi, namun adalah satu bentuk pemiskinan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme protes marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan.

Misalnya program adanya pangan atau revolusi hijau (green revolution) secara otonomi telah menyingkirkan kaum perempuan dan pekerjaannya sehingga memiaskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang timbul lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan bibit tidak lagi memungkinkan permanenan menggunakan ani-ani padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di dan termarginalkan yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan disawah padi musim panen. Berarti program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi rugi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur atau bahkan bangsa. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsir keagamaan misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

## 2. Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga), dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga, masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil kepulusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak-anak laki

akan mendapatkan prioritas utama. Praktis/ perbuatan seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

### 3. Gender dan Stereotype

Secara umum stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya, stereotype selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotype yang diberikan kepada suatu suku bangsa tertentu misalnya Yahudi di Barat, Cina dan Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu garis stereotype itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan (stereotype) yang dilakukan pada mereka. Misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka tiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotype ini berakibat wajar sekali bila pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotype terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype tersebut.

### 4. Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invansi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berawal dari berbagai sumber, namun jelas satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh bias gender ini. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender related violence. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak maestrim dan bentuk kejahatan yang bila dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

*Pertama*, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan.

*Kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di rumah tangga (domestic violence), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak- anak (child abuse).

*Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (genital mutilation). misalnya penyunatan terhadap anak perempuan.

*Keempat*, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan.

*Kelima*, kekerasan dalam bentuk propaganda pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk jenis kekerasan non-fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan obyek demikian juga dengan seseorang.

*Keenam*, kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam Keluarga berencana (enforced sterilization). Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.

*Ketujuh*, adalah jenis kekerasan terselubung (molestion), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dari berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan seperti ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bus.

*Kedelapan*, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau sexual and emotional harassment.

Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan seksual, diantaranya adalah:

- a. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara dirasakan dengan sangat sensitif. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
- b. Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
- c. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya.
- d. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin dari yang bersangkutan.

#### 5. Gender dan Beban Kerja (*Double Burden*)

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja tersebut terjadi di berbagai tingkatan. Pertama, manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat negara, Kedua, manifestasi ketidakadilan gender terjadi di tempat kerja, organisasi, maupun dunia pendidikan. Ketiga, manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi pada adapt- istiadat, masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau dalam tradisi keagamaan.

#### **D. Perspektif Teori Gender**

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Teori Psikoanalisa/ Identifikasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun dari tiga struktur. Pertama, id, sebagai

pembawaan sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. Kedua, ego, bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur antara keinginan subyektif individual dan tuntutan obyektif realitas sosial. Ketiga, super ego, berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan.

## 2. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut didalam masyarakat. Sebenarnya teori strukturalis dan teori fungsionalis dibedakan oleh beberapa ahli, seperti Hilany M. Lips dan SA. Shichi. Teori strukturalis lebih condong ke persoalan seologis, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke persoalan psikologis. R. Dabrendolf, salah seorang pendukung teori ini, meringkaskan prinsip-prinsip teori ini sebagai berikut:

- a. Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian.
- b. Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol.
- c. Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian itu dapat dipelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama. Penubuhan terjadi secara berangsur-angsur.
- d. Integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat.

## 3. Teori Konflik

Dalam soal gender, teori konflik diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi

bahwa dalam susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh Friedrich Engels mengemukakan satu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, tidak disebabkan oleh perbedaan sosiologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan, dari kelas yang berkumpul dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga (family). Hubungan suami dan istri tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, pemerias dan yang diperias. Dengan kata lain, ketimpangan gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau pemberian Tuhan (divine creation), tetapi karena konstruksi masyarakat (social contribution).

#### 4. Teori-teori Feminis

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok sebagai berikut:

##### a. Feminisme Liberal

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia laki-laki dan perempuan, diterapkan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya.

##### b. Feminisme Marxis-Sosialis

Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan Rusia dengan menampilkan beberapa tokohnya, seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin ini sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam.

### c. Feminisme Radikal

Aliran ini mulai muncul di awal abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan, karena term ini jelas-jelas menguntungkan laki-laki. Lebih dari itu, di antara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan seksual, dalam arti kepuasan seksual juga diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolelir praktek lesbian.

### 5. Teori Sosio-Biologis

Ini dikembangkan oleh Pierre Van Den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox dan intinya bahwa semua pengaman peran jenis kelamin tercermin dari "biogram" dasar yang diwarnai manusia modern dari nenek moyang primat dan hominid mereka. Integritas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh factor biologis tetapi juga elaborasi kebudayaan atau biogram manusia. Teori ini disebut "bio-sosial" karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi gender.

## E. Kodrat Perempuan dalam Islam

Kodrat berasal dari bahasa Arab *qadara/qadira. yaqdiru yaqdiru - qudratan*, Dalam *kamus Munjid fi al-lughah Wal al-A'lam*, kata ini diartikan dengan *qawiyun 'ala as-syai* (kuasa mengerjakan sesuatu), *ja'alajhu 'ala miqdarih* (membagi sesuatu menurut porsinya), atau *qashshara* (memendekkan/membatasi) akar kata *qadara/ qadira* ini juga lahir kata *taqdir (qaddra-yugaddira-taqdir)*. Bagaimana sesungguhnya pandangan Islam (a-Qur'an dan Hadits) dalam menempatkan perbedaan jenis kelamin dalam konsep pranata sosial. Catatan sejarah tentang kedudukan dalam struktur sosial, khususnya masyarakat Arab pra-Islam sangat memprihatinkan. Perempuan dipandang tidak lebih dari "obyek", perlakuan seks kaum laki-laki dan dianggap sebagai beban dalam strata sosial. Itulah sebabnya, dalam budaya masyarakat Arab ketika itu bukan sesuatu yang naif untuk "menyingkirkan" perempuan dalam kehidupan dan pergaulan mereka. Tidak segan-segan mereka membunuh bahkan mengubur anak perempuan

mereka. Al-Qur'an sendiri secara langsung menyinggung hal ini dan menyindir mereka yang berpikiran picik yang menganggap anak, khususnya perempuan, hanya sebagai beban sosial dan ekonomi. QS. Al-An'am (16): 151:

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak diataranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya”.*

Islam mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, bukan pembedaan (discrimination). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki., namun perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya. Dalam Islam, kaum perempuan juga memperoleh berbagai hak sebagaimana halnya kawan laki-laki.

### 1. Hak-Hak Dalam Bidang Politik.

Tidak ditemukan ayat/hadits yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Hal ini terdapat dalam QS. &I-Taubah (9): 71, QS. Al-Mumtahanah (160): 12.

### 2. Hak-hak dalam Memilih Pekerjaan.

Memilih pekerjaan bagi perempuan juga tak ada larangan baik itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri atau secara kolektif, baik di lembaga pemerintah atau swasta. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

### 3. Hak memperoleh pekerjaan

Kalimat pertama yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah kalimat perintah, yaitu perintah untuk membaca (iqra'). Perintah untuk menuntut ilmu

pengetahuan tidak hanya bagi kaum laki-laki tetapi juga perempuan "menuntut ilmu pengetahuan difardlukan kepada kaum Muslim laki-laki dan perempuan.

## **F. Sejarah KOPRI**

Ketika PMII lahir rasanya diperlukan wadah pengkaderisasian putri di PMII, 1960 ini dibentuklah Departement Keputrian. Dengan tujuan sebagai wadah dalam menuangkan minat, bakat dan intelektual putri. Serta mengorganisir pengkaderan putri di PMII. Kala itu departmen ini berfokus pada pelatihan menjahit dan masak.

Departemen Keputrian pada 16 Februari 1966 membuat training khusus keputrian di Jakarta. Dengan menghasilkan Panca Norma dan gagasan pembentukan badan semi otonom untuk anggota dan kader perempuan. 25 November 1967 di Semarang lahirlah Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, sebagai badan semi otonom. Diketui oleh Ismi Maryamah BA. Dengan mengorganisir kekuatan kader perempuan PMII serta menjadi ruang gerak dalam mengeluarkan pendapat dan beraktifitas sebatas emansipasi perempuan dalam bidang sosial dan masyarakat.

Dalam perjalanannya pasang surut dialami oleh Korps PMII Putri, hal ini terlihat ketika periode 1970-1973. Pada 1973 kala itu Kongres ke-5 PMII di Ciloto Jawa Barat, KOPRI dibubarkan hal ini disebabkan Pengurus Besar Korps PMII Putri tidak mengadakan kegiatan dan dinilai gagal. Hal ini diperparah dengan tidak mempunya membuat Laporan Pertanggung Jawaban. KOPRI dibentuk kembali pada Kongres ke-9 PMII di Surabaya 1988, yang diketuai oleh Khofifah Indah Parawangsa. Dalam periode ini dibentuk system kaderisasi yang sistematis, yaitu Kurikulum dan Pelaksanaan LKK (Latihan Kader KOPRI) serta LPKK (Latihan Pelatih Kader KOPRI). Selanjutnya pada 28 Oktober 1991 lahirlah Nilai Kader KOPRI. Namun nyatanya tidak berselang lama di Kongres ke-13 PMII pada tahun 2000 yang bertempat di Medan, KOPRI dibubarkan dengan hasil votting selisih 1 suara. Hal itu disebabkan melemahnya kader KOPRI dan ditakutkan mengalami stagnasisasi seperti periode 1970-1973, sehingga dengan hasil votting nasib KOPRI dibubarkan. Hasil Kongres ke-14 PMII pada

16-21 April 2003 di Kutai Kartanegara dengan dibentuk kembali KOPRI sebagai semi otonom, melalui POKJA (Pertemuan Kelompok Kerja). Forum POKJA di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, maka 29 September 2003 dibentuk kembali KOPRI dengan juga terciptanya Visi dan Misi KOPRI. Kongres ke-15 PMII di Bogor pada 26-31 Mei 2005 terjadi votting yang menyebabkan status Korps PMII Putri di PMII akan berubah menjadi Badan Semi Otonom. Kala itu diketuai oleh Ai Maryati Sholihah. Periode 2014- 2017 diketuai oleh Ai Rahmayanti, pada kepengurusan ini lahirlah IPO (Ideologi Politik Organisasi) KOPRI yaitu Aswaja dengan pilar-pilarnya. Diantaranya: AI- Huriyyah (pembebasan atau kemerdekaan), AI-adallah (keadilan) dan AI-Musawwah (kesetaraan). Tujuan KOPRI adalah terbentuknya pribadi muslimah yang tertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, beilmu, cakap, dan bertanggung jawab mengamalkan ilmunya. Serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

KOPRI diperjuangkan untuk melahirkan kader ulul albab, berdaulat atas dirinya sendiri, berpikir kritis, sensitif gender, dan mampu membangun gerakan kolektif dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan.

## **G. Lembaga KOPRI**

Status kelembagaan KOPRI secara struktural adalah badan semi otonom atau bagian integral yang tidak terpisahkan dari wadah utamanya yaitu PMII. Pada perjalanannya KOPRI pernah dibubarkan dan akhirnya dibentuk kembali.

Ideologi Politik Organisasi (IPO) KOPRI adalah ASWAJA. Aswaja merupakan metodologi berpikir KOPRI untuk memiliki garis perjuangan politik yang tegas. Dalam prinsip swaja dan pilarnya yaitu pembebasan, keadilan dan kesetaraan maka mutlak menghadirkan musuh yang perlu dilawan.

1. Motto KOPRI: Cerdas, Visioner, dan berakhlakul Karimah
2. Visi: Terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

3. Misi: Mengideologisasikan nilai-nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membentuk masyarakat berkeadilan gender.

## **H. Sistem Kaderisasi Perempuan di PMII**

### 1. Sekolah Islam dan Gender

Kaderisasi formal pertama pasca MAPABA yang diikuti seluruh anggota PMII

### 2. Sekolah Kader KOPRI

Kaderisasi formal pasca SIG dan PKD yang diikuti oleh KOPRI

### 3. Sekolah Kader KOPRI Nasional

Kaderisasi yang diikuti pasca SKK yang diikuti oleh kader KOPRI

## **I. Panca Norma KOPRI**

1. Equility
2. Muslim Women Attitude
3. Totality in the Organization and Mutual Cooperation with PMII
4. Sinergize With other women's organization
5. Make a movement with the community

## **J. Nilai Kader KOPRI**

1. Warga KOPRI sebagai Insan Individu
2. Warga KOPRI sebagai Makhluk Sosial
3. Warga KOPRI sebagai Insan Organisasi

Rumusan NKK :

1. Modernitas
2. Mitra Sejajar
3. Watak KOPRI

#### 4. Wanita Ideal

### **K. Musuh KOPRI**

#### 1. Patriarki

Patriarki dikatakan sebagai budaya dimana anggapan bahwa laki-laki lebih drai perempuan. Hal ini menjadikan perempuan sebagai entitas yang inferior sehingga menghambat dalam aktualisasi diri perempuan.

#### 2. Kapitalisme

Perempuan dipandang sebagai komoditas yang dieksploitasi untuk kepentingan pemilik modal

#### 3. Imperialisme

Bergeraknya modal asing ke berbagai wilayah untuk mencari pasar dan menguasai sumber daya berdampak pada eksploitasi yang terjadi kepada perempuan

#### 4. Fasisme Religius

Penafsiran membabi buta terhadap ajaran agama yang dijadikan sebagai legitimasi untuk mendominasi kaum perempuan.

## LAGU-LAGU PERJUANGAN

### MARS PMII

*Inilah kami wahai Indonesia  
Satu barisan dan satu cita  
Pembela bangsa penegak agama  
Tangan terkepal dan maju kemuka  
Habishlah sudah masa yang suram  
Selesai sudah derita yang lama  
Bangsa yang jaya, islam yang  
benar  
Bangun tersentak dari bumiku  
subur*

*Denganmu PMII, Pergerakanku  
Ilmu dan bakti, kuberikan  
Adil dan makmur kuperjuangkan  
Untukmu satu tanah air ku  
Untukmu satu keyakinanaku*

*Inilah kami wahai Indonesia  
Satu angkatan dan satu jiwa  
  
Putera bangsa bebas merdeka  
Tangan terkepal dan maju ke muka*

*Denganmu PMII, Pergerakanku  
Ilmu dan bakti, kuberikan  
Adil dan makmur kuperjuangkan  
Untukmu satu tanah air ku  
Untukmu satu keyakinanaku*

*Inilah kami wahai Indonesia  
Satu angkatan dan satu jiwa  
Putera bangsa bebas merdeka  
Tangan terkepal dan maju ke muka*

### HYMNE PMII

*Bersemilah, bersemilah,  
Tunas PMII  
Tumbuh subur, tumbuh subur  
Kader PMII  
Masa depan, ditanganmu  
Untuk, meneruskan perjuangan  
Bersemilah, bersemilah  
Kau harapan bangsa*

### BURUH TANI

*Buruh, tani, mahasiswa, rakyat  
miskin kota  
Bersatu padu rebut demokrasi  
Gegap gempita dalam satu suara  
Demi tugas suci yang mulia*

*Hari-hari esok adalah milik kita  
Terciptanya masyarakat sejahtera  
Terbentuknya tatanan masyarakat  
Indonesia baru tanpa orba*

*Marilah kawan mari kita kabarkan*

*Di tangan kita tergeggam arah  
bangsa*

*Marilah kawan mari kita nyanyikan  
Sebuah lagu tentang pembebasan*

*Di bawah kuasa tirani  
Ku susuri garis jalan ini  
Berjuta kali turun aksi  
Bagiku satu langkah pasti  
Berjuta kali turun aksi  
Bagiku satu langkah pasti*

#### **TOTALITAS PERJUANGAN**

*Kepada para Mahasiswa  
Yang merindukan kejayaan  
Kepada Rakyat yang kebingungan  
Di persimpangan jalan*

*Kepada pewaris peradaban  
Yang telah menggoreskan  
Sebuah catatan kebanggaan  
Di lembar sejarah manusia*

*Wahai kalian yang rindu  
kemenangan  
Wahai kalian yang turun ke jalan  
Demi mempersembahkan jiwa dan  
raga  
Untuk negeri tercinta*

*Wahai kalian yang rindu  
kemenangan*

*Wahai kalian yang turun ke jalan  
Demi mempersembahkan jiwa dan  
raga*

*Untuk negeri tercinta*

#### **DARAH JUANG**

*Disini negeri kami  
Tempat padi terhampar  
Samudranya kaya raya  
Tanah kami subur tuan*

*Di negeri permai ini  
Berjuta rakyat besimbah rugah  
Anak buruh tak sekolah  
Pemuda desa tak kerja  
Mereka dirampas haknya  
Tergusur dan lapar  
Bunda, relakan darah juang kami  
'Tuk membebaskan rakyat*

*Mereka dirampas haknya  
Tergusur dan lapar  
Bunda, relakan darah juang kami  
Padamu kami berbakti*

*Disini negeri kami  
Tempat padi terhampar  
Samudranya kaya raya  
Tanah kami subur tuan*

*Di negeri permai ini  
Berjuta rakyat besimbah rugah  
Anak buruh tak sekolah  
Pemuda desa tak kerja*

*Mereka dirampas haknya  
Tergusur dan lapar  
Bunda, relakan darah juang kami  
'Tuk membebaskan rakyat*

*Mereka dirampas haknya  
Tergusur dan lapar  
Bunda, relakan darah juang kami  
Padamu kami berbakti*

*Mereka dirampas haknya  
Tergusur dan lapar  
Bunda, relakan darah juang kami  
'Tuk membebaskan rakyat*

*Mereka dirampas haknya  
Tergusur dan lapar  
Bunda, relakan darah juang kami  
Padamu kami berbakti  
Padamu kami mengabdikan*

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PMII : *Keputusan Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Palembang 2024*
- Manhaj al-Fikr Li Ahlissunnah Wal Jama'ah PMII: *Keputusan Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Palembang 2024*
- Nilai Dasar Pergerakan: *Keputusan Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Palembang 2024*
- Hasil-hasil Musyawarah Pimpinan Nasional PMII di Tulungagung, 2022
- Mul
- Santoso Kristeva, Nur Sayyid, *Aswaja Sebagai Manhajul Fikr Wal Harokah* , Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2024
- Santoso Kristeva, Nur Sayyid, *Manifesto Wacana Kiri*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2015
- Multy Level Strategy Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- Draft Pedoman Kaderisa Musyawarah Pimpinan daerah PKC PMII Jawa Barat
- Alfas, Fauzan. *PMII dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan*, PB. PMII: Jakarta, 2015 dan Intimedia: Malang, 2015.
- Naskah Otentik Nilai Dasar Pergerakan
- Fathoni, Moh. *Menapak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*, PT. Komodo Books: Depok, 2012.
- Farih, Amin. *Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)* Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016, 251-284
- Murfianti, Dian. *PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1936-1945 (Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember)*. Universitas Jember diakses dari [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/8955/dian%20murfianti%20Skripsi\\_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/8955/dian%20murfianti%20Skripsi_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Rizki Adhari, Nursanda. Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Melalui Peran Nahdlatul Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. JIPIS Volume 29, No. 2, Oktober 2020.

:

## DAFTAR RUJUKAN BUKU BACAAN WAJIB

### Daftar Buku Bacaan Ke-PMII-an

1. Nur Sayyid Santoso Kristeva: *Hand Out Materi Kaderisasi*.
2. Nur Sayyid Santoso Kristeva: *Risalah Pergerakan. Risalah Pertama: Aswaja Sebagai Manhajul Fikr Wal Harokah* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2024).
3. Fauzan Alfas: *PMII dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan* (PB PMII, 2015).
4. Ahmad Hifni: *Menjadi Kader PMII*.
5. Mohammad Fajul Falaakh: *Bunga Rampai Citra Diri PMII* (Yayasan Putra Nusantara).
6. A. Malik Haramain: *PMII di Simpang Jalan?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
7. Amrullah Ali Moebin: *Hitam Putih PMII, Refleksi Arah Juang Organisasi*.
8. Muhammad Hanif Dhakiri, Zaini Rahman: *Post-Tradisionalisme Islam, Menyingkap Corak Pemikiran dan Gerakan PMII* (Isisindo Mediatama, 2000).

### Daftar Buku Rujukan Ilmu Filsafat-Sosial-Keislaman

1. Nur Sayyid Santoso Kristeva: *Negara Marxis & Revolusi Proletariat* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
2. Nur Sayyid Santoso Kristeva: *Sejarah Teologi Islam & Akar Pemikiran Aswaja* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
3. Nur Sayyid Santoso Kristeva: *Kapitalisme, Negara & Masyarakat* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

4. Nur Sayyid Santoso Kristeva: *Sejarah Ideologi Dunia* (Jogjakarta: Lentera Kreasindo, 2015).
5. Nur Sayyid Santoso Kristeva: *Manifesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

### **Daftar Buku Rujukan Ilmu Filsafat**

1. Louis O. Kattsoff: *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996).
2. Stephen Palmquis: *Pohon Filsafat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
3. Titus Smith Nolan: *Persoalan-persoalan Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
4. Bertrand Russell: *Sejarah Filsafat Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
5. K. Berten: *Filsafat Sejarah Kontemporer; Jerman dan Inggris, Jilid 1* (Jakarta: Gramedia, 2014).
6. K. Berten: *Filsafat Sejarah Kontemporer; Prancis, Jilid 2* (Jakarta: Gramedia, 2014).
7. K. Berten: *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).
8. Harun Hadiwijono: *Sari Sejarah Filsafat Barat, Jilid 1* (Yogyakarta: Kanisius, 1980).
9. Harun Hadiwijono: *Sari Sejarah Filsafat Barat, Jilid 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1980).
10. Mohammad Hatta: *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: UI Press & Tintamas, 1986).

### **Daftar Buku Rujukan Ilmu Sosial**

1. George Ritzer: *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

2. George Ritzer & Barry Smart: *Handbook Teori Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2012).
3. George Ritzer: *Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
4. Doyle Paul Johnson: *Teori Sosiologi Klasik & Modern, Jilid I* (Jakarta: Gramedia, 1998).
5. James S. Coleman: *Dasar-dasar Teori Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2008).
6. Peter Beilharz: *Teori-teori Sosial; Observasi terhadap Para Filosofis Terkemuka* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
7. Joseph A. Schumpeter: *Capitalism, Socialism & Democracy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
8. Hans Fink: *Filsafat Sosial; dari Feodalisme hingga Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
9. Aholiab Watloly: *Sosio-Epistemologi; Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 2013).
10. Anthony Giddens: *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber* (Jakarta: UI-Press, 1986).
11. Anthony Giddens: *Problematika Utama dalam Teori Sosial; Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
12. Anthony Giddens: *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan; Masa Depan Politik Radikal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
13. Stephen K. Sanderson: *Makro Sosiologi; Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
14. Max Weber: *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
15. Max Weber: *Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
16. Brian S. Turner (ed.): *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

17. Piotr Sztompka: *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

### **Daftar Buku Rujukan Ilmu Keislaman**

1. Adonis: *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam, Volume 1* (Yogyakarta: LKiS, 2007).
2. Adonis: *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam, Volume 2* (Yogyakarta: LKiS, 2007).
3. Adonis: *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam, Volume 3* (Yogyakarta: LKiS, 2007).
4. Adonis: *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam, Volume 4* (Yogyakarta: LKiS, 2007).
5. Hasan Hanafi: *Studi Filsafat 1; Pembacaan Atas Tradisi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2015).
6. Hasan Hanafi: *Studi Filsafat 2; Pembacaan Atas Tradisi Barat Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2015).
7. Abdullahi Ahmed An-Naim, Mohammed Arkoun, dkk.: *Dekonstruksi Syariah, Jilid 1* (Yogyakarta: LKiS, 1996).
8. Abdullahi Ahmed An-Naim, Mohammed Arkoun, dkk.: *Dekonstruksi Syariah, Jilid 2* (Yogyakarta: LKiS, 1996).
9. Asy-Syahrastani: *Al-Milal Wa An-Nihal* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006).
10. Ali Rahnama: *Ali Syari'ati; Biografi Politik Intelektual Revolusioner* (Jakarta: Erlangga, 2000).
11. Asghar Ali Engineer: *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
12. Michael Löwy: *Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
13. Imam Al-Ghazali: *Tahafut Al-Falasifah* (Bandung: Marja, 2010).
14. Ibnu Rusyd: *Tahafut At-Tahafut; Sanggahan terhadap Tahafut Al-Falasifah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

15. Arnold Toynbee: *Sejarah Umat Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
16. Kazuo Shimogaki: *Kiri Islam; Antara Modernisme dan Postmodernisme* (Yogyakarta: LKiS, 2011).
17. Eko Prasetyo: *Islam Kiri; Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
18. Leonard Binder: *Islam Liberal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
19. Martin van Bruinessen: *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading, 2015).
20. Clifford Geertz: *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014)

### **Daftar Buku Rujukan Ilmu Pendidikan Kritis**

1. William F. O'Neil: *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
2. Neil Postman & Charles Weingartner: *Mengajar sebagai Aktivitas Subversif* (Yogyakarta: Jendela, 2001).
3. Paulo Freire: *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, 2000).
4. Paulo Freire: *Pendidikan sebagai Proses* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
5. Paulo Freire: *Pedagogi Pengharapan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
6. Paulo Freire & Antonio Faundez: *Belajar Bertanya; Pendidikan yang Membebaskan* (Jakarta: Gunung Mulia, 1995).
7. Ira Shor & Paulo Freire: *Menjadi Guru Merdeka* (Yogyakarta: LKiS, 2001).
8. Joy A. Palmer: *50 Pemikir Pendidikan; dari Piaget sampai Masa Sekarang* (Yogyakarta: Jendela, 2003).
9. M. Escobar, dkk.: *Sekolah Kapitalisme yang Licik* (Yogyakarta: LKiS, 1998).
10. William A. Smith: *Conscientizacao; Tujuan Pendidikan Paulo Freire* (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

